

Dr. Mukhammad Abdullah, M.Ag

MANAJEMEN PENDIDIKAN KONTEMPORER

Konstruksi
Pendekatan
Berbasis Budaya
dan Kearifan Lokal



cendekia

Penerbit **Cendekia Press** - Bandung

MANAJEMEN PENDIDIKAN KONTEMPORER

Konstruksi Pendekatan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal

Copyright ©2020 - Mukhammad Abdullah

Penulis: Dr. Mukhammad Abdullah, M.Ag.

Editor: Dr. Limas Dodi, M.Hum.

Desainer sampul: Rianto Hidayat

Layout: Ujang Pekik

CP. PK043-2020

ISBN: 978-623-7438-94-6

Cetakan pertama, Juli 2020

Diterbitkan oleh:

CV CENDEKIA PRESS

NIB: 8120107982776

Komp. GBA Barat Blok C-4 No 7 Bandung

Email: penerbit@cendikiapress.com

Website: www.cendikiapress.com

Anggota IKAPI No 328/JBA/2018

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis, dan hak penerbitan pada CV Cendikia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pengantar

Segala syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam yang maha pengasih dan penyayang kepada makhlukNya. Berkah rahmat, hidayah dan maunahNya, buku ini dapat terselesaikan. Shalawat dan keselamatan tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sang refolusioner peradaban keilmuan dunia, karena beliau kita dapat menikmati nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat Islam.

Pendidikan telah lama hidup di Indonesia. Sejak Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, K. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari, Budi Utomo sampai hari ini pendidikan tetap menjadi tumpuan utama negara Indonesia. Masa depan bangsa dan negara, tergantung bagaimana pandai-pandainya memoles generasi, tergantung pada cara guru mendidik murid-muridnya dan pada pola manajemen pembelajaran yang digunakan. Nasib negara

Indonesia, berkembang-mundurinya hari ini dilihat dari kehebatan bangsa mudanya. Karena bagaimanapun, merekalah yang akan memimpin Indonesia di usia 30 tahun ke depan.

Setiap dasawarsa, memiliki cara sendiri mengembangkan pendidikan. Dulu Indonesia pernah dihadapkan pada situasi rumit, yakni lahir konsep kolonialis dalam tubuh manajemen pendidikan. Pendidikan kita diporandakan. Generasi dicetak untuk menjadi kaum pekerja, kuli perusahaan, penjajah dan jauh dari sifat memanusiakan manusia. Ini terjadi karena manajemen yang dijalankan, berhaluan kolonialis liberalis.

Tahap berikutnya muncul model manajemen pendidikan liberalis sosialis, terjadi pada masa Orde Baru. Gaya manajemen ini mendewakan sikap otoritarisme, di mana kebebasan terengkuh dari semua aspek. Orientasi pendidikan dikekang dan diarahkan pada jalur yang buntu. Pendidikan mencetak generasi yang passif terhadap kemajuan negara dan perkembangan sosial. Penduduk di pinggiran kota dipaksa tidak mendapat pendidikan yang layak. Model sekolah nyaris sama dengan pola manajemen kebarat-baratan dan kaum elit masih enak mendominasi di atas.

Orde lama berupaya mengusung pembaruan yang tertuang dalam kebijakan revolusi total pendidikan dengan mengusung manajemen etis. Diantaranya adalah mengoarkan pendidikan untuk semua kalangan, kebebasan berpendapat, sosialisme pendidikan dijunjung tinggi dan pendidikan tidak melihat kelas sosial. Ki Hajar Dewantara-pun mengubah pendidikan dengan sistem *Among*. Sebuah pendekatan genius dengan merubah haluan. Tujuan pendidikan harus mengacu pada asas kemanusiaan, kodrat alam, kebudayaan dan kebangsan, kemudian dikenal dengan semboyan *Panca Dharma Taman Siswa* dengan jargon *ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani* pada tahun 1950.

Tahun 1994, Indonesia berhasil merombak kurikulum ke arah yang lebih cerah. Pemusatan total pada anak didik diperluas dengan memasukkan unsur muatan lokal sebagai pendekatan. Meski belum sempurna bener, masa ini dikenal sebagai kurikulum super padat. Wajar saja, peletakan embrio ini telah mampu menelorkan kebijakan-kebijakan baru di era reformasi. Kurikulum tidak lagi *monoton* edukatif, namun digeser pada kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan yang mulanya sentralistik, dirubah menjadi desentralistik.

Bergemuruh pendidikan berbasis kearifan lokal. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, tiba-tiba menjadi kabar baik. Setiap daerah, memperkenalkan budayanya melalui pembelajaran. Potensi lokal dikembangkan, diintegrasikan, diinternalisasikan ke dalam empat wajah; muatan pelajaran, kegiatan, program dan kerjasama semua elemen. Daerah terpinggirkan menjadi produktif, kebudayaan daerah yang tenggelam hidup kembali, adat istiadat banyak diungkap, akhirnya manajemen pendidikan kita bergeser menjadi ke arah pengembangan kearifan lokal.

Buku ini hadir sebagai obor bagi manajemen pendidikan di negeri ini. Beragam pola manajemen pendidikan kontemporer dibahas dalam buku ini. Sebuah pendekatan manajemen pendidikan yang berbasis pada karakter, budaya dan kearifan lokal. Tentunya, dikemas dengan sajian-sajian menarik dengan studi lapangan sebagai bukti sampelnya. Sudah saatnya pendidikan kita menjadi media penyelamat bangsa dengan mencetak generasi yang berkarakter dan dapat mengembangkan potensi kearifan lokal di daerahnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada beberapa pihak yang telah mensupport dengan

baik, meluangkan waktu untuk sekadar berdiskusi dan memberikan masukan berharga. Tanpa bantuan beliau semua, tentu buku ini akan sangat banyak kelemahan. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga Allah membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Amien

Terakhir, ketika membaca buku ini, tentu mendapati banyak sekali kekurangan sekalipun kami telah berupaya untuk menyempurkan. Tentu sebagai manusia biasa, hal demikian merupakan kekhilafan kami. Dari itulah, kritik dan saran sangat kami tunggu sebagai bahan pembelajaran pada edisi-edisi berikutnya. Semoga Allah memberikan ilmu dan menyingkap tabir kebodohan pada kita semua. Amien.

Kediri, Juni 2020

Penulis

Daftar Isi

Pengantar — iii

Daftar Isi — ix

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang — 1

B. Ruang Lingkup Pembahasan — 32

C. Metode Kajian — 34

BAB 2 Konsep Dasar Manajemen Pendidikan

A. Semesta Makna dan Implikasi — 37

B. Manajemen Pendidikan
sebagai Ilmu — 49

C. Prinsip dan Nilai Manajemen
Pendidikan — 66

BAB 3 Manajemen Pendidikan Berbasis
Antropologi Budaya

A. Manajemen Pendidikan: Pendekatan
Antropologi Budaya — 85

- B. Model Pembelajaran Berbasis Budaya — 91
- C. Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya — 95

BAB 4 Manajemen Pendidikan Berbasis

Karakter

- A. Signifikansi Akademik Pendidikan Karakter — 105
- B. Model Integrasi Pendidikan Karakter — 112
- C. Model Manajemen Pendidikan Karakter — 118
- D. Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter — 131

BAB 5 Manajemen Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

- A. Kearifan Lokal dalam Pendidikan — 157
- B. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal — 170
- C. Implementasi Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal — 179

Daftar Pustaka — 191

Indeks — 211

Tentang Penulis — 215

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Metamorfosis pendidikan Indonesia, belakangan ini, mengalami rentetan pembaruan, baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri, umum ataupun berbasis Islam, formal maupun non formal. Akses pendidikan dibuka lebar dan merata di setiap daerah, kualitas tenaga pendidik diuji kompetensinya, metode dan kurikulum dibongkar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bagi pendidikan Islam, pembaruan terlihat kentara ketika mengurangi porsi pelajaran keagamaan dan menyeimbangkan dengan pelajaran umum.¹ Peran pendidik digeser

1 Ide pembaharuan *kurikulum Pendidikan Islam* di Indonesia menurut Azyumardi Azra perlu melihat dari input-output dunia pendidikan islam. Input dari masyarakat ke dalam sistem pendidikan yang terdiri dari ideologis-normatif, mobilisasi politik, mobilisasi ekonomi, mobilisasi sosial, dan mobilisasi kultural. Kesemuanya ini merupakan sistem pendidikan yang

menjadi fasilitator, anak didik sebagai *user*, waktu pembelajaran menerapkan *full day school*, basis media bersifat ICT (*information communication and technology*).² Semua pembaruan ini semata

pokok atau bisa disebut konvensional. Tawaran gagasan modernisasi Kurikulum pendidikan Islam Azyumardi Azra lebih banyak terfokus di pendidikan Tinggi Islam, khususnya IAIN dan UIN yang dirumuskan dalam empat langkah fundamental, yakni (1) reformulasi tujuan perguruan tinggi, (2) restrukturisasi kurikulum, (3) simplifikasi beban belajar, (4) dekompartementalisasi. Sehingga pendekatan dalam pembaharuan kurikulum, maka kurikulum yang diimplementasikan adalah tidak lagi diarahkan pada subject matter melainkan kepada child oriented dan keadaan sosial yang dikembangkan dalam kerangka integrasi ilmu agama dengan ilmu umum, sains, dan teknologi. Selengkapnya lihat Ach. Sayyi, *Modernisasi Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Perspektif Azyumardi Azra*, Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 20.

2. Perubahan terpenting pada pendidikan Indonesia terletak pada beragam pelatihan tenaga pendidik mulai dari pelatihan mengajar, pengenalan beragam metode pembelajaran yang efektif, kurikulum yang berbasis pada norma sosial dan penanaman rasa nasionalisme. Pendidikan di Indonesia menurut pengamat pendidikan luar negeri, seperti Inggris dan Libia, terkenal dengan sistem manajemen pendidikannya yang *apik*. Dimana integrasi antara peran guru, lingkungan dan sosial berjalan efektif. ketiga aspek ini (kompetensi pendidik, norma sosial dan lingkungan sekolah) terus dilakukan pembaruan, bahkan sampai pada pembuatan regulasi. Penelitian ini dilakukan oleh Christopher Bjork, *Teacher Training School Norms and Teacher Effectiveness in Indonesia*, dalam bukunya Daniel Suryadarma (ed.), *Education in Indonesia*, Singapore: ISEAS: Institute of Southeast, 2013, hlm. 53.

bertujuan untuk mencetak aset bangsa Indonesia yang berkualitas.

Namun akselerasi pembaruan pendidikan tidak mampu menyekat sisi-sisi problem, terutama kualitas anak bangsa yang jauh dari spekulasi. Runtuhnya moralitas mulai dari bawah (anak didik) sampai pada tingkatan tertinggi, menambah buram pendidikan kita. Kasus-kasus pelecehan seksual oleh pelajar dan bahkan beberapa oknum pendidik, tawuran, pemukulan ibu kandung, pembunuhan sampai pada peredaran narkoba merupakan *momok* amoral mengerikan.³ Tentu masalah muncul ini bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor *pertama* adalah masalah relevansi. Banyak pengamat berkesimpulan bahwa konten

3 Ulfah Fajarini melihat bahwa runtuhnya moralitas dalam pendidikan yang terpotret dari sikap dan sifat anak didik, dipengaruhi oleh pemahaman dan penerapan kearifan lokal di daerahnya. Kearifan lokal menjadi kunci terbentuknya moralitas. Jika daerah yang ditempati anak didik menerapkan sikap gotong royong, musyawarah dengan tingkat batasan sikap yang ketat, maka karakter anak bangsa dapat dipipih dengan baik. Namun kearifan lokal tidak dapat berdiri sendiri tanpa sentuhan kebijakan oleh pemerintah. Lihat lebih jelas dalam Ulfah Fajarini, *Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 129.

pendidikan melalui kurikulum tidak lagi relevan dengan kondisi zaman.⁴ Hal ini bukan berarti Indonesia absen memperbarui kurikulum, nyaris setiap lima tahun dilakukan pembaruan. Lebih tepatnya, karena perkembangan yang cepat, menyulitkan mencari formulasi yang tepat. Konten kurikulum seperti pemberian bobot yang berbeda, perencanaan dan tujuan dinilai jauh dari kebutuhan masyarakat dan anak didik.⁵

4 Pemotretan masalah ini dilihat secara global untuk dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah. Secara teknis, masalah pendidikan terbagi dua penyebab yakni internal dan eksternal. Secara internal, masalah seperti lemahnya kompetensi guru, minimnya fasilitas, ketersediaan bahan pustaka. Sedangkan factor eksternal, seperti pengaruh budaya luar, lingkungan keluarga, pengaruh teman, dan lain sebagainya. lihat dalam artikel Supardi U.S. *Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasinya*. Jurnal Formatif, Vol.2, No.2, 2018, hlm.113.

5 Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang kompleks yang memerlukan pertimbangan pengambilan keputusan strategis dan mendasar. Umpamanya, keputusan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus yang harus direncanakan untuk dicapai sekolah perlu ditetapkan dan dicarikan cara-cara strategis untuk mencapainya. Keputusan mengenai mata pelajaran umum dan khusus serta materi pembelajaran atau konten kurikulum yang spesifik apa saja yang perlu dipilih untuk dimasukkan dalam kurikulum, perlu pula ditetapkan dengan cermat. Selain itu, keputusan tentang kegiatan belajar, pengalaman belajar yang menunjang pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus sekolah harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik melalui proses pembelajaran di sekolah.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran tidak boleh hanya fokus pada transfer konten atau materi kepada siswa, namun kurikulum harus dapat memfasilitasi siswa agar dia bisa menggenerasi atau mengkonstruksi konten kurikulum menjadi pengetahuan baru siswa. Maka sekolah di era modern perlu fokus pada optimalisasi pengembangan potensi tiap siswa adaptif terhadap perkembangan pengetahuan dan perubahan zaman. Artinya, untuk menghadapi kehidupan di era informasi, optimalisasi pengembangan potensi siswa harus merupakan agenda penting kurikulum sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri di sekolah. Sebab, melalui potensi yang sudah berkembang, siswa bisa diberdayakan untuk membelajarkan dirinya masing-masing. Ini berarti pendidikan akan berlangsung jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pendidikan yang melalui pengajaran guru saja.

Kurikulum terbaru yang diterapkan di Indonesia adalah Kurikulum 2013 edisi revisi, yang baru diterapkan secara menyeluruh di Indonesia pada tahun ajaran 2019/2020. Pengaruh dan dampak kurikulum kepada peserta didik belum bisa mendapatkan hasil evaluasi secara valid. Kurikulum 2013 mengusung *framework* Pembelajaran abad 21 dirancang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Adaptasi yang dimaksud agar peserta didik mampu memanfaatkan sisi positif dari revolusi industri 4.0 dengan memiliki keterampilan 4C diantaranya *critical-thinking and problem-solving skills, communication and collaboration skills, creativity and innovation Skills*. Memiliki kemampuan Literasi teknologi informasi dan komunikasi.

Pada sisi lain, agar peserta didik tidak tercerabut dari kebudayaannya, pembelajaran Abad-21 juga memberikan arahan untuk penguatan pendidikan karakter melalui pengembangan karakter (*character building*) dan nilai spiritual (*spiritual value*). Jadi dapat dikatakan kurikulum 2013 masih

Kedua, masalah mutu. Beragam cara untuk menilai kemampuan belajar anak didik digalakkan, mulai dari menetapkan standar nilai, jawaban salah-benar, skors berupa sanksi, penghafalan hitungan luar nalar dan kualitas kapasitas pendidik, namun hasil yang terjadi diluar harapan karena evaluasi pembelajaran hanya berupa kemampuan hipotesa dengan deretan angka-angka. Mutu pendidikan dari aspek evaluasi, tenaga pendidik, metode pembelajaran dan output yang dihasilkan, pada gilirannya menjadi *PeEr* bersama.⁶

sangat relevan dengan era Revolusi Industri 4.0. Selengkapnya baca Reno Fernandes, *Relevansi Kurikulum 2013 dengan Kebutuhan Peserta Didik di Era Revolusi 4.0*, *Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 78-79.

- 6 Mutu juga berdampak pada lulusan, mutu pendidikan yang kurang kuat menyebabkan lulusannya juga terpapar pengangguran. Lihat dalam S. Suryana, *Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan*, *Jurnal EDUKASI*, Vol.2 No.1, 2017, hlm. 5.

Hoy, Jardine dan Wood menjelaskan bahwa *quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of the customers of the process, and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating*. Pendapat ini menjelaskan bahwa mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai

dan proses mengembangkan bakat para pelanggan (peserta didik), dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien (stakeholder) yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan. Lihat C. Hoy, C. B. Jardine, & M. Wood, *Improving Quality in Education*, London and New York: Falmer Press, 2005, hlm. 11-12.

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/ indikator. Sallis mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antara lain: 1) *high moral values*; 2) *excellent examination results*; 3) *the support of parents, business and the lokal community*; 4) *plentiful resources*; 5) *the application of the latest technology*; 6) *strong and purposeful leadership*; 7) *the care and concern for pupils and students*; 8) *a well-balanced and challenging curriculum*. Pandangan ini menjelaskan bahwa sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) nilai-nilai moral/ karakter yang tinggi; 2) hasil ujian yang sangat baik; 3) dukungan orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat; 4) sumber daya berlimpah; 5) implementasi teknologi terbaru; 6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi); 7) kepedulian dan perhatian bagi siswa; 8) kurikulum yang seimbang dan relevan. Lihat E. Sallis, *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page Limited, 2005, hlm. 1-2.

Hadis dan Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih,

Ketiga, masalah efisiensi. Secara literal, efisiensi dapat dimaknai dengan tercapainya tujuan dengan *margin* kegagalan yang sedikit. Pemaknaan ini dapat dilekatkan pada semua konteks pendidikan; waktu, tujuan, metode, kompetensi, keterampilan, kemampuan dan sikap yang dihasilkan. Sayangnya masalah efisiensi masih lemah di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran mengalami pemborosan waktu, tujuan tidak dapat dicapai secara mutu, dilengkapi dengan dana yang *kadung* teroperasikan.⁷

berpengetahuan, berpengalaman dan professional. Lihat A. Hadis & B. Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 3.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Lihat Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 218.

- 7 Efisiensi dapat terwujud dari lembaga pendidikan dengan meningkatkan pola manajemen, bisa juga terwujud dari tujuan pendidikan, masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban, manajemen, dan peningkatan kualitas. Lihat dalam M. Sartibi, *Masalah-Masalah Pendidikan Nasional*, Jurnal

Rentetan masalah ini menjadi saling berhubungan, *akut* dan problematik.

Upaya menambal masalah di atas sejatinya perlu dilakukan. Suyanto, mengatakan bahwa sistem pendidikan yang diperbarui harus disesuaikan dengan zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan zaman.⁸ Untuk merespon asumsi Suyitno, pemerintah mengokohkan UU No. 20 tahun 2003. Benar saja, masalah di atas menjadi prioritas utama dalam aturan ini. Strategi perubahan mendasar diterapkan dengan; *pertama*, pemerataan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Contohnya seperti wajib sekolah selama 9 tahun. *Kedua*, relevansi pendidikan. Lembaga pendidikan membuat klasifikasi potensi anak didik didasarkan pada kondisi zaman. *Ketiga*, peningkatan kualitas. Dengan cara melatih kompetensi para pendidik, dan menyiapkan tenaga baru yang visionir. *Keempat*, efisiensi pendidikan.⁹

FIKRAH, Vol.7 No.1, 2017, hlm. 52.

8 Suyanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000, hlm. 11.

9 Sebagaimana ditulis oleh Nana Fatah dalam kelompok kerja pengkajian dan perumusan, *Rangkuman*

Sebagai perbandingan, ulasan Sudarsana tentang konsep Lifelong Learning sangat relevan dengan problem efisiensi ini. Peran sekolah dalam mewujudkan belajar sepanjang hayat dilakukan melalui pengembangan kerjasama antara sekolah dengan lembaga keluarga, lembaga bisnis, lembaga lain dalam masyarakat dan dengan masyarakat sendiri. Di samping itu sekolah juga memiliki peranan sendiri. Dalam kaitannya dengan belajar sepanjang hayat, wajib belajar harus ditujukan pada provisi berbasis pengetahuan, dan pengembangan meta-skill untuk belajar.

Oleh karena itu wajib belajar harus dapat memberikan pengetahuan umum untuk pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan pemerolehan keterampilan belajar yang diperlukan untuk belajar sepanjang hayat. Sementara itu lembaga keluarga dapat berfungsi sebagai sumber dukungan dan stimulus untuk meningkatkan pemahaman makna dan nilai belajar sepanjang hayat. Sebagai contoh: mengembangkan harapan tinggi pada anak, impian masa depan, penghargaan terhadap kerja keras sebagai kunci keberhasilan,

persepsi sebagai lembaga penyelesaian masalah, ketaatan pada aturan rumah tangga, menjalin komunikasi dengan sekolah. Di samping itu, sekolah dapat menumbuhkan kesempatan belajar sepanjang hayat melalui kerjasama dengan keluarga.

Hal lain yang dipandang penting untuk dikembangkan adalah kerjasama dengan dunia bisnis. Kerjasama ini dapat dikembangkan pada tingkat pengambilan kebijakan, manajemen sekolah, pelatihan bagi para guru, pengiriman anak ke lembaga kerja, dan pembelajaran di kelas. Untuk lebih mengoptimalkan perwujudan belajar sepanjang hayat, di samping kerjasama sebagaimana di kemukakan di atas, lembaga sekolah juga perlu membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan berbagai potensi budaya masyarakat yang sangat beragam, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat untuk secara bersama-sama memberi kesempatan belajar bagi semua peserta didik dan anggota masyarakat.

Perwujudan belajar sepanjang hayat di Indonesia telah dijamin dalam undang-undang. Hal tersebut terdapat pada pasal 5 UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural dan kemajemukan bangsa (ayat 1), pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna (ayat 2), pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (pasal 3).

Untuk mewujudkan konsep Lifelong Learning di Indonesia, setidaknya ada empat rekomendasi. (1) Orientasi dan program belajar sebaiknya berdasar dan mencakup dimensi sosiokultural. Program-program pengembangan kehidupan sosial hendaknya terus diupayakan secara berimbang. (2) Perlu digali dan dikembangkan pola belajar asli masyarakat (indigenous). (3) Dalam kaitannya dengan akreditasi pengalaman belajar, sebaiknya segera dibuat aturan perundangannya mengingat hal tersebut telah dimuat dalam UU NO 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik

lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan nasional. (4) Mengingat beragamnya latar sosio-kultural masyarakat Indonesia, dan kecenderungan perkembangan pada masa depan maka akan lebih baik bila dikembangkan pola atau format, program belajar yang sesuai dengan karakteristik warga belajar dan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan hal itu, maka pendidikan informal dan nonformal hadir di masyarakat karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal serta dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan informal dan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.¹⁰

Berbagai problem fundamental yang dihadapi pendidikan di Indonesia saat ini, bermuara pada kerusakan akar yang menjalar

10 Lihat I Ketut Sudarsana, *Pemikiran Tokoh Pendidikan dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia)*, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 44-53.

ke seluruh pohon pendidikan. Mulai persoalan anggaran pendidikan, kurikulum, output hingga strategi pembelajaran menyimpan getah yang terselubung. Itu artinya, setiap tahunnya, pendidikan kita memproduksi banyak generasi pengangguran. Tidak ayal, kalau Suyanto mengatakan pendidikan Indonesia sedang krisis.¹¹

Sebagai gambaran, dilema penganggur terdidik “mundur kena, maju kena” menggambarkan kondisi para lulusan Perguruan Tinggi saat ini. Sekian waktu bergumul di kampus ternyata tak mampu mengangkat harkat penyandang status sarjana. Polemik penganggur terdidik terjadi akibat tidak sejalannya kebutuhan industri terhadap SDM dengan kemampuan individu seorang sarjana. Dunia kerja mengajukan persyaratan bagi lulusan PT yang memiliki kemampuan individu dan kerja tim, kemampuan berbahasa inggris, kemampuan komunikasi, dan pengalaman kerja. Hal ini tidak didapat dari kuliah formal dengan materi terbatas, sebaliknya kebanyakan mahasiswa memperolehnya karena inisiatif sendiri. Padahal, tak sejalan dengan kebutuhan tersebut justru

11 Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia*, hlm. viii.

diterapkan kebijakan kurikulum yang sangat padat dan waktu kelulusan yang dipersingkat.

Implikasinya, kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan soft skill tambahan dari luar universitas menjadi terbatas. Seharusnya, padatnya kegiatan kuliah dapat dibuat menjadi informal dengan alur mengajar dua arah, maksudnya komunikasi berjalan dari dosen ke mahasiswa, pun sebaliknya. Agar kegiatan belajar mengajar yang kaku justru tidak membelenggu potensi mahasiswa dalam hal komunikasi, membangun jaringan dan kreativitas. Sejatinya, jika kemampuan tersebut bisa ikut terbina bukan tidak mungkin mahasiswa berinisiatif membangkitkan jiwa kewirausahaannya.

Maksudnya, ini akan menjadi pencitraan dari visi sebuah organisasi pergerakan mahasiswa dengan kegiatan yang juga mendukung keilmuannya. Misalnya saja organisasi yang memiliki kebiasaan diskusi sosial atau komunitas bahasa inggris. Kegiatan ini selain dapat dilaksanakan setelah kegiatan kuliah pun dapat meningkatkan soft skill. Tentunya tanpa harus menghapuskan sisi idealisme mahasiswa dari benak, sehingga dapat memenuhi dan merawat keduanya, antara idealisme dan

tuntutan hidup. Dalam hal ini, universitas harus memberi kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan lunak, karena tentu universitas dibayar mahal bukan tanpa jaminan kepada lulusannya.

Dengan memilih jalur mandiri itu mahasiswa malah akan lebih mampu membuka peluang lapangan kerja baru dengan memperkerjakan karyawan. Ketersediaan lapangan kerja pun tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa. Dengan biaya pendidikan yang begitu mahal, sangat wajar jika lulusan menginginkan tingkat pengembalian (cost) yang sesuai dari dunia kerja. Lulusan banyak yang menginginkan kerja layak di kantoran, sehingga berkas lamaran justru banyak bertumpuk di sektor ini, dengan begitu banyak saingan. Usaha tersebut setidaknya dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang ada.¹²

12 Dengan banyaknya Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan siap kerja secara besar-besaran yang diikuti meledaknya tenaga kerja produktif, maka persaingan semakin tajam. Padahal daya tampung lapangan kerja sangat terbatas. Akibatnya, banyak pengangguran terdidik sampai pada tingkat titik jenuh, diperparah kondisi ekonomi yang tidak menentu, maka lapangan kerja semakin sempit. Fenomena ini tidak hanya dirasakan tenaga kerja terdidik, lebih parah lagi dirasakan pengangguran tidak terdidik yang tentu dengan kompetensi yang minim. Implikasi logis dari dua

Maka dari itu, problem fundamen pendidikan di Indonesia hakikatnya bersumber dari sifat manusia dan kekayaan lokal. Dalam posisi ini, pendidikan mengalami keropos pada ranah pendidikan lokal. Pendidikan kita kehilangan kompas petunjuk arah yang telah digariskan oleh *pentolan* pendidikan klasik, seperti Tjokrominoto, Paku Alam, Sultan Humengkowono dan lain sebagainya. Dimana mereka, lebih banyak menyiram akar pendidikan daripada batangnya. Akar yang dimaksud disini adalah kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah pengetahuan dasar yang berasal dari kehidupan yang seimbang dengan alam. Ini diaktualisasikan dalam kaitannya dengan budaya dalam komunitas yang dikumpulkan dan diteruskan. Bentuk kebijaksanaan ini bisa bersifat abstrak dan konkret, tetapi fitur yang terpenting adalah bahwa ia muncul dari pengalaman atau kebenaran yang semakin bertambah dari pengalaman kehidupan. Kebijaksanaan dari pengalaman nyata mengasimilasi tubuh, jiwa, dan lingkungan.

dilema pengangguran ini tentunya berkontribusi pada peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia. Lihat Siti Sanisah, *Pendidikan Tinggi dan Pengangguran Terbuka: Sebuah Dilema*, Lentera Pendidikan, Vol. 13, No. 2, 2010, hlm. 155-156.

Itu menyoroti penghormatan terhadap para leluhur dan pengalaman hidup mereka. Selain itu, dalam kearifan lokal, moral dianggap lebih berharga daripada hal-hal materi. Kearifan lokal juga merupakan simbol dan interaksi simbolik yang berasal dari interaksi antara orang-orang dan menjadi sangat penting untuk menandakan respons yang berdekatan dengan unsur-unsur kearifan lokal. Simbol menjadi penting ketika orang belajar dari pengalaman, karena seseorang berusaha lebih dalam untuk memecahkan makna simbol. Melalui simbol, orang akan berpikir dan lebih mengenali pentingnya dengan cara yang bijaksana. Simbol budaya yang berasal dari mitos, kerajinan, dan ritual lokal dapat dipelajari dan disajikan sebagai bentuk kearifan lokal yang mencerminkan sifat dinamis dari budayanya, abadi, kreatif, dan inovatif.¹³

13 Kearifan lokal sering dikaitkan dengan karya-cipta masyarakat pribumi. Menurut *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, *indigenous* merupakan presentasi alami dari suatu tempat atau negara yang tidak berasal dari tempat lain. Jadi itu milik masyarakat adat dan pengetahuan mereka. *Indigenous knowledge* adalah pengetahuan lokal yang unik untuk budaya atau masyarakat tertentu. Ini adalah seperangkat pengetahuan sistematis yang diperoleh oleh masyarakat setempat melalui akumulasi pengalaman, eksperimen informal, dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dalam budaya tertentu.

Disadari bersama, bahwa bangsa Indonesia sangat kaya akan khazanah budaya serta kearifan lokal. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa, serta memiliki nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokalnya. Ada beberapa masyarakat adat yang masih tetap eksis dan telah memelihara kearifan lokalnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, serta menjadi dasar bagi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakatnya. Tarik ulur antara nilai-nilai etnisitas di tingkat lokal dengan nilai-nilai kosmopolitanisme di tingkat global, kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sesuatu yang

Pengetahuan adat berkembang dari pengalaman bertahun-tahun dan pemecahan masalah *trial-and-error* oleh masyarakat setempat. Sumber pengetahuan ini berasal dari pengetahuan dan tradisi setempat yang berasal dari leluhur mereka. Pengetahuan asli ini telah dimodifikasi melalui akumulasi pengalaman praktis dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, kearifan lokal dapat dipahami sebagai ide-ide lokal yang penuh pemikiran, penuh kearifan, nilai-nilai baik, ditanamkan, dan diikuti oleh masyarakat. Selengkapnya, lihat Azkia Muharom Albantani dan Ahmad Madkur, *Think Globally, Act Locally: The Strategy of Incorporating Lokal Wisdom in Foreign Language Teaching in Indonesia*, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 2-3.

bersifat disharmoni dan merusak keutuhan dan kesatuan bangsa.¹⁴

Namun seiring berkembangnya zaman, generasi muda seolah mulai meninggalkan berbagai nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal Indonesia. Moralitas yang merupakan salah satu wujud kearifan lokal merupakan bentuk kesepakatan masyarakat mengenai apa yang layak dan apa yang tidak layak dilakukan, mempunyai sistem hukum sendiri. Hampir semua lapisan masyarakat mempunyai suatu tatanan masing-masing, bahkan komunitas terkecil masyarakat kadang mempunyai moral/etika tersendiri dengan sistemnya sendiri. Tidak jarang hukuman bagi mereka yang melanggar moralitas, lebih kejam daripada hukuman yang dijatuhkan oleh institusi formal. Hukuman terberat dari seorang yang melanggar moralitas adalah beban psikologis yang terus menghantui, pengucilan dan pembatasan dari kehidupan yang 'normal'. Masing-masing masyarakat mempunyai istilah yang beragam dalam membahasakan moral ini, ada yang menyebutnya dengan etika dan dalam Islam dikenal dengan akhlak. Dalam komunitas profesional dikenal dengan

14 Nurhaidah & M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 1-14.

kode etik, sedangkan di tengah masyarakat sering dibahasakan dengan sopan santun, keseluruhannya mempunyai kesamaan yaitu apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh anggotanya.

Di tengah arus globalisasi, lingkungan pendidikan remaja, kini tidak lagi monoton dan terbatas di dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Anak bisa jadi berada di dalam lingkungan sekolah, namun kini dia punya akses untuk berhubungan, melihat langsung dan bisa jadi terlibat dalam kehidupan lain di dunia lain dengan media teknologi dan informasi. Kini lingkungan pendidikan mempunyai definisi yang lebih luas yaitu bukan hanya di mana siswa/anak itu tinggal, namun mencakup juga di mana anak itu menemukan dirinya sebagai seorang yang berarti. Anak dengan mudahnya menemukan tempat, suasana dan lingkungan yang berbeda dan kemudian mengidentifikasi menjadi suatu keadaan yang cocok atau tidak cocok untuk dirinya.¹⁵

15 Dengan berbagai pengaruh lingkungan yang berbeda-beda ini, membuka peluang yang sangat lebar bagi seorang remaja untuk mempunyai kepribadian ganda (split personality) karena terjadinya gangguan pada masa remaja (childhood disorder) yang kalau dibiarkan terus-menerus dapat berakibat pada kejahatan remaja (*juvenile delinquency*). Lihat Sofa

Contoh problematika semakin lunturnya pemahaman generasi muda terhadap luhurnya nilai-nilai kearifan lokal dapat disimak pada hasil penelitian Suranto tentang evaluasi program revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa yang relevan dengan etika komunikasi di sekolah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kondisi faktual di sekolah yang menyebabkan nilai-nilai kearifan budaya Jawa mendesak atau urgen untuk direvitalisasi dalam etika komunikasi adalah kurangnya pemahaman siswa tentang kearifan lokal, etika, dan tata krama. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa di sekolah memiliki berbagai fungsi penting, meliputi: sebagai pedoman berkomunikasi, bersikap, dan berperilaku, sebagai acuan berinteraksi dengan orang lain, sebagai acuan menilai suatu tindakan baik atau buruk, sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif, sebagai dasar bagi pemahaman dan penertiban kehidupan sekolah, sekaligus rambu-rambu berisi anjuran larangan dan sanksi.¹⁶

Muthohar, *Antisipasi Degradasi Moral di Era Global*, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 2, 2013.

16 Suranto, *Evaluasi Program Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Yang Relevan Dengan Etika Komunikasi Di Sekolah*, Widya Komunika, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 42-57.

Upaya internalisasi kearifan lokal dapat dimulai dari ranah kependidikan, yaitu melalui manajemen pendidikan kearifan lokal di sekolah-sekolah.¹⁷ Internalisasi kearifan lokal sering

17 Budaya memiliki seperangkat nilai yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman nilai bagi peserta didik. Proses yang dapat dilaksanakan adalah melalui budaya kearifan lokal. Budaya memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sarana untuk pendidikan karakter. Hanya saja pengembangannya belum berjalan secara optimal. Untuk itu maka dikembangkan model pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal untuk membantu siswa dalam memahami nilai-nilai di masyarakat melalui melihat langsung di lapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan paradigma bahwa salah satu metode dalam pendidikan karakter adalah *service learning* (layanan pembelajaran) yang dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya perilaku yang baik di dalam masyarakat.

Melalui model ini siswa akan dapat membedakan perilaku yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Model pembelajaran ini memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama dan peran guru sangat dibutuhkan sebagai pengawasan agar materi yang diberikan tepat. Namun, sisi positif dari model pembelajaran kontekstual ini akan memberikan kemandirian bagi siswa untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang bersumber pada nilai-nilai hidup di keluarga atau di lingkungan masyarakat. Selain itu model pembelajaran ini menanamkan nilai-nilai karakter secara langsung melalui pembiasaan dengan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, antara lain kegiatan gotong royong ataupun rapat warga yang mampu menumbuhkan karakter toleransi dan kerjasama. Baca Emi Ramadani, *Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 10.

dikolaborasikan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan cara yang di tempuh untuk membentuk perilaku siswa. Proses pendidikan karakter tidak dapat di lakukan secara instan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan karakter sangat tepat apabila dapat memanfaatkan lingkungan siswa sebagai sarana dalam menanamkan nilai-nilai. Penanaman nilai-nilai karakter di sekolah umumnya dikenal dengan istilah pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan nilai. Kedudukan Pendidikan karakter di Indonesia sejajar dengan subyek-subyek mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Perbedaannya dengan mata pelajaran yang lain adalah bentuk pengajarannya. Pendidikan karakter di Indonesia pada umumnya diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan atau Pendidikan Agama. Salah satu model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kontekstual yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.

Sebagai contoh, kearifan lokal dapat dilestarikan melalui ekstrakurikuler. Sekolah dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler

sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal karena dalam pelaksanaannya terjadi transfer nilai-nilai kearifan lokal dari pendidik kepada peserta didik. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bernuansa kearifan lokal, misalnya karawitan, akan diarahkan untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal yang tersimpan dalam alat musik, gending, tembang ataupun tarian yang menjadi bagian dari karawitan tersebut serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu telah diterapkan di SMP Negeri 1 Jiwan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Jumat. Untuk bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut maka siswa harus mendaftarkan diri saat ada proses perekrutan anggota ekstrakurikuler karawitan yang dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran. Cara perekrutan siswa di SMP Negeri 1 Jiwan untuk menjadi anggota ekstrakurikuler karawitan dilakukan berdasarkan kesadaran pribadi siswa bukan karena paksaan dari pihak manapun. Dalam proses perekrutan siswa menjadi anggota ekstrakurikuler karawitan tidak ada unsur paksaan, semua atas dasar kesadaran dan keinginan pribadi siswa sendiri untuk masuk

menjadi anggota ekstrakurikuler karawitan. pada hakikatnya kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa adalah kegiatan ekstrakurikuler yang disukai siswa dan sesuai dengan minat atau potensi siswa.

Berkaitan dengan hal tersebut bila siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai kesadaran maka otomatis siswa akan aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut mengingat banyak kegiatan ekstrakurikuler lain yang dapat diikuti selain ekstrakurikuler karawitan. Para siswa mengakui bahwa mereka terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan karena memang dari awal mereka berniat untuk mengikuti kegiatan tersebut, baik dengan tujuan mengembangkan bakat minat ataupun karena keinginan para siswa untuk ikut melestarikan kesenian tradisional karawitan.

Alasan sekolah menjadikan karawitan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler adalah pertama, sekolah ingin mewartakan bakat, minat dan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa dapat mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam diri siswa terhadap kebudayaan daerah sendiri. Kedua untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah. Ketiga

untuk menanamkan kesadaran siswa agar lebih mengenal dan mencintai kebudayaan daerahnya sendiri. Keempat, untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, berbudi luhur dan menjaga etika kebudayaan daerah.

Ekstrakurikuler karawitan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Jiwan tidak semata-mata untuk mengembangkan bakat, minat atau potensi siswa saja. Namun melalui ekstrakurikuler karawitan, sekolah ingin menanamkan karakter cinta tanah air pada siswa, meningkatkan kesadaran diri siswa pada kebudayaan lokal. Selain itu sekolah juga menjadikan ekstrakurikuler karawitan sebagai salah satu sarana untuk melestarikan kearifan lokal mengingat karawitan adalah salah satu wujud kebudayaan Jawa yang mana penciptaan karawitan tersebut tidak hanya untuk memenuhi unsur keindahan semata namun untuk menyampaikan nilai-nilai luhur kepada masyarakat.

Alasan keikutsertaan para siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan adalah karena ingin mengembangkan bakat, minat dan potensi yang ada dalam diri siswa. Pada dasarnya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan sudah mengetahui bakat yang mereka miliki.

Kebanyakan para siswa menyatakan bahwa sejak di jenjang sekolah dasar para siswa telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan sehingga pada akhirnya bakat yang telah dimiliki tersebut ingin lebih dikembangkan lagi dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sama di jenjang SMP. Selain untuk mengembangkan bakat, minat atau potensi yang dimiliki siswa dalam bidang seni, alasan lain keterlibatan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler karawitan adalah karena para siswa ingin melestarikan kebudayaan lokal.¹⁸

Contoh lain yang dapat ditiru adalah dengan memberdayakan para pendidik

18 Keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan ini juga tidak terlepas dari dukungan orang tua. semua orang tua siswa mendukung keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Hal ini karena pada dasarnya para orang tua siswa sudah mengetahui bakat dan potensi anak-anak mereka. Sehingga orang tua selalu mendukung keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan.

Beberapa siswa juga menyatakan bahwa orang tua memberikan dukungan karena orang tua menginginkan anak-anak mereka ikut serta dalam melestarikan kebudayaan daerah atau kebudayaan tradisional sehingga kelak dapat diwariskan kepada anak cucu atau generasi berikutnya. Lihat Pryo Sularso & Yuli Maria, *Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Ekstrakurikuler Karawitan Di SMP Negeri 1 Jiwon Tahun 2016*, *Citizenship: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 1-12.

agar mereka memiliki kesamaan visi dalam menginternalisasikan kearifan lokal. Adapun pelaksanaannya dapat diterapkan melalui kurikulum yang ada, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Jadi pada intinya, pendidik harus diberikan pelatihan dan pendampingan dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Penyamaan persepsi ini contohnya sebagaimana yang dilakukan di SMP dan SMA PGRI Seririt melalui serangkaian pelatihan yang berorientasi pada pemahaman pendidik tentang bagaimana menyusun rencana pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai *Yadnya* dalam rangka pendidikan karakter bangsa.

Sebelum dilakukan pelatihan dan pendampingan melaksanakan model pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai *yadnya* dalam rangka pendidikan karakter bangsa sesuai kurikulum 2013, Guru-Guru SMP dan SMA PGRI Seririt belum memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengemas rencana pelaksanaan pembelajaran yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter sesuai dengan kurikulum tahun 2013. Sebagian besar guru belum memiliki keterampilan yang memadai dalam

menterjemahkan pendidikan karakter bangsa melalui proses evaluasi pembelajaran yang dilangsungkan. Bahkan, upaya strategis yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan nilai-nilai karakter belum muncul.

Hal ini tampak dari hasil analisis terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru-guru SMP dan SMA PGRI Seririt dan belum dimilikinya kemampuan mengembangkan model-model pembelajaran yang mampu mengimplementasikan proses pelatihan, pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Setelah diberikan pelatihan oleh tim pakar dari Undiksha Singaraja, guru-guru SMA dan SMP PGRI Seririt memiliki kemampuan yang memadai melaksanakan model pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai yadnya dalam rangka pendidikan karakter bangsa sesuai kurikulum 2013.¹⁹

19 Hal ini dapat diketahui dari hasil pelatihan dan pendampingan melaksanakan model pembelajaran berbasis kearifan local sebagai yadnya dalam rangka pendidikan karakter bangsa sesuai kurikulum 2013. Selain itu para guru mengaku tak takut dan was-was lagi bila mereka harus menerapkan kurikulum 2013 dengan internalisasi nilai-nilai karakternya karena telah mampu membuat perangkat pembelajaran dan imlementasinya dalam proses pembelajaran.

Bagaimanapun juga, pelaksanaan pendidikan berbasis kearifan lokal menuntut kesiapan dan solidnya kerjasama yang dilakukan oleh sekolah. Ini dapat dimaklumi mengingat pendidikan berbasis kearifan lokal berorientasi pada pencapaian hakikat tujuan pembelajaran sesungguhnya, dimana peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran sejati tentang siapa, dari mana, dan bagaimana jati dirinya yang sesungguhnya.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh guru, yaitu (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat kurikulum 2013, karena selama ini mereka belum mengetahui secara pasti apa hakekat kurikulum 2013, dan (2) para guru memperoleh gambaran yang jelas bagaimana cara dan strategi pengembangan dan pengemasan perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Guru juga mengakui telah terjadi peningkatan wawasan dan keterampilan mereka dalam memahami kurikulum tahun 2013 dan pengembangan serta pengemasan perangkat pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kurikulum tahun 2013.

Baca I Nengah Suatika, Sukadi, & Ratna Artha Windari, *Memberdayakan Guru-Guru SMP Dan SMA PGRI Seririt Untuk Melaksanakan Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Yadnya Dalam Rangka Pendidikan Karakter Bangsa*, Widya Laksana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 146-159.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Buku ini terdiri dari beberapa bagian penting yang saling terhubung. Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan dan metode kajian. Pada bagian ini membahas masalah, kegelisahan akademik, hipotesis solusi yang ditawarkan dan rancangan kajian pembuka.

Bagian kedua diuraikan tentang konsep dasar ilmu manajemen pendidikan. Kajian ini berbeda dengan pembahasan konsep dasar manajemen pada literasi lainnya. Bisa dibilang, kajian ini merupakan pintu masuk memahami manajemen pendidikan yang komprehensif, satu sisi berposisi sebagai teori dan di sisi lain sebagai khazanah ilmu atau alat. Terdapat tiga sub bab pada kajian ini, yakni menyajikan makna beserta implikasinya terhadap teori dan praktik, memaparkan fungsi atau elemen manajemen sebagai ilmu. Sebagai ilmu, maksudnya menjadi teori yang dapat dipraktekkan pada semua bidang ilmu manajemen. Terakhir, dibahas tentang nilai dan prinsip, bahasan ini penting karena rumusan manajemen pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip dan nilai yang membatasi.

Bagian ketiga membahas mengenai hal yang implementatif yaitu manajemen pendidikan berbasis kebudayaan. Sengaja basis budaya diletakkan pada bab ketiga, dengan tujuan agar pemahaman pada bab selanjutnya menjadi sistematis. Unsur kebudayaan membuka pintu terhadap pola manajemen pendidikan kearifan lokal sebagai bahasan utama dalam buku ini. Sub bab yang dibahas adalah relevansi pendidikan dengan kebudayaan, model pembelajaran berbasis kebudayaan dan implementasi pendidikan berbasis budaya.

Bagian keempat berisi tentang kajian pendidikan karakter berbasis budaya. Sajian ini penting, karena kebudayaan dan kearifan lokal terkait erat dengan aspek karakter. Pendidikan karakter selain merupakan tujuan dirumuskannya pendidikan, juga bagian dari substruktur sistem budaya. Terdapat empat sub bab yang dikaji, yaitu signifikansi akademik tentang pendidikan karakter, model integrasi, model manajemen dan implementasi di lapangan.

Bagian kelima adalah bagian inti dari pembahasan buku ini, yaitu manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal. Sajian ini ingin memberikan formulasi empiris teoritis terhadap problem manajemen pendidikan

saat ini. Sub bab kajian ini terdiri dari tiga hal, yaitu kearifan lokal dalam pendidikan, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan implementasi manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal.

C. Metode Kajian

Kajian ini menjelaskan tentang topik hangat pendidikan modern berbasis pendekatan manajemen dengan mengambil sampel fenomena lapangan. Secara umum, kajian ini berupaya untuk mendeskripsikan masalah-masalah manajemen pendidikan di Indonesia sesuai data yang diperoleh di lapangan atau hasil tafsiran peneliti sendiri. Selain masalah tersebut, kajian ini diarahkan untuk mendalami konsep manajemen pendidikan dengan pendekatan kearifan lokal. Untuk menguatkan kajian, disajikan pula implementasi dan implikasinya. Tentu, data yang didapatkan akan ditafsirkan sendiri sesuai kemampuan peneliti.²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami

20 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 4.

arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.²¹ Maka obyek kajian ini dapat diklasifikasi ke dalam dua tingkatan. *Pertama* adalah sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pelaku atau obyek manajemen dalam pendidikan. *Kedua*, kekayaan lokal yang tersangkut paut dengan potensi daerah seperti karakter, budaya dan kekayaan alam. Untuk memperoleh data tentang sampel implementasi manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal, peneliti menggali data di SMP Pawyatan Daha Kota Kediri. Sekolah ini memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat karena sangat peduli dengan kelestarian budaya dan kearifan lokal Kota Kediri. Mereka dikenal sebagai sekolah yang sangat mendukung pelestarian kearifan lokal Kota Kediri, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang

21 Ibid., hlm. 9.

sedang dijadikan sasaran pengamatan.²² Metode Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara langsung dengan subyek atau sampel.²³

22 Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 76.

23 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 202.

BAB 2

Konsep Dasar Manajemen Pendidikan

A. Semesta Makna dan Implikasi

Istilah manajemen pendidikan sebenarnya bukan kerangka keilmuan baru. Sama seperti cabang ilmu pendidikan lainnya yang muncul pada era modern. Sebelumnya, para pakar dan pengamat lebih akrab mengenalnya dengan ilmu administrasi pendidikan.¹ Namun karena kurang tren dan

1 Istilah manajemen pendidikan bermula dari Indonesia, catatan sejarah tidak ada yang menemukan darimana asal kata ini. Hanya saja, beberapa penelitian termasuk penelitian yang dilakukan oleh Kidwell dan Van der Linde mengatakan bahwa perubahan ini terkait dengan lahirnya ilmu manajemen di perguruan tinggi, sehingga memungkinkan dalam pendidikan dirubah. Sebab, administrasi sebatas hanya masalah perkantoran, kesekretariatan ataupun lembar kurikulum. Lebih jelas lihat dalam Wawan Wahyuddin, *The Effect of Knowledge Management on School Performanc among Teachers in Indonesia*, International Journal of Innovation, Vol. 11, No. 8, 2020, hlm. 356.

terkesan spesifik, akhirnya akibat berlalunya waktu diganti dengan istilah manajemen pendidikan. Bahkan istilah ini dianggap manufaktur dari ilmu pendidikan, hanya saja manajemen pendidikan dikotakkan menjadi empat kajian; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengaswasan.²

Pada dasarnya, manajemen pendidikan merupakan alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Namun kemudian berkembang pada makna yang lebih luas. G.Z. Roring sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto, mengungkapkan pengertian manajemen pendidikan yaitu:

Manajemen pendidikan adalah cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti medatangkan hasil yang baik, tepat dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Bisa juga

2 Pengkotak-kotakan ini berdasar pada unsur manajemen yang terdiri dari perencanaan, organizing, pelaksanaan dan pengendalian. Ada yang berpendapat bahwa, unsur manajemen ditambah dengan persiapan, evaluasi, pendayagunaan. Sementara ketika dibawa pada ranah pendidikan hanya disebut tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan. Pengorganisasi diasumsikan telah *include* pada perencanaan. Lebih jelas lihat dalam Willem Mantja, *Manajemen Pendidikan dalam Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm.91.

diartikan sebagai pelaksanaan pemimpin yang mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif untuk tercapainya tujuan. Namun beberapa ilmuwan barat, mendefinisikannya dengan semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti perumusan *policy*, pengarahan usaha, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan dan seterusnya sampai kepada usaha kecil dan sederhana seperti menjaga lingkungan sekolah dan lain sebagainya.³

Definisi di atas memiliki implikasi yang berbeda satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pada pemaknaan pertama, manajemen pendidikan dititikberatkan sebagai program, strategi atau cara yang disepakati bersama untuk dijadikan kerangka acuan pencapaian tujuan. Dalam hal ini, manajemen menjadi sarana prasyarat tercapainya tujuan. Bisa berupa metode pembelajaran, fasilitas penunjang maupun evaluasi. Berbeda dengan pemaknaan yang kedua, implikasi manajemen berada pada kekuasaan mutlak pimpinan, keputusan setiap pembaruan dalam pendidikan harus melewati

3 M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remadja Karya, 1985. hlm. 7.

pimpinan. Hak otoritas mengatur jalannya lembaga pendidikan, melalui pimpinan. Pada posisi ini, otoritas pimpinan menjadi *preogratif*. Sementara pada pemaknaan ketiga, manajemen diperluas dengan segala hal kegiatan dari yang mikro maupun yang makro. Semua kegiatan dikatakan proses manajemen.

Pengertian sederhana dikemukakan oleh Bush, “*educational management is a field of study and practice concerned with the operation of educational organizations*”,⁴ pendapat ini dikuatkan oleh Djam’an Satori, mengartikan manajemen pendidikan sebagai seluruh proses mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi yang menghubungkan kerjasama antar semua pihak dan materiil untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁵ Dengan

4 Bush & Coleman, *Leadership and Strategic Management in Education*, Houston: Gulf Publishing, 2000, hlm.4

5 Pendapat Satori mengacu pada mutu pendidikan. Menurutnya, dalam bukunya dijelaskan bahwa seluruh rangkaian manajemen pendidikan tidak dapat dilepaskan dari orientasi mutu. Mutu menjadi pijakan utama untuk membuat perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Perencanaan yang tidak dilandasi oleh mutu, bisa saja dirubah di tengah jalan karena bertentangan dengan hukum alam pendidikan. Menurut Satori, mutu terdiri dari input, output dan proses yang kemudian dibuktikan dengan hasil. Lihat dalam Djam’an Satori, *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2004, hlm. 98,

definisi ini, jelas bahwa manajemen pendidikan menyangkut seluruh aspek kegiatan pengelolaan mulai dari tahap perumusan tujuan, pengaturan biaya, sumber daya baik personil maupun materiil, untuk diarahkan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian ini mengandung implikasi berbeda. Karena Bush, melihat manajemen bukan sekadar kesepakatan internal saja. Namun kerjasama dengan pihak luar, seperti masyarakat, negara, individu, perusahaan, pasar dan lain sebagainya juga merupakan manajemen pendidikan. Maka dengan implikasi ini, manajemen bukan hanya ditentukan oleh kemampuan satu lembaga saja. Akan tetapi, seluruh lembaga pendidikan memiliki kesempatan untuk menyatukan tujuan melalui kerjasama sumber daya.

Sumber daya dalam konteks manajemen pendidikan meliputi *man* (pendidik, anak didik dan seluruh stakeholder), *money* (dana pendidikan, uang, biaya), *materials* (sarana prasarana, fasilitas pembelajaran), *methods* (teknik, metode belajar), *machines* (ruang, alat), *market* (pasar, perusahaan, industri, usaha, kantor, lembaga) dan *minuts* (waktu), menurut

Engkoswara sumber daya ini disebut dengan sumber daya 7 M.⁶

Akhirnya, berdasar pada beragam makna manajemen pendidikan, hilir dari pengertian tersebut bermuara pada prinsip dasar yaitu produktivitas. Manajemen pendidikan diartikan sedemikian rupa, pada akhirnya berputar-putar pada perumusan tujuan. Semua kegiatan, aktivitas dan semacamnya dirumuskan untuk mencapai tujuan. Sedangkan di atas tujuan, terdapat produktivitas. Suatu capaian dianggap gagal apabila nilai produktivitasnya kecil. Selain itu, pengertian lain dari produktivitas adalah rasio antara *output* dan *input* di mana hasil lebih besar daripada modal.⁷

6 Engkoswara Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 130.

7 Isu strategis yang menjadi permasalahan pendidikan dewasa ini antara lain pencapaian mutu yang rendah melihat produktivitas lulusan, faktor yang berkaitan dengan *issue value for money* dan faktor akuntabilitas pendidikan. Perilaku Organisasi, yang dalam hal ini terkait erat dengan Manajemen Pendidikan, meliputi kumpulan yang kompleks mengenai ideologi, simbol, dan nilai inti yang berlaku dalam perusahaan dan mempengaruhi cara menjalankan usahanya. Mempertajam budaya organisasi merupakan tugas sentral kepemimpinan strategik yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perilaku organisasi berpengaruh terhadap proses perubahan organisasi.

Strategi umum dalam pengembangan pendidikan untuk mencapai mutu yang berkelanjutan ada

Penelitian yang dilakukan Tangen mencoba mengungkap makna dasar dari produktivitas. Dia mengungkapkan bahwa:

“Although the concept of productivity is a widely discussed subject by politicians, economists, managers and media, it is often vaguely defined and poorly understood. In practise, this

empat: (1) kegiatan pendidikan –sebagai investasi jangka panjang-; (2) menerapkan pendidikan kejuruan dan transformasi teknologi dari negara maju, diikuti penciptaan sumber daya insani berketerampilan tinggi dan menguasai teknologi dilanjutkan dengan pendidikan yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan teknologi bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat; (3) penopang bagi sumber daya manusia melalui sistem pendidikan tinggi yang unggul; (4) Upaya tersebut perlu dilakukan secara sinergis dengan hak otonomi, tanggung jawab, dan peran yang lebih luas kepada lembaga swasta, sosial dan kemasyarakatan. Implementasi Perubahan merupakan sebuah proses yang berpangkal dari perubahan cara berfikir (mindset).

Paradigma personalia yang berada di dalam organisasi membentuk pikiran organisasi yang kemudian menghasilkan nilai-nilai sekolah, lalu kondisi tersebut menghasilkan tindakan yang baik. Komponen peningkatan produktivitas dalam konteks output pendidikan yaitu (1) sikap kerja; (2) tingkat keterampilan; (3) hubungan antara lingkungan; (4) manajemen produktivitas; (5) efisiensi tenaga kerja; dan (6) kewiraswastaan. Lihat Muhammad Anggung, *Peranan Perilaku Organisasi dan Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Produktivitas Output Pendidikan*, Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 99.

lack of knowledge results in productivity being ignored by those who influence production processes.”⁸

-
- 8 Stefan Tangen, *Understanding the Concept of Productivity*, Proceedings of the 7th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS2002), Taipei, 2002. Sebelumnya, Tangen juga memiliki konsep *Triple P* yang mencakup *Performance*, *Profitability*, dan *Productivity*. Penjelasan dari ketiga istilah tersebut dapat disimak dalam uraian berikut:

Performance is a term which includes almost any objective of competition and manufacturing excellence such as cost, flexibility, speed, dependability and quality. Some researchers and managers see performance objectives, especially quality, as a part of the concept of productivity, while they instead should see them as factors affecting productivity. It is believed in this research that the confusion surrounding productivity will be even more complicated with a too broad view of productivity. If productivity measures should include all types of performance objectives, they are in grave danger of becoming so complex that their usefulness as meaningful measures of improvement become questionable.

Profitability is the overriding goal for the success and growth of any business, and is generally defined as a ratio between revenue and cost (i.e. profit/assets). However, profitability as a performance measure mainly addresses shareholders as the interest group and many researchers therefore claim that using monetary ratios as productivity measures will result in several shortcomings, for instance, induce short-termism and discourage the customer perspective. Profitability can change for reasons that have little to do with productivity, such as inflation and other external conditions that may bear no relationship to the efficient use of resources. Miller argue that productivity is a more suitable measure to monitor

manufacturing excellence in the long run rather than profitability, since profits are influenced by many factors in a short-term perspective.

Productivity is in industrial engineering defined as the relation of output (i.e. produced goods) to input (i.e. consumed resources) in the manufacturing transformation process. Productivity is therefore, on the one hand, closely connected to the use and availability of resources. This means in short that productivity is reduced if a company's resources are not properly used or if there is a lack of them. On the other hand, productivity is strongly linked to the creation of value. Thus, high productivity is achieved when activities and resources in the manufacturing transformation process add value to the produced products. Furthermore, the opposite of productivity is represented by waste, which must be eliminated in order to improve productivity.

Dari pernyataan itu, dapat dipahami bahwa *performance* adalah istilah umum keunggulan manufaktur dan mencakup keuntungan serta faktor non-biaya seperti kualitas, kecepatan, pengiriman, dan fleksibilitas.

Profitabilitas juga dilihat sebagai hubungan antara output dan input, tetapi mencakup pengaruh dari faktor-faktor harga (misalnya pemulihan harga).

Terkait dengan hal itu, efektivitas adalah istilah yang digunakan ketika output dari proses transformasi manufaktur difokuskan, sementara efisiensi menunjukkan seberapa baik input proses transformasi (misalnya sumber daya) digunakan.

Dan produktivitas adalah bagian utama dari model Triple P dan memiliki definisi produktivitas operasional yang agak langsung sebagai rasio jumlah output (yaitu jumlah produk yang diproduksi dengan benar yang memenuhi spesifikasinya) dibagi dengan jumlah input (yaitu semua jenis sumber daya yang dikonsumsi dalam proses transformasi). Lihat Stefan Tangen, *A Theoretical Foundation for*

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pada intinya memang definisi produktivitas kebanyakan diabaikan. Namun demikian, hampir seluruh penggunanya sepakat bahwa produktivitas menjadi kunci keberhasilan sekaligus indikator ketercapaian tujuan.

Nilai produktifitas, menurut Engkoswara, meliputi tiga hal; *efektifitas*, yaitu kesamaan antara hasil merata dan kerugian yang dikeluarkan dengan capaian mutu tinggi.⁹ Efektivitas menjadikan orientasi hasil sebagai realisasi prinsip demokrasi dalam pendidikan, memiliki keluaran yang bermutu, relevan (*link and macth*) dengan kebutuhan masyarakat.

Productivity Measurement and Improvement of Automatic Assembly Systems. Licentiate Thesis, Stockholm: Royal Institute of Technology, 2002, hlm. 19-30.

- 9 Salah satu contoh efektif; dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, di awal tahun telah menetapkan bahwa target kelulusan yang diharapkan pada ujian akhir nasional (UNAS) sebesar 100%, kemudian setelah pelaksanaan UNAS anak didik kelas akhir yang lulus mencapai 95%. Maka madrasah tersebut dalam melaksanakan program pendidikannya dapat dikatakan efektif sebab terjadi kesesuaian antara target/tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, meskipun terdapat *error* 5%, namun dalam konteks efektifitas tidak sampai mengurangi nilai. Lihat dalam Rijal Umami, *Pengaruh Kompetensi Pedagogic dan Motivasi Kerja Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Ujian Nasional di SMA Negeri se Kota Mojokerto*, Jurnal Inspirasi Pendidikan, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 16.

Terakhir efektivitas memiliki nilai ekonomi yang stabil. *Process*, mengandung tiga prinsip utama; menggairahkan dan memberi stimulan berupa motivasi, semangat dan disiplin kerja yang tinggi kepada lembaga pendidikan dan memiliki kepercayaan yang baik. *Efisiensi*, yaitu merujuk pada motivasi belajar untuk menggunakan fasilitas, tenaga, biaya dan waktu seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal.¹⁰

Oleh karena itu, pengertian manajemen pendidikan yang paling relevan dengan perkembangan zaman adalah segala bentuk

10 Contoh dalam suatu lembaga pendidikan yaitu efisiensi dari aspek hasil; Madrasah Nurul Fata di Jawa Timur dalam melaksanakan program pendidikan dan pengajarannya selama dua semester dengan mengeluarkan biaya 100.000.000 dengan target 25 guru dapat meluluskan siswanya sebanyak 95%. Di madrasah yang lain, dengan jumlah dana yang sama (100.000.000) dan jumlah guru yang sama pula, dapat meluluskan siswanya sebanyak 100%. Maka keberadaan madrasah lain tersebut, dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan dengan madrasah Nurul Fata.

Kemudian contoh efisiensi dari segi usaha; madrasah Nurul Huda membutuhkan biaya 100 juta dan 25 tenaga pendidik untuk meluluskan 100% siswanya. Sedangkan madrasah Sabilillah dengan jumlah anak didik yang sama membutuhkan biaya 110 juta dengan 30 tenaga pendidik untuk meluluskan 100% siswanya. Maka dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan Nurul Huda dikatakan lebih efisien dibandingkan madrasah Sabilillah. Lihat lebih jelas dalam bukunya Engkoswara Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, hlm. 132.

segala bentuk tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi baik berupa aspek personil maupun materiil, sumber daya ataupun sektor alamiah dengan berorientasi pada tujuan untuk mencapai nilai produktivitas. Pengertian ini berimplikasi pada semua aspek, namun sisi pemberdayaan semua sektor tetap terkooptasi. Manajemen pendidikan harus dikaji dengan matang memperhatikan aspek internal dan eksternal.¹¹

11 Pengamatan dan penilaian yang dilakukan secara simultan terhadap lingkungan eksternal dan internal lembaga pendidikan memungkinkan para pengelola pendidikan mampu mengidentifikasi berbagai jenis peluang untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana pendidikan. Rancangan yang bersifat menyeluruh dapat dilakukan melalui proses tindakan yang dikenal sebagai manajemen strategik dan mutu pendidikan Islam. anajemen strategik adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal vital dan berkesinambungan bagi suatu organisasi.

Konsep manajemen strategik dalam pendidikan Islam memang merupakan hal yang barusehingga harapan besar pada tulisan ini dapat digunakan di dunia pendidikan Islam yang lebih luasserta lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT.

Tidak menutup kemungkinan bahwa berkembangnya pendidikan saat ini khususnya di Indonesia akan dibawa lagi pada konsep-konsep pendidikan Rasulullah saw, tetapi hanya berbeda kemasan, bungkus atau cara penyampaiannya karena di

B. Manajemen Pendidikan sebagai Ilmu

Para tokoh manajemen, berbeda pandangan mengenai kerangka, unsur atau bagian-bagian dalam manajemen. Latar perbedaan tersebut disebabkan oleh aktivitas lapangan dan pengamatan yang dipengaruhi oleh waktu, kondisi lingkungan kelembagaan, filsafat dan prinsip hidup serta perkembangan ilmu pengetahuan seperti kemajuan informasi, teknologi dan media.

Henry Mayol, menyebut bagian-bagian manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah,

sesuaikan dengan perkembangan IT, budaya masyarakat serta pudarnya generasi bangsa yang acuh terhadap budaya dan karya-karya anak bangsa. Inti (*core*) dari mutu pendidikan Islam adalah pendidikan jasmani, pendidikan ruhani dan pendidikan aqliyah, sehingga memunculkan generasi yang "*Taqorrub Ilallah*" untuk melahirkan insan kamil (manusia yang sempurna), melalui penanaman akhlakul karimah.

Jadi mutu lulusan pendidikan Islam tidak dipandang sebelah mata, justru sangat besar peranannya di lingkungan masyarakat. Maka hal ini diharapkan ketika berangkat dari bawah (*botton up*) bukan dari atas ke bawah (*top down*), mampu merambah ke kancah nasional dan berkontribusi pada bangsa. Lihat Ahmad Khoiri, *Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam*, Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 96-97.

pengkoordinasian dan pengendalian.¹² Hal serupa didukung oleh James Stoner dengan merampingkan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Namun secara umum, bagian manajemen dijelaskan di bawah ini:

1. Perencanaan (*planning*)

Burhanuddin mengistilahkan perencanaan sebagai langkah pertama pada setiap kegiatan apapun bentuknya, termasuk manajemen pendidikan. Perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran sistematis dan terkonsep

12 Pendapat Henry Fayol ini menjawab dari kekuarangan konsep manajemen pada tokoh sebelumnya seperti Urwick dan Liang Lee. Menurut Fayol, Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena bagian lainnya tidak akan terlaksana tanpa adanya perencanaan. Pengorganisasian, dapat diartikan penentuan aspek-aspek yang harus dikerjakan terdiri dari pengelompokan tugas-tugas dan bagian-bagian pekerjaan kepada setiap elemen yang ikut andil melaksanakan tujuan. Kemudian, pengarahan, adalah fungsi yang dapat diterapkan setelah rencana, organisasi dan sumber daya. jika fungsi ini telah diterapkan, maka proses manajemen dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah pengkondisian, yaitu setiap bawahan melaksanakan bagian kerja masing-masing dengan melalui proses koordinasi yang intens. Koordinasi sangat penting untuk mencapai tujuan. Lihat Henry Fayol, *Manajemen Public Relations*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 72.

mengenai *what to the change, what to the road and what to the doing* baik berupa langkah-langkah, metode pelaksanaan untuk menapai tujuan yang diharapkan dengan rasionalitas dan logis serta berorientasi visioner ke depan.¹³

Tidak seperti Burhanudin, Manulang mengartikan perencanaan lebih bersifat teknis. Menurutnya, perencanaan diartikan sebagai tujuan, *policy, budget*, prosedur dan program dari suatu lembaga, organisasi/komunitas. Dengan pengertian ini, maka pada aspek perencanaan, organisasi/lembaga menetapkan tujuan, peraturan-peraturan beserta pedoman pelaksanaan yang diikuti penetapan biaya untuk mencapai tujuan.¹⁴ Manualang memberikan *skup* bahwa perencanaan harus menghasilkan keluaran seperti pedoman, tujuan, aturan, SOP,

13 Burhanuddin, *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. hlm. 167.

14 Menurut Manulang, manajemen apapun tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh keberadaan biaya. Maka dari itu, aspek yang pertama harus ada dalam melaksanakan manajemen adalah ketersediaan biaya dulu, baru kemudian membuat rangkaian manajemen. Termasuk juga dalam pendidikan, untuk membangun lembaga pendidikan atau sekolah, harus ada biaya dulu. Maka dari itu, Manulang memasukan unsur pembiayaan dalam unsur manajemen. Lihat dalam Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012. hlm. 9-10

renstra selama beberapa tahun ke depan dan lain sebagainya.

Serupa dari pemaknaan O'donnel dan Koont's (1972), batasan perencanaan yaitu:

*Planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it, planning bridges the gap from where we are wont to go. It makes is possible for things to occur which would not otherwise happen.*¹⁵

Batasan perencanaan pada definisi ini menitik beratkan pada sebuah proses, dimulai dari dialektika berpikir tentang apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana cara melakukannya, kapan waktu yang tepat untuk dilakuka, siapa saja yang terlibat untuk meningkatkan mutu sehingga kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara tidak langsung, perencanaan merupakan rancangan sistematis untuk dikerjakan selama jangka waktu panjang ke depan.¹⁶

15 Harold Cyril O'Donnel Koontz, *Management*. Edition VV, Tokyo: Mc Graw-Hill, 1980, hlm. 129.

16 Pendapat ini kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Sutisna (1983), Ia membagi perencanaan menjadi tiga hal; 1) penetapan tujuan-tujuan dan maksud sesuai dengan keinginan organisasi; 2) perkiraan lingkungan (sumber-sumber dan hambatan) untuk

Setelah memaknai perencanaan dengan sebuah rancangan, menurut Koonts (1980), juga berarti suatu pengambilan keputusan baik dilakukan oleh pimpinan maupun stakeholder lainnya. Proses pengambilan keputusan merupakan perencanaan yang paling utama. *planning is decision making: it involves selecting the courses of action that a company or other enterprise and every department of it, will follow.*¹⁷

Di Indonesia, menganut model perencanaan yang ala Koonts. Seperti yang diungkapkan Hadari Nawawi (1989), perencanaan setidaknya memuat beberapa aspek dalam suatu organisasi atau lembaga. 1) apa yang akan dilakukan, 2) siapa yang harus melakukan, 3) kapan dilakukan, 4) dimana dilakukan, 5) bagaimana melakukannya, dan 6) apa saja yang diperlukan agar tercapai tujuan secara maksimal. Aspek-aspek ini bukan hanya berupa rencana tanpa resiko, namun masalah-masalah yang akan

mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan maksud yang ingin dicapai; 3) penentuan pendekatan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut. Lihat dalam Oteng Sutisna, *Adminstrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa, 1987. hlm. 162.

17 Harold Cyril O'Donnel Koontz, *Management*, hlm. 18.

atau sedang muncul, juga masuk kategori perencanaan. Prinsip dalam melaksanakan perencanaan setidaknya harus; rasional, estimat, preparasi, efisiensi, efektif dan operasional.¹⁸

Sederhananya, perencanaan memiliki prinsip; rasional (logis, ilmiah, dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan), efisiensi dan efektif. Dengan mengacu pada prinsip inilah menetaslah langkah dalam membuat perencanaan; 1) memandang proses sebagai rangkai pertanyaan yang harus dijawab, meliputi; *what* mengenai tujuan dan kegiatan yang akan dicapai, 2) *why* mengenaik keperluan

18 Lihat Hadari Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006, hlm. 16.

Seperti diungkap oleh Burhanuddin (1994), perencanaan setidaknya harus; 1) disusun berdasarkan data yang ada dan diselaraskan dengan fenomena yang mungkin timbul sebagai akibat tindakan pelaksanaan yang diambil; 2) harus dibuat oleh orang-orang yang ahli dalam hal perencanaan; 3) dibuat dengan rinci dan detail; 4) rencana harus sederhana; 5) perencanaan harus mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi; 6) perencanaan harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan; 7) hendaknya memikirkan peningkatan dan perbaikan untuk kesempurnaan masa mendatang; 8) harus terdapat pengambilan resiko setiap kemudinan yang muncul. Lihat dalam Burhanuddin dan A. Russel, *Human Resource Management: an Experimental Approach*. Singapore: McGraw Hill, 1993, hlm.171.

dan alasan suatu kegiatan dilakukan, 3) *how*, mencakup sistem dan tatakerja, 4) *when*, mencakup masalah waktu dan penetapan prioritas, 5) *where*, mengenai tempat berlangsungnya kegiatan dan 6) *who*, mengenai tenaga kerja.

Dari pengertian tersebut, juga dapat diambil ruang lingkup perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang (*long term planning*), perencanaan jangka menengah (*Medium Term Planning*), perencanaan jangka pendek (*short term planning*), perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral, perencanaan kawasan dan perencanaan proyek.¹⁹

Maka mengambil sari dari pembahasan di atas, perencanaan dalam manajemen

19 Dalam perencanaan jangka panjang biasanya berjangka waktu 10 tahun ke atas dan belum ditampilkan sasaran kuantitatifnya. Berbeda dengan perencanaan jangka menengah, biasanya berjangka waktu 3-18 tahun, di Indonesia biasanya 5 tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang dan sudah ditampilkan dalam bentuk proyeksi kuantitatif. Sedangkan perencanaan jangka pendek, waktunya kurang maksimal satu tahun atau perencanaan tahunan. Rentao Miao dan Heung-Gill Kim, *Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and Employee Performance: an Chinese Empirical Study*, Journal Service Science and Management, Vol. 3, No. 2-10, hlm. 357.

adalah cara kerja atau aktivitas pengambilan keputusan tentang tujuan (obyektifitas) apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut berdasar tujuan. Perencanaan yang baik dan tepat akan menghasilkan hasil yang maksimal pula.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan kelanjutan dari perencanaan. Bisa dikatakan, pengorganisasi merupakan inti dari diadakannya manajemen. Sukses-gagalnya suatu organisasi atau lembaga, baik skala mikro maupun makro, tergantung pada bagaimana pola pengorganisasian yang dijalankan.²⁰ Oleh karena itu, pada tahap

²⁰ Pengorganisasian adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif antara pekerjaan yang dipilih, orang dan tempat kerja agar kelompok dapat bekerja bersama secara efisien. Atau proses membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan departemen. Pengorganisasian, dalam sudut pandang perusahaan, adalah fungsi manajemen yang biasanya mengikuti setelah perencanaan. Dan itu melibatkan penugasan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan penugasan wewenang dengan tanggung jawab dan alokasi sumber daya yang memadai di seluruh organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur peran yang disengaja melalui penentuan

ini menjadi penentu sekaligus berpengaruh terhadap eksistensi berjalan atau *mandegnya* suatu proses manajemen, termasuk di dalamnya juga lembaga pendidikan.

Salah satu pengamat pendidikan terkenal di Indonesia, Ranupadojo (1996) mengatakan bahwa pengorganisasian adalah upaya baik pikiran maupun kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga dengan cara membagi tugas, tanggungjawab dan wewenang yang diatur oleh pemimpin yang saling terinteraksi.²¹ Maka secara tidak langsung, pengorganisasian membentuk beberapa orang untuk melakukan kerjasama secara aktif dalam wadah organisasi atau lembaga.²²

dan penghitungan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan setiap bagiannya, pengelompokan kegiatan ini, penugasan kelompok kegiatan tersebut kepada manajer, delegasi dari wewenang untuk melaksanakannya, dan ketentuan untuk koordinasi otoritas dan hubungan informal, secara horizontal dan vertikal, dalam organisasi. Lihat Charles Handy, *Understanding Organizations (4th ed.)*, London: Penguin Books, 2005.

- 21 Heidjarachman Ranupandojo & Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000, hlm. 35.
- 22 Djudju Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*, Bandung: Falah Production, 2004, hlm. 106.

Pengertian ini menyiratkan pemahaman bahwa dalam sektor perngorganisasian kerjasama dan bagi tugas yang termaktub pada istilah Tupoksi menjadi yang terpenting. Setiap elemen diberikan tugas masing-masing sebagai bagian dari *clusster* tugas untuk bersama-sama mencapai tujuan. Semisal, dibentuk pada bidang-bidang khusus, ditentukan kordinator atau ketua bidang dengan beberapa anggotanya. Tugas tersebut dibuat secara musyawarah dengan sistem yang berbeda-beda.²³ Namun meski

23 Contoh spesifik dari pembagian tupoksi ini misalnya adalah dengan mengkonkretkan tugas dari guru. Pelaksanaan tugas ini akan menjadi lebih baik jika terdapat indikator penilaian kinerja yang jelas agar di kemudian hari dapat dievaluasi dan diberikan tindak lanjut yang tepat. Setyadi dan Kartowagiran melakukan R&D mengenai instrumen penilaian kinerja guru ini.

Instrumen penilaian kinerja guru sekolah dasar, dalam penelitian ini dikembangkan dengan metode *research and development*, berdasarkan model pengembangan pembelajaran Borg and Gall yang disesuaikan. Komponen tugas guru sekolah dasar yang mencakup mendidik, mengajar, melatih dan mengarahkan, membimbing, serta menilai dan mengevaluasi signifikan dan relevan untuk mengukur kinerja guru. Data yang dihasilkan dari pengukuran kinerja guru dari penilaian diri, sejawat dan atasan tersebut tidak memiliki perbedaan yang berarti. Tiap indikator dalam tiap komponen tugas guru tersebut relevan dan signifikan, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator tugas guru sekolah dasar dalam mengajar terdiri dari 1) membuat rencana program

dibagikan pada sektor-sektor tertentu, yang memegang kendali pengorganisasian adalah pemimpin. Karena pada hakikatnya, anggota dan stakeholder lain bersifat membantu.

Sujana (2004), memberikan ilustrasi bahwa pengorganisasian bertujuan untuk bekerjasama

mengajar, 2) melaksanakan program mengajar, 3) melaksanakan tindak lanjut program mengajar.

Indikator tugas guru sekolah dasar dalam mendidik terdiri dari: (1) mengembangkan potensi peserta didik, (2) mengembangkan kepribadian peserta didik, (3) Melaksanakan penyesuaian penyelenggaraan mendidik.

Indikator tugas guru sekolah dasar dalam melatih dan mengarahkan terdiri dari (1) Memberikan motivasi belajar, (2) memberikan panduan dalam belajar, (3) Membiasakan berperilaku positif.

Indikator tugas guru sekolah dasar dalam membimbing terdiri dari: (1) membuat rencana program bimbingan, (2) melaksanakan program bimbingan, dan (3) melaksanakan tindak lanjut program bimbingan.

Indikator tugas guru sekolah dasar dalam menilai dan mengevaluasi terdiri dari (1) menyusun rencana evaluasi, serta (2) melaksanakan dan memanfaatkan hasil evaluasi. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja guru sekolah dasar berupa instrumen yang disusun berdasarkan komponen tugas pokok dan fungsi guru sekolah dasar. Instrumen yang sesuai adalah instrument yang memiliki kualifikasi validitas isi atau content validity, validitas, dan reliabilitas konstruk yang sesuai dengan kriterianya. Lihat Hesti Sadtyadi & Badrun Kartowagiran, *Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Guru Sekolah Dasar Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi*, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2014, hlm. 302-303.

antar semua personil dari pemimpin sampai pada jabatan paling bawah yang terkumpul pada suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan.²⁴ Dengan ini, maka pengorganisasian memiliki syarat khusus yang harus ada, yakni pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab menurut bidangnya masing-masing. Atau dengan kata lain, membuat struktur yang satu sama lain memiliki hubungan saling mempengaruhi (*simbiosys mutualism*).

Sebagai penjeles, maka Nanang Fattah (2004), mengklasifikasi pengorganisasian sebagai suatu proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil kepada para anggota organisasi sesuai keahlian masing-masing dengan menyertakan sumberdaya.²⁵ Jika dihubungkan

24 Djudju Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, hlm.106.

25 Pembagian kerja tidak selamanya bersifat tetap, kadangkala dipengaruhi oleh berkembangnya kompetensi, kemampuan dan keterampilan. Dalam pembagian kerja, stakeholder dituntut untuk memamerkan kemampuan dirinya kepada atas sebagai nilai dan pertimbangan. Dalam pendidikan, pembagian kerja terbentuk dari lulusan profesi yang sesuai dengan bidang masing-masing.

Walaupun terkadang adapula yang tidak sesuai, namun demikian dilalui melalui aneka ragam pelatihan. Yang berwenang menentukan bidang per bidang dalam manajemen pendidikan adalah pimpinan dibantu oleh tim fourmatur lainnya berdasarkan pada kualifikasi dan profesi keilmuan

dengan manajemen pendidikan, maka yang disebut pengorganisasian adalah pembagian *job description* kepada beberapa kelompok stakeholder yang ditunjuk oleh pemimpin dengan diberikan tanggungjawab dan wewenang agar pendidikan dapat berjalan efektif, efisien dan produktif sesuai tujuan pendidikan nasional.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari tahap sebelumnya (perencanaan dan pengorganisasian). Upaya untuk mengarahkan tenaga kerja (*man power*) dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya untuk melaksanakan segala proses kegiatan. Juga bisa diartikan sebagai proses pemberian motivasi, daya dan power kepada stakeholder secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Proses melaksanakan segala hal yang direncanakan dan telah diorganisasikan dengan baik, memiliki peran penting dalam menentukan sukses-gagalnya tujuan.

yang dimiliki. Lihat Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. hlm. 71.

Cakupan tahap pelaksanaan ini, bukan lagi merencanakan, menentukan biaya atau membuat struktur, melainkan menjalankan sesuai aturan dan regulasi yang telah dibuat. Maka lingkup tahapan ini meliputi gaya kepemimpinan, komunikasi dan motivasi dalam rangka untuk mempengaruhi stakeholder terlibat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan.²⁶ Dalam hal ini, kepemimpinan berperan memberikan arahan, motivasi, instruksi, solusi dan putusan para organisasi. Motivasi berperan sebagai stimulan untuk menggerakkan stakeholder ketika sedang *loyo*. Sedangkan komunikasi, menjadi alat untuk menjalin hubungan aktif dalam setiap organ.²⁷

Maka dari itu, pelaksanaan terkait erat dengan pemanfaatan sumber daya. pemimpin

26 Qurroti A'yun, *Manajemen Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Islam Kontemporer*. Jurnal Vicratina, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm.133

27 Kepemimpinan dalam proses manajemen berfungsi otoriter, karena suatu perencanaan terkadang tidak dapat terlaksana akibat kelengahan sumber daya yang melaksanakan. Maka peran kepemimpinan disini sangat penting sebagai *human resource manager*. Menurut R.M. Ungsong dan Mowday, individu yang menduduki pemimpin dapat menciptakan pola interaksi baik komunikasi maupun instruksi. Lihat Sugeng Utomo, *Manajemen dan Kemepimpinan Kepala Sekolah yang Efektif*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 8 No. 4, 2010, hlm. 1054.

dituntut untuk memiliki kemampuan mengarahkan, membuat keputusan dan pandai berkomunikasi dengan kalangan internal maupun eksternal. Kunci utama dalam tahap ini memang berada pada sisi kepemimpinan, karena timbulnya konflik dapat diredam oleh pemimpin. Pemimpin harus bisa menciptakan iklim dan budaya organisasi yang kondusif untuk mengunci konflik.

4. Pengendalian (*controlling*)

Secara umum, istilah pengendalian sinonim dari pengawasan. Hanya saja, dalam ilmu manajemen, pengendalian lebih tepat karena memiliki fungsi mengamati, mengukur dan mengawasi jalannya strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi pengendalian adalah memastikan kalau rencana dan sumber daya yang melaksanakan berjalan sesuai harapan dibuktikan dengan output dengan tetap mengacu pada prinsip manajemen.

Hal demikian, diungkap oleh Koontz (1980), pengendalian memiliki fungsi untuk mengukur keberhasilan dan mengoreksi pencapaian tujuan.

“controlling is the measuring and correcting objectives of subordinates to assure that events conform to plans”.²⁸ Maka peran pengendalian

28 Harold Cyril O’Donnel Koontz, *Management.*, hlm. 65.

Faktor kunci untuk mencapai kesuksesan organisasi adalah pengendalian manajemen (*Management Control*). Seperti diungkapkan oleh Deming bahwa “masalah mutu terletak pada masalah manajemennya”. Selanjutnya, Sufyarma juga mengemukakan bahwa, “manajemen berperan untuk memberdayakan berbagai komponen sistem pendidikan”.

Dalam suatu organisasi para manajer dan karyawan harus dirangsang dan diarahkan untuk melaksanakan apa yang diinginkan manajemen puncak dan mengoreksinya apabila menyimpang dari tujuan manajemen. Tanpa pengendalian yang memadai, entitas tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuannya. Disadari atau tidak, manusia dalam berbagai aspek kehidupannya selalu berhadapan dengan masalah pengendalian yaitu pengerahan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Selanjutnya, mereka melaksanakan tindakan koreksi apabila keadaan mereka menjauh dari tujuan yang ditetapkan.

Dalam organisasi yang sangat kecil, pengendalian belum menjadi masalah yang rumit karena pimpinan puncak merangkap sebagai pelaksana kegiatan. Dengan demikian, ia dapat melakukan pengendalian secara langsung terhadap semua kegiatan organisasi. Pengendalian akan menjadi masalah yang serius apabila organisasi berkembang menjadi semakin besar sehingga pimpinan puncak tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan organisasi hanya dengan beberapa orang saja. Sebagian wewenang mau tidak mau harus dilimpahkan kepada orang lain (bawahannya). Dengan demikian, pimpinan puncak harus mempunyai alat pengendalian agar para

bawahan dapat bekerja sesuai dengan kebijakannya.

Pengendalian melalui orang-orang yang menerima pelimpahan wewenang ini disebut dengan pengendalian manajemen. Pada organisasi yang sudah besar, pengendalian manajemen ini dibakukan dalam suatu sistem yang disebut sistem pengendalian manajemen. Selain perkembangan internal organisasi, perkembangan lingkungan (eksternal) organisasi juga sangat mendorong arti penting masalah pengendalian.

Persaingan yang semakin tajam, ketidakpastian yang semakin tinggi, sumber daya yang semakin terbatas, serta kondisi ekonomi yang semakin sulit mengharuskan pimpinan organisasi khususnya organisasi perusahaan untuk dapat mengendalikan perusahaannya agar dapat tetap survive kalau mungkin mampu berkembang pada kondisi yang penuh tantangan tersebut.

Sistem Pengendalian haruslah didesain untuk memudahkan perencanaan bagi pelaksanaan strategi dan untuk memotivasi para manajer guna mencapai tujuan organisasi dan guna untuk mengembangkan informasi guna mengevaluasi kinerja dalam mencapai tujuan. Peran fundamental dari pengendalian manajemen adalah membantu pimpinan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. Penerapan akuntansi manajemen amat ditentukan oleh konsep relevan. Proses akuntansi manajemen akan menghasilkan sistem pengendalian manajemen.

Fungsi pengendalian ini meliputi pengukuran kinerja. Dalam perkembangannya, kelemahan dan ketertinggalan sektor publik dari sektor swasta memicu munculnya reformasi pengelolaan sektor publik dengan meninggalkan administrasi tradisional dan beralih ke New Public Management yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas. Lihat Ujang Cepi Barlian & Eliyanto, *Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Melalui Balance Scorecard*, Cakrawala: Studi Manajemen

adalah meyakinkan dan membuktikan bahwa seluruh rangkaian strategi, rencana dan alternatif rencana, dapat berjalan dengan maksimal. Apabila terdapat hal yang diluar perencanaan, maka tugas pemimpin adalah menemukan masalah sekaligus memberikan jalan keluarnya.

Dari bahasan tersebut, maka langkah pengendalian dalam manajemen setidaknya memuat tiga aspek penting, yaitu 1) menentukan standar keberhasilan suatu program seperti standar biaya, fisik, model, penghasilan dan lain sebagainya. 2) mengukur dan menilai kegiatan atas dasar standar yang telah ditetapkan. 3) menyiapkan tindakan solusi apabila terhadap standar yang tidak sesuai. Proses inilah yang dinamakan dengan pengukuran sekaligus pengawasan.

C. Prinsip dan Nilai Manajemen Pendidikan

Proses manajemen pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh dan topangan dari sisi

lainnya. Begitu juga dengan perumusan dan pelaksanaan seluruh bagian dari manajemen, sisi lain tersebut menjadi nilai norma (*norm value*) sebagai rujukan.²⁹ Menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pada tahapan-tahapannya tentu bukan hanya melihat dari kepentingan edukasi saja, namun terhadap faktor lain seperti budaya, sosial, moral dan spiritual yang menjadi tujuan. Sebab sehebat apapun manajemen, bila bertentangan dengan hal tersebut, sulit dipraktekkan. Untuk itu, pada prosesnya, segala faktor lain tersebut menjadi pendekatan yang perlu dikaji.

29 Norma dianggap sebagai representasi kolektif dari perilaku kelompok yang dapat diterima serta persepsi individu terhadap perilaku kelompok tertentu. Norma dapat dipandang sebagai produk budaya (termasuk nilai-nilai, adat istiadat, dan tradisi) yang mewakili pengetahuan dasar individu tentang apa yang orang lain lakukan dan pikirkan yang harus mereka lakukan. Dari perspektif sosiologis, norma sosial adalah pemahaman informal yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

Psikologi sosial mengakui unit kelompok yang lebih kecil (seperti tim atau kantor) juga dapat mendukung norma secara terpisah atau sebagai tambahan terhadap harapan budaya atau masyarakat. Lihat M. K. Lapinski & R. N. Rimal, *An explication of social norms*, *Communication Theory*, Vol. 15, No. 2, 2005, hlm. 127-147. Lihat juga R. D. Cialdini, *Crafting normative messages to protect the environment*, *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 12, No. 4, 2003, hlm. 105-109.

1. Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan dimensi sosial dari sebuah nilai (etika). Nilai-nilai berhubungan dengan norma-norma budaya, tetapi lebih global dan cenderung bersifat intelektual daripada norma. Norma memberikan aturan untuk perilaku dalam situasi tertentu, sementara nilai mengidentifikasi apa yang harus dinilai sebagai baik atau buruk. Sementara norma adalah standar, pola, aturan, dan pedoman perilaku yang diharapkan, nilai adalah konsep abstrak tentang apa yang penting dan berharga. Mengibarkan bendera nasional pada hari libur adalah norma, tetapi itu mencerminkan nilai patriotisme. Mengenakan pakaian gelap dan tampil khusyuk adalah perilaku normatif untuk mewujudkan rasa hormat di pemakaman. Budaya yang berbeda mewakili nilai yang berbeda dan pada tingkat penekanan yang berbeda.³⁰

30 Budaya individu menekankan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota mereka secara luas. Nilai-nilai masyarakat sering dapat diidentifikasi dengan memeriksa tingkat kehormatan dan rasa hormat yang diterima oleh berbagai kelompok dan gagasan. Di Amerika Serikat, misalnya, atlet profesional tingkat atas menerima lebih banyak rasa hormat (diukur dalam hal pembayaran moneter) daripada profesor universitas. Lebih lanjut, Klarifikasi nilai berbeda dari pendidikan moral kognitif.

Klarifikasi nilai terwujud dalam tindakan seperti

Lembaga pendidikan menjadi sebuah ajang interaksi sosial yang terorganisir dari ikatan stakeholder yang berbeda-beda keahlian organis. Sebagai sistem sosial, lembaga atau organisasi pendidikan memiliki bagian-bagian yang saling tergantung dan memiliki budaya kerja unik.³¹

membantu orang-orang menjelaskan untuk apa hidup mereka dan apa yang layak untuk bekerja. Ini mendorong siswa untuk mendefinisikan nilai-nilai mereka sendiri dan untuk memahami nilai-nilai orang lain. Pendidikan moral kognitif dibangun di atas keyakinan bahwa siswa harus belajar untuk menghargai hal-hal seperti demokrasi dan keadilan ketika penalaran moral mereka berkembang. Lihat J. W. Santrock, *A Topical Approach to Life-Span Development*, New York: McGraw-Hill, 2007.

- 31 Suatu organisasi tidak akan dapat berkembang apabila tidak melakukan suatu perubahan. Perkembangan organisasi berguna untuk adaptasi dengan lingkungan dengan merubah nilai dan struktur organisasi, serta membuat cara kerja suatu lembaga menjadi lebih sistematis dan efisien. Faktor yang menyebabkan perkembangan suatu organisasi terdiri dari faktor internal dan eksternal, dan dengan mengubah suatu budaya organisasi maka sumber daya manusia yang ada akan menjadi lebih bermutu.

Sebuah organisasi mempunyai budaya masing-masing. Hal ini menjadi salah satu pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya sebuah organisasi ada yang sesuai dengan individu atau anggota baru, ada juga yang tidak sesuai. Sehingga seorang individu atau anggota baru harus dapat menyesuaikan diri dengan organisasi tersebut. udaya dalam sebuah organisasi juga dapat dipengaruhi paling tidak oleh tiga hal, yaitu:

Pertama, strategi organisasi yang mencakup tujuan

Dalam hal ini, antara lembaga pendidikan dengan kondisi sosial mulai dari struktur, komponen sampai pada adat istiadat beserta nilai yang dikandungnya, saling bersentuhan menciptakan budaya pendidikan dan masyarakat.³²

jangka pendek dan jangka panjang yang dirumuskan oleh organisasi; Kedua, bagaimana tujuan organisasi tersebut kemudian dikomunikasikan dan dipahami oleh semua anggota dan bagaimana pelaksanaannya, dalam hal ini mencakup: kemampuan individu, tingkah laku individu, dan hasil objektif yang diperoleh; dan Ketiga, situasi yang melingkupi dan mempengaruhi kinerja sebuah organisasi, yaitu mencakup budaya organisasi dan kondisi ekonomi. Dalam konteks lembaga pendidikan, situasi yang melingkupi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Budaya organisasi ini dapat membuat suatu organisasi menjadi terkenal dan bertahan lama. Di sisi lain, permasalahan muncul ketika ada budaya organisasi yang tak dapat menjadi pendukung organisasi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah organisasi tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya budaya organisasi tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, justru sebaliknya tetap mempertahankan eksistensi budayanya tanpa melihat perubahan dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, keadaan seperti ini maka individu/anggota secara tidak langsung tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan. Hal ini merupakan satu diantara faktor lain yang menyebabkan individu atau anggota serta sebuah organisasi tidak berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Lihat Moh. Hidayat H Yusuf, *Pengembangan Budaya Organisasi dalam Lembaga Pendidikan*, Jurnal Tarbawi, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 83.

Diakui bersama, sistem sosial merupakan ruang yang terbuka, terdiri dari bagian-bagian (kultur, sub sistem, struktur, elemen) yang saling berhubungan dengan karakteristik dan kontribusinya masing-masing. Contoh sosial yang berhubungan dengan manajemen pendidikan adalah apabila orang tua anak didik memiliki karakter yang keras, maka pribadi anak didik juga menjadi keras. Lingkungan pendidikan membentuk budaya belajar, sedangkan sistem sosial mendidik anak didik dengan budaya setempat.³³

Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan bersifat normatif.³⁴ Lembaga pendidikan

sosial, sangat kental dan bahkan dituntut adanya kesesuaian. Dalam teori strategikasi social, pendidikan memiliki peran penting dalam mengatur posisi dan kelas-kelas tertentu dalam social. Karena peran inilah, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari system social. Mengenai hubungan erat keduanya lihat dalam Jeanne H. Bellatine, *The Sociology of Education a Systemic Analysis*, New Jersey: Pearson, 2001, hlm. 70.

33 Dari aspek lingkungan, pendidikan memiliki tiga fungsi yaitu *input*, *output* dan *feedback*. Posisi lingkungan dalam hubungannya dengan pendidikan berperan sebagai *feedback*, distribusi kelas social terjadi pada lingkungan geografis yang berbeda-beda. Lihat Wahyu Bagja Sulfemi, *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 3.

34 Normatif dalam arti tidak semua sistem sosial dapat dihubungkan dengan pendidikan, namun ada point

memiliki regulasi, peraturan, norma yang mengarahkan pada perilaku dan pengambilan keputusan. Sistem sosial juga memiliki sanksi sosial, mekanisme formal, kewenangan oleh tokoh berpengaruh, yang juga melahirkan norma dan regulasi. Keduanya harus berjalan pada jalur yang seimbang, selaras tanpa ada penyimpangan. Sebab norma dan regulasi tersebut memiliki pengaruh yang sama. Bahkan, keberadaan sistem sosial mesti menjadi rujukan dari seluruh mekanisme manajemen.³⁵

tertentu yang dapat direlevansikan. Diantaranya adalah, 1) sistem sosial mengandung nilai-nilai edukatif; 2) system social tidak bertentangan dengan konsep umum yang disepakati bersama oleh para ilmuwan pendidikan tentang rekayasa social, 3) system social bertumpu pada norma baik norma social yang baik ataupun norma spiritual yang bersumber dari ketentuan Tuhan. Lihat dalam Chris Shilling, *Reconceptualising Structure and Agency in the Sociology of Education: Structuration Theory and Schooling*, British Journal of Sociology of Education, Vol. 13, No. 1, 1992, hlm. 1268.

35 Pendidikan merupakan modal yang sangat berharga bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikanlah diberikan tumpuan yang sangat besar akan keberlangsungan kehidupan suatu bangsa dimasa depan. Hal itu tidak dapat dipungkiri, karena kebodohan atau tingkat SDM yang rendah adalah awal dari kemiskinan. Melalui pendidikan, kemiskinan akan bisa dikikis dan kemudian menjadikan bangsa kita ini diakui dimata bangsa internasional.

Peran pendidikan yang sangat besar membutuhkan upaya yang besar pula untuk bagaimana mengembangkannya. Pendidikan yang bisa

mencetak SDM yang handal dan berakhlak, tentu adalah pendidikan yang bermutu tinggi. Banyak lembaga pendidikan yang hanya asal berdiri, tanpa memiliki orientasi dan target yang jelas, akhirnya yang terjadi adalah lulusan yang dihasilkan tidak dapat bersaing pada kompetisi masuk dijenjang yang lebih tinggi ataupun diterima dunia kerja. Dalam hal ini, menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah, sekolah dan masyarakat untuk dapat menciptakan pendidikan yang bermutu. Semua itu terwujud dalam sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada mutu produk anak didik yang siap bersaing di era global dan berkarakter.

Saat ini, pendidikan persekolahan dihadapkan dalam berbagai tantangan, baik secara nasional maupun internasional. Tantangan nasional muncul dari dunia ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Pembangunan ekonomi saat ini masih belum beranjak dari krisis ekonomi semenjak tahun 1997/1998. Bahkan, perkembangan ekonomi pada level bawah masih dalam kondisi yang stagnan, bahkan mundur.

Kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa ini juga demikian, dimana sering terjadi kerusuhan, konflik antar daerah, pencurian, perkelahian, tawuran, *free sex* pada berbagai kalangan semakin banyak terjadi dan gejala negatif kemasyarakatan lainnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan budaya global saat ini malah mengikis berbagai budaya asli bangsa, khususnya budaya daerah. Dari sisi keamanan, masyarakat merasa tidak aman untuk berjalan di malam hari, atau di tempat-tempat sepi, padahal Negara ini sudah merdeka.

Maka disini, pendidikan semakin ditantang untuk dapat menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan dan membawa Indonesia pada bangsa yang lebih beradab. Karena itu, pendidikan harus menomorsatukan kebutuhan dan sekaligus kondisi sistem sosial. Lihat Miftakhul Munir, *Keberadaan Total Quality Management dalam Lembaga*

Dari hubungan tersebut, maka dalam sistem sosial terdapat elemen yang hidup di masyarakat, yaitu 1) elemen struktural, dalam masyarakat, struktur dipresentasikan oleh beberapa stakeholder seperti pemuka agama, kebiasaan komunitas, kepala suku atau adat, premanisme dan jabatan-jabatan sosial lainnya yang memiliki wewenang mengadakan perubahan. 2) elemen individu, yaitu figur kewenangan individu baik disebabkan oleh kekuasaan maupun keturunan, memiliki kekuatan sosial. Individu merupakan bagian dari sosial, yang masing-masing mempunyai peran berbeda. 3) elemen politik, politik merupakan sistem hubungan kekuasaan informal yang muncul untuk menahan kesewenang-wenangan sosial. Politik biasanya menjelma di dalam birokrasi baik formal maupun nonformal. Antara struktur, individu dan politik dapat mempresentasikan dimensi formal dalam sistem sosial yang saling berpengaruh.³⁶

Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM dalam Pendidikan), Realita, Vol. 16, No. 1, 2018.

36 Noviani Achmad Putri, *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Sosiologi*, International Journal of Indonesia Society and Culture Komunitas, Vol. 3, No. 2, 2011, hlm. 205-215.

2. Budaya

Menurut Macionis, budaya Budaya dianggap sebagai konsep sentral dalam antropologi, yang mencakup berbagai fenomena yang ditularkan melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat manusia. Budaya universal ditemukan di semua masyarakat manusia; ini termasuk bentuk ekspresif seperti seni, musik, tarian, ritual, agama, dan teknologi seperti penggunaan alat, memasak, tempat tinggal, dan pakaian. Konsep budaya material mencakup ekspresi fisik budaya, seperti teknologi, arsitektur dan seni, sedangkan aspek-aspek budaya yang tidak material seperti prinsip-prinsip organisasi sosial (termasuk praktik organisasi politik dan lembaga sosial), mitologi, filsafat, sastra (keduanya tertulis dan lisan), dan sains terdiri dari warisan budaya non-organik dari suatu masyarakat.³⁷

Sedangkan menurut Richard Velkley, awalnya budaya diartikan sebagai penanaman jiwa atau pikiran, memperoleh sebagian besar makna modernnya di kemudian hari dalam tulisan-tulisan para pemikir Jerman abad ke-18, yang pada berbagai tingkat mengembangkan kritik Rousseau tentang liberalisme dan

37 John J. Macionis & Linda Marie Gerber, *Sociology*, Toronto: Pearson Prentice Hall, 2011, hlm. 53.

Pencerahan modern.³⁸ Atau, dalam konteks kontemporer, budaya didefinisikan sebagai domain sosial yang menekankan praktik, wacana, dan ekspresi materi, yang, seiring waktu, mengekspresikan kontinuitas dan diskontinuitas makna sosial dari kehidupan yang dimiliki bersama.³⁹

Secara praktis, pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya.⁴⁰ Begitu juga, budaya tidak dapat dilepaskan oleh pendidikan. Pengetahuan dan pelestarian budaya, ditranfer melalui proses pembelajaran

38 Richard L. Velkley, *Being after Rousseau: Philosophy and Culture in Question*, Chicago: University of Chicago Press, 2002, hlm. 11–30.

39 Paul James, Liam Magee, Andy Scerri, & Manfred Steger, *Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability*, London: Routledge, 2015, hlm. 53.

40 Setiap lembaga pendidikan, tentu dihadapkan pada budaya yang berbeda-beda, tergantung dimana pendidikan itu berlangsung. Budaya yang ada, bisa muncul dari lingkungan setempat atau juga dari anak didik, tenaga pendidik dan stakeholder lain. sifat kebudayaan yang kelindang dengan pendidikan mempengaruhi terhadap karakter dan pola pendidikan yang berlangsung.

Maka tidak heran, apabila pendidikan berbasis budaya itu perlu diajarkan sebagai bentuk filterasi dan pelestarian. Lihat dalam Yadi Ruyadi, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Proceeding International Conference on Teacher Education UP dan UPSI Bandung 2010, hlm. 577.

dalam pendidikan. Melalui pendidikan juga, kebudayaan dapat terjalin dengan generatif, turun temurun dan general. Kebudayaan menjadi nilai yang berkembang sesuai zaman, maka sejatinya, pendidikan juga memiliki elatisme keilmuan yang berkembang dari masa ke masa.⁴¹ Kedua elemen ini sama-sama berjalan paralel untuk memenuhi tujuan bersama. Budaya merupakan nilai dan prinsip pendidikan.

Budaya tercipta dari manifestasi akal budi individu dan masyarakat. Proses pendidikan didapat dari keilmuan dari semua sumber seperti al-Quran, hadist, teoritis, sosial, politik, sejarah, filsafat dan lain sebagainya. Budaya datang dari kreasi manusia secara internal, sedangkan pendidikan datang dari sisi eksternal.⁴² Keduanya dapat terpadu untuk menciptakan stabilitas sosial, menghidupkan keilmuan dan mencetak generasi kultural edukatif. Disinilah letak pentingnya budaya, sebagai nilai yang hidup dalam pendidikan.

41 Paul Duncum, *Visual Culture Art Education: Why, What and How*, International Journal of Art and Design Education, Vol. 21, No. 1, hlm. 987.

42 Karl Maton, *Knowledge andn Knowers: Towards a Realist sociology of education*, USA: Routledge, 2014, hlm. 4.

Paulo Freire (1997), mengatakan bahwa pendidikan berperan sebagai alat kontrol sosial yang efisien untuk menjaga status quo. Sedangkan budaya, berperan sebagai filter dan benteng dari moral pendidikan.⁴³ Budaya memiliki basis karakter (etika, akhlak) yang terbentuk dari akulturasi budaya dengan nilai-nilai karakter yang dibawanya. Perencanaan manajemen harus selaras dengan kebudayaan di masyarakat. Budaya menjadi *corong* untuk menyusun bagian-bagian dari manajemen.

Maka dari itu, hubungan budaya sebagai nilai manajemen pendidikan ada tiga; 1) pengembangan (*development value*), peserta didik berperan sebagai *developer culture* yang menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai manifestasi keilmuan yang didapatkan dari proses pendidikan. Dalam hal ini, umumnya, peserta didik yang telah cakap budaya, memahami dengan tepat dan mendalam. 2) perbaikan (*improvement culture*), kerusakan budaya akibat pengaruh dari budaya luar dan beragam gesekan akulturasi yang dapat mengancam eksistensi, menjadi tugas peserta didik untuk memperbaikinya. Pada posisi

43 Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm.195.

ini, peserta didik telah memiliki bekal yang cukup untuk memahami masalah kebudayaan khususnya di daerahnya sendiri, beserta cara menyelesaikannya. Terkait dengan manajemen pendidikan, maka segala manajemen diarahkan untuk menyelesaikan kebudayaan. Terakhir, 3) penyaring (*filter culture*), dalam hal ini peserta didik berperan sebagai penyaring budaya sendiri dengan budaya lain yang dapat mengancam eksistensi.

Dari ketiga hubungan tersebut, jelas bahwa budaya memiliki nilai dalam ruang manajemen pendidikan terkait dengan signifikansi peserta didik untuk menjaga dan mengembangkan budaya. Budaya adalah khazanah bangsa yang mencerminkan nasionalisme dan kecintaan kepada negara.⁴⁴ Pendidikan sebagai instrumen

44 Pendidikan memang ditujukan untuk menciptakan bangsa yang sadar akan budayanya sendiri. Salah satu komponen KTSP dan Kurikulum 2013, tujuan pendidikan adalah untuk menguatkan budaya bangsa atau budaya nasional. segala sumber daya diarahkan untuk mencapai tujuan nasionalisme.

Pengembangan pendidikan berbasis budaya bangsa telah menjadi program nasional, namun sepenuhnya belum masuk kurikulum. Kerangka konseptual yang ada, hanya mencerminkan tentang nilai-nilai dasar budaya bangsa. Lihat dalam penjelasan Suyitno, *The Development of Education on the Character and Culture of The Nation Based on The Lokal Wisdom*, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 2.

bangsa, tentu, harus menjadikan budaya sebagai terminan dalam melakukan proses manajemen.

3. Moral

Moral, akhlak atau etika apapun namanya adalah dasar dari semua ilmu, termasuk juga manajemen pendidikan sebagai ilmu.⁴⁵ Salah satu hasil output dalam kurikulum nasional adalah menjadikan “sikap” sebagai tujuan. Sikap merupakan perwujudan moral peserta didik, namun belakangan ini, karakter anak

45 Moral adalah diferensiasi dari niat, keputusan, dan tindakan di antara mereka yang dibedakan sebagai tepat dan mereka yang tidak patut. Moralitas dapat berupa badan standar atau prinsip yang berasal dari kode perilaku dari filosofi, agama, atau budaya tertentu, atau dapat berasal dari standar yang menurut seseorang harus bersifat universal. Moral juga secara khusus identik dengan "kebaikan" atau "kebenaran". Lihat A. A. Long & D. N. Sedley, *The Hellenistic Philosophers: Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hlm. 366-367.

Sebaliknya, Imoralitas adalah oposisi aktif terhadap moralitas (yaitu oposisi terhadap apa yang baik atau benar), sementara amoralitas didefinisikan sebagai ketidaksadaran, ketidakpedulian terhadap, atau ketidakpercayaan terhadap seperangkat standar atau prinsip moral tertentu. Baca Megan-Jane Johnstone, *Bioethics: A Nursing Perspective*, Confederation of Australian Critical Care Nurses Journal, Vol. 3, 2008, hlm. 102-103.

bangsa kembali disorot karena banyaknya fenomena tindakan amoral yang ditunjukkan oleh peserta didik. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat standar nasional telah memberikan aturan tentang moral.

Muslich (2011), mengemukakan bahwa sisi moral adalah nilai fundamental dalam manajemen pendidikan. Bahkan signifikansinya, menjadi yang teratas dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, sebab moral merupakan gambaran keilmuan peserta didik. Terdapat empat signifikansi moral bagi manajemen pendidikan, *pertama*, moral berfungsi sebagai keteraturan interior, dimana semua proses manajemen diukur berdasarkan pada hierarki moral. Moral menjadi pedoman normatif dari setiap tindakan dan keputusan. *Kedua*, koherensi keberanian prinsip, dimana proses manajemen pendidikan menjadi benteng dalam menghadapi rasa takut dan resiko. *Ketiga*, otonomi, menjadikan moral sebagai “kotak khusus” yang dispesifikkan ke dalam satu kurikulum khusus. Terakhir, *keempat*, keteguan dan dedikasi, merupakan perencanaan untuk menguatkan rasa solidaritas, sosial, kebersamaan dan nilai-nilai prinsipil kemanusiaan.⁴⁶

46 Mansur Muslich, *Pendidikan Krakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 127.

Dengan demikian, moral bukan hanya sekadar nilai pada mata pelajaran tertentu.⁴⁷ Namun adanya proses manajemen pendidikan hakikatnya bertujuan membenahi moral generasi bangsa dari *kalut malut* degradasi pada kehidupan yang rukun, damai tanpa ada konflik. Moral menjadi *tameng* semua sifat jahat manusia. Orientasi nilai moralistik, menempati semua aspek manajemen pendidikan, mulai dari kegiatan perencanaan pembelajaran, kerjasama, lingkungan, sampai pada evaluasi, tidak lepas dari unsur moral.

Hierarki tujuan *goal setting* dalam manajemen pendidikan tersusun ke dalam tiga aspek; moralitas, pengetahuan dan

47 Seperti yang pernah dipraktekkan di Indonesia sejak tahun 1960. Saat itu, pendidikan budi pekerti menjadi bagian dari kurikulum pendidikannasional yang diprioritaskan. Pendidikan budi pekerti digolongkan sebagai mata pelajaran yang memiliki muatan pembentukan watak seperti pelajaran agama, seni, sastra dan olahraga.

Namun pada masa Orde Baru, pendidikan budi pekerti diwujudkan melalui proram pendidikan sistematis, seperti yang tertera pada program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yang merupakan kewajiban bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Lihat sejarah pendidikan karakter lebih lengkap di salah satu artikel karya Cut Zahri Harun, *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan Karakter, tahun III, No.3, 2013, hlm.305.

keterampilan. Moralitas merupakan yang utama sebagai induk segala aspek nilai. Wiyani (2012), mengatakan bahwa hubungan nilai antara manajemen pendidikan dengan moral terjalin pada empat aspek; 1) integrasi ke semua mata pelajaran, moral menjadi pokok tidak peduli apakah pelajaran agama atau umum; 2) integrasi ke dalam kegiatan sehari-hari, seperti pendidik memberikan keteladanan sikap sehari-hari, mengadakan pembiasaan ibadah, dan lain sebagainya; 3) integrasi ke dalam program, setiap lembaga pendidikan tentu memiliki program baik internal maupun eksternal, maka menerapkan religiusitas, kedisiplinan, peduli lingkungan dan lain-lain adalah potret integrasi moral yang tersusun pada perencanaan manajemen pendidikan.⁴⁸

Dari penjelasan tersebut tergambar dengan jelas bahwa manajemen pendidikan memang terkait erat dengan entitas-entitas utama dalam pendidikan. Dengan demikian, unsur moral ditempatkan pada seluruh aspek pendidikan, sejak mulai digagas, digali, dirumuskan dan diterapkan dalam manajemen pendidikan. Baik pada aspek kurikulum dengan tingkat porsi

48 Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2002. hlm.57.

yang berbeda, ataupun lingkungan pendidikan, atau bahkan di lingkungan sosial. Moral menjadi terminan keilmuan seseorang, sebagai indikasi keberhasilan pendidikan. Sudah barang tentu, dalam melakukan proses manajemen pendidikan, unsur moral terintegrasi secara total dan otomatis.

BAB 3

Manajemen Pendidikan Berbasis Antropologi Budaya

A. Manajemen Pendidikan: Pendekatan Antropologi Budaya

Sering luput dari perhatian pengamat dan praktisi, pendidikan kerap semata bersentuhan dengan aspek edukasi saja. Padahal bila melihat pendidikan Indonesia secara majemuk, tampak sekali bahwa pendidikan dipengaruhi oleh banyak situasi. Termasuk faktor plural negara Indonesia yang beragam. Tak dapat dibantah, lingkungan dan ciri khas bangsa menjadi cerminan dominan dalam mengembangkan pendidikan secara nasional. Sudah barang tentu, manajemen dalam pendidikan memotret negara dari segala sisi.

Karel A. Steenbrink (1986) pernah melakukan riset mendalam tentang pengaruh pendidikan di Indonesia. Kendati penelitiannya

telah lama, namun merujuk pada karakteristik Indonesia yang tetap menjaga budaya nenek moyang serta penuh adat, penelitian Steenbrink tetap relevan. Dalam penelitiannya mengungkap bahwa pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial dan pusat peradaban. Faktor sosial dapat berupa norma dan aturan masyarakat yang ditetapkan oleh tokoh pemuka setempat. Sedangkan pusat peradaban, dipengaruhi oleh unsur lain seperti kedatangan kaum urban, buku-buku, tenaga pengajar dari luar.¹

Sepakat dengan Karel A. Steenbrink, Heynemen dalam Supriadi mengatkan bahwa selama ini manajemen yang ada di Indonesia mengalami pergeseran. Dulu, masyarakat secara mandiri menentukan standar kompetensi anak didik dengan mengedepankan karakter, kultur dan kearifan lokal. Sehingga banyak daerah yang berkembang tanpa bantuan dari pemerintah. Sehingga Heynemen berkesimpulan bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh mutu pada konteks pendidikan itu hidup.²

1 Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomid Sosial, 1986, hlm.71.

2 Supardi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Jakarta: Adicita Karya Nusantara, 1999, hlm.41.

Namun hari ini berbeda rasa, pendidikan budaya kurang mendapat porsi yang cukup dalam sistem kurikulum kita.

Masih ingat tentang karya momental Geertz, sebagaimana dipopularkan oleh Talal Asad, mengatakan bahwa perkembangan pendidikan secara global dipengaruhi oleh hubungan timbal-balik antar manusia, yang pada prosesnya melahirkan tranfer karakter dan keilmuan.³ Hubungan antar manusia inilah yang mengantarkan bahwa perkembangan pendidikan erat kaitannya dengan kajian manusia dengan manusia lainnya.

Manajemen pendidikan berbasis budaya (*culture based education management*), memberikan peluang terbuka kepada semua kalangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehadiran manajemen pendidikan berbasis budaya menekankan pada dua entitas besar; *pertama*, adanya asumsi modernisme sehingga manusia cenderung bersifat alami

3 Menurut teori Geertz, manusia merupakan makhluk social yang satu sama lain berhubungan, maka melalui kajian antropologi, sifat dan karakter manusia dapat dipahami serta dijaga kerukunannya. Keberadaan pendidikan harus berkembang, mengikuti pola manusia yang juga berkembang. Lihat dalam Talal Asad, *Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz, Man*, 1983, hlm. 237.

(*cultural lag*); *kedua*, modernisasi sendiri yang menginginkan terciptanya segala dimensi kehidupan, termasuk budaya.⁴

Melihat hubungan erat antara pendidikan dengan budaya, bahkan budaya sebagai basis pengembangan pendidikan, maka dapat ditelusuri hubungan keduanya dapat melalui beragam proses, yaitu sebagai berikut.⁵

4 Pertimbangannya, kebudayaan sudah ada jauh sebelum lembaga pendidikan diformalkan. Kebudayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan lahirnya budaya lebih dulu daripada masuknya agama Islam dan agama-agama lain. Untuk menjaga ekistensi budaya yang diwariskan antar generasi, dibuatlah lembaga pendidikan sebagai sarananya.

Disinilah letak pentingnya pendidikan yang harus tetap mengacu pada kebudayaan. Maka lahirlah aliran pendidikan *konstruvisme cultural*, sebuah aliran pendidikan yang mengedepankan kebudayaan sebagai sasaarannya. Lihat lebih lengkap di I Ketut Tanu, *Pembelajaran Berbasis Budaya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah*, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol. 2, Nomor 1, hlm.34.

5 Keempat model ini bukan susunan hierariki, melainkan sebagai bentuk sifat budaya masuk pada ranah manajemen pendidikan. Pada dasarnya, ketika melihat manajemen pendidikan dari teropong antropologi budaya, maka proses internalisasi tersebut berjalan otomatis. Karena sifat budaya yang dinamis merangsang karakter, kepribadian manusia sebagai bentuk ilmu antropologi. Lihat dalam Ivan Riyadi, *Manajemen Pendidikan Bermuatan Antropologi, Agama dan Sosial*, Jurnal Cendikia, Vol. 17, No.2, 2019, hlm.310-311.

1. Proses interaksi. Manajemen pendidikan yang bermuatan kebudayaan dipahami oleh masyarakat memiliki substansi yang sama antara pendidikan dengan budaya. Melalui proses interaksi, maka proses pendidikan dapat seiring dengan perkembangan budaya.⁶ Interaksi tersebut dapat melalui hubungan pendidik dengan peserta didik, atau antar stakeholders.
2. Proses enkulturasi, atau dalam istilah lain disebut dengan “pembudayaan”. Manajemen pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya melalui *transfer knowledge of culture*. Anak didik dikenalkan, diajarkan dan praktekkan tentang nilai budaya warisan nenek moyang yang tetap relevan dijalankan.
3. Proses internalisasi, hakikatnya pendidikan bersifat terbuka dan menerima pengetahuan budaya serta warisan pemahaman generasi dulu. Warisan sosial yang baik dimasukan ke dalam pembelajaran pendidikan dengan cara internalisasi maupun kepribadian. Proses internalisasi ini bisa juga masuk pada kurikulum secara informal dan kasat mata.

6 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, hlm.58

4. Proses model pembelajaran, setelah internalisasi budaya ke dalam kurikulum, kemudian peserta didik dikenalkan potensi budayanya sendiri. Selain mereka dapat mempertahankan, juga dapat mengembangkan.

Dengan demikian maka antara pendidikan dan budaya dipastikan memiliki hubungan komplementer. Komplementer yang dimaksud adalah keterkaitan antara sisi internal pendidikan dengan aspek eksternalnya. Dari sisi internal, hubungan keduanya terlihat pada *input*. Contohnya, tujuan pendidikan beserta segala rumusannya ditentukan oleh sistem nilai yang hidup di masyarakat (*culture of value*). Perumusan kurikulum, output dan input, ditentukan oleh nilai-nilai, norma-norma, orientasi keiluan anak didik, sikap semua stakeholder dan aspirasi yang hidup di masyarakat.

Pada posisi ini, aspek budaya bisa jadi sebagai nilai atas semua unsur manajemen lembaga pendidikan. Konsekuensinya adalah aspek budaya bisa masuk kemana saja; kurikulum, metode pembelajaran, lingkungan, peserta didik, pendidik serta seluruh stakeholders walaupun sebatas nilai saja, tanpa ditampilkan

pada hal yang terlihat mata seperti adanya pelajaran kebudayaan, kegiatan pentas budaya dan lain-lain. Sedangkan pada posisi lain, aspek budaya berfungsi sebagai formal. Aspek kedua ini, kebudayaan bukan hanya sebatas nilai, tapi juga diformalkan ke dalam bentuk kurikulum maupun kegiatan pendidikan. Untuk melihat internalisasi, hubungan dan peran budaya dalam sektor manajemen pendidikan, berikut dibahas lebih dalam.

B. Model Pembelajaran Berbasis Budaya

Tyler (1871), melihat kurikulum dalam pendidikan sebagai “*a complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs and other capabilities and habits acquired by man as member of society in managemen educations*”.⁷ Asumsi Tyler ini mengingatkan kita pada ungkapan filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles, Ia melihat pendidikan sebagai sarana dalam rangka mencapai

7 Sebagaimana dikutip oleh I Ketut Tanu, *Pembelajaran Berbasis Budaya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, hlm. 34.

kebahagiaan, kehidupan yang lebih baik dan final.⁸ Bila dipadukan, dimana kebudayaan lahir dari karsa, cipta, rasa manusia yang dilaksanakan secara sengaja sukarela. Maka tugas manajemen pendidikan adalah menjaga kearifan budaya untuk kebahagiaan manusia (bila ditinjau dari aspek filsafatnya).

Pemaknaan pendidikan berbasis budaya pada dataran model pembelajaran bersifat holistik. Dalam artian, pembelajaran tersebut tetap mengacu pada standar nasional pendidikan namun juga terkait dengan nilai-nilai luhur budaya. Anak didik dapat memiliki sifat keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, berpikir lingkungan, bersifat multikultural sesuai standar nasional dan kekayaan budaya di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Aqib (2002) memberi arti pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun secara lengkap seperti material, prosedur, sarana-prasarana yang tersusun saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan.⁹ Arti tersebut melahirkan definisi, bahwa pembelajaran bila

8 Ibid., hlm. 34.

9 Zainal Aqib, *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002, hlm.41

dikontekskan, adalah strategi pembelajaran budaya dengan mengacu pada lingkungan, pengalaman dan budaya. Secara praktis, budaya menjadi sebuah metode yang terbentuk dari hasil transformasi observatoris ke dalam bentuk kreatif tentang kondisi sosial alamiah.

Pengertian ini memang tidak begitu lengkap, karena peran budaya dalam manajemen pendidikan begitu kompleks. Maka Pannen (2002) mengajukan definisi yang lengkap, pembelajaran berbasis budaya merupakan metode yang terorientasi pada penciptaan lingkungan belajar yang mengintegrasikan antara budaya dengan pembelajaran dan menjadikan budaya sebagai fundamental, ekspresif dan komunikatif.¹⁰ Dengan pengertian ini, tampak bahwa pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi integrasi budaya ke dalam proses pembelajaran baik berupa ekspresi (penyampaian formal), komunikasi (pembicaraan sehari-hari) maupun perkembangan pengetahuan.

Secara lebih rinci, Goldberg (2000) menggambarkan model pembelajaran berbasis budaya dengan tiga komponen.

10 Paulina Pannen, *Konstruktivisme dalam Pembelajaran*, Jakarta: Depdiknas, 2012, hlm. 87.

1. Menjadikan budaya sebagai sasaran keilmuan
Budaya yang telah hidup di masyarakat baik berupa bahasa maupun rutinitas sehari-hari, dimasukkan ke dalam kurikulum wajib sebagai mata pelajaran khusus. Beberapa lembaga pendidikan yang menampilkan model ini menetapkan porsi yang berbeda-beda. Seperti pelajaran seni rupa, seni tari, seni sastra, melukis atau seni musik. Dalam hal ini, budaya diberikan ruang khusus yang sama sekali tidak terintegrasi dengan pelajaran lain.
2. Menjadikan budaya sebagai sasaran kebiasaan
Artinya, budaya diwujudkan dalam media pembelajaran baik pada konteks proses belajar, prosedur mata pelajaran, kegiatan dalam kelas maupun kegiatan lainnya. Pembelajaran yang sifatnya integral dan menjadi kebiasaan. Menurut Goldberg, pembelajaran yang sifatnya ke arah kebudayaan, memungkinkan anak didik dan tenaga pengajar menyadari bahwa budaya merupakan ekspresi ide dan gagasan estetis yang dapat mendukung terhadap intelektual dan kecintaan terhadap budaya serta menumbuhkan nasionalisme.
3. Menjadikan budaya sebagai sasaran filter
Baik anak didik, tenaga pendidik maupun

stakeholder yang lain diberikan tugas untuk menjaga kebudayaan melalui analisa problem. Budaya dijadikan *tameng* untuk membendung segala problem pendidikan, seperti tawuran, asusila, kejahatan dan tindakan tidak baik lainnya. Melalui pembelajaran budaya, manajemen pendidikan merupakan bentuk *multiple representation of learning assessment* atau berperan sebagai pemahaman karakter diri dan sosial.¹¹

Dengan komponen ini, maka jelas bahwa unsur manajemen pendidikan memiliki keterkaitan dari segala sisi terhadap budaya. Budaya menjadi pijakan dalam pembelajaran, kurikulum yang dirumuskan berlandaskan kebudayaan, metode pembelajaran mengikuti arus kebudayaan dan bahkan tujuan tidak lepas dari budaya.

C. Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya

Komponen ini menjadi pembeda dengan model pembelajaran dengan basis bidang studi lainnya

11 L. R. Golberg, *The Development of Markers fo Th Big-Fice Factor Structure*, Psychological Assessment. Vol. 4, No. 2, hlm. 141-165.

(*non culture based*). Output pembelajaran berbasis budaya lebih menakanankan pada tercapainya pemahaman keilmuan terpadu (*integrated understanding*) dibandingkan dengan sekadar pemahaman mendalam (*inert understanding*).¹² Konsep keilmuan terpadu tidak terfokus pada satu bidang saja, namun menjalar pada semua aspek secara menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Krajcik, Czemiak dan Berger.

12 R. R. McCrar & PT. Jr. Costa, *Validation of the Five-Factor Model of Personality Across Instrument and Observers*, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 52, No. 1, 1987, hlm. 81-90.

Dalam konteks yang searah, Hmelo-Silver mengemukakan bahwa "*Understanding collaborative knowledge construction requires making sense of the conversations that students engage in and the tools that mediate their learning. These sort of everyday learning practices have been studied using a variety of techniques including discourse and conversation analysis, ethnography, and other qualitative methods.*"

Maksudnya adalah memahami konstruksi pengetahuan kolaboratif membutuhkan pemahaman dialektis antara kegiatan siswa dengan alat yang memediasi pembelajaran mereka. Praktik pembelajaran sehari-hari semacam ini telah dipelajari menggunakan berbagai teknik termasuk analisis wacana dan percakapan, etnografi, dan metode kualitatif lainnya. Lihat Cindy E. Hmelo-Silver, *Analyzing collaborative knowledge construction: multiple methods for integrated understanding*, *Computers & Education*, Vol. 41, 2003, hlm. 399.

Secara konseptual, manajemen pendidikan berbasis budaya dapat dilihat dari banyak aspek, diantaranya adalah:

1. Substansi dan kompetensi bidang keilmuan

Pemahaman terpadu mensyaratkan adanya interpretasi makna oleh penerima ilmu (anak didik atau masyarakat), makna yang dihasilkan dari penemuan konteks. Misalnya begini, saat anak didik diperkenalkan budaya *saronen* di Jawa Timur, maka mereka meraba-raba makna apa yang terkandung didalamnya. Apakah sekadar kesenian, atau mengandung nilai ketauhidan. Sekadar penampilan kebudayaan, atau memiliki makna-makna sosial seperti *gotong royong*, solidaritas, kerukunan.

Pada gilirannya, bermunculan para pengamat, ahli dan penggerak budaya, asal-usulnya berangkat dari sini yakni kemampuan anak didik dalam memaknai suatu budaya melalui pendidikan. Perancang manajemen, tentu dapat merespon bagaimana perkembangan anak didik. Sehingga, substansi dari keilmuan tentang pendekatan budaya dalam manajemen pendidikan meliputi;

- a) *Content knowledge*, yaitu suatu kandugnan isi/konsep dalam suatu bidang ilmu. Kebudayaan harus masuk pada konten keilmuan, paling tidak ditempelkan.
- b) *Inquiry and problem solving knowledge*. Dengan cara melempar masalah sebagai sajian keilmuan, masalah-masalah kebudayaan, ketahanan lokal, inkilturasi, dapat dipecahkan dengan kajian keilmuan.
- c) *Epistemic knowledge*, pada substansi ini, anak didik dan perumus pendidikan berupaya memosisikan anak didik sebagai epistem atau peramu metode filterasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan kehidupan.

2. Implikasi dan proses pembelajaran

Menjadikan budaya sebagai hal yang riil dan nyata (*contexs*) dari pengetahuan dan pemahaman yang sifatnya teoritis. Karena manajemen kurikulum dirancang untuk memahami dan mampraktekkan kebudayaan melalui pembelajaran, maka mereka secara taktis menerapkan yang dipahami. Apalagi, sesuai rancangan awal pengembangan pendidikan, telah dibuat pembiasaan sikap dan ucapan.

Setiap pembelajaran baik menggunakan media tradisional maupun media interaktif seperti project multimedia, anak didik dapat menerapkan makna budaya dari setiap fasilitas yang ada. Dalam hal ini, outputnya adalah terjadinya negosiasi untuk memperbaiki, melihat kekurangan aspek budaya dihubungkan dengan perkembangan era. Pada aspek inilah, anak didik telah berhasil melakukan interaksi aktif dengan kebudayaan.¹³

13 Kebermaknaan dan Proses Pembelajaran meliputi: (1) Tugas yang bermakna bersifat kontekstual karena dirancang dari pengetahuan dan pengalaman awal siswa berdasarkan contoh-contoh dan penerapan aktivitas sehari-hari pada konteks komunitas budayanya. (2) Interaksi aktif, yang merupakan sarana terjadinya proses negoisasi dalam penciptaan arti atau interaksi harus bermakna bagi siswa dan memfasilitasi terjadinya proses penciptaan makna. Terdapat beragam metode yang dapat dirancang dalam pembelajaran berbasis budaya, antara lain pembelajaran melalui proyek dan pembelajaran berbasis masalah. (3) Penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual. Dalam penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual guru maupun siswa bertumpu pada pengalaman dan pengetahuan awal siswa dalam konteks komunitas budaya sebagai titik awal proses belajar. Lihat I Ketut Tanu, *Pembelajaran Berbasis budaya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah*, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol. 2 No. 1, Tahun 2016, hlm. 41.

3. Penilaian hasil belajar atau evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat outcome dari pembelajaran makna dan kontekstualitas kebudayaan. Di lembaga pendidikan beragam alat ukur digunakan dengan tingkat efisiensi yang berbeda pula. Maka untuk mengevaluasi, yang dilihat adalah produk atau karya, seperti catatan harian, essay budaya, puisi, lukisan dan seni budaya lainnya selain yang dilukiskan oleh sikap.¹⁴

Untuk memperkaya pemahaman, tentu kita harus melihat sebuah teori ketika diterapkan. Plant dan Kesant (2002) melakukan penelitian tentang penerapan pendidikan berbasis budaya yang dimunculkan dari hubungan guru dan murid dalam suatu forum pembelajaran. Bentuk

14 Tanu juga menambahkan satu lagi komponen pembelajaran berbasis budaya, yaitu Peran Budaya. Budaya dalam berbagai perwujudannya secara instrumental dapat berfungsi sebagai media pembelajaran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran berbasis budaya, peran budaya dalam memberikan suasana baru yang menarik untuk mempelajari suatu bidang ilmu yang dipadukan secara interaksi aktif dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan berbagai sumber belajar Dalam pembelajaran berbasis budaya, pemanfaatan berbagai sumber belajar mencakup pemanfaatan bahasa sebagai alat komunikasi ide dan pemanfaatan komunikasi budaya sebagai konteks proses pembelajaran. *Ibid.*, hlm. 42.

pembelajarannya seperti di Bali, dimana guru menggunakan baju masyarakat setempat (*kemben* atau kain putih yang dililitkan ke tubuh), pembelajaran dilakukan di alam terbuka, anak didik tidak harus mengenakan seragam sekolah, dan tidak membatasi durasi waktu.

Implikasinya cukup fantastis, sejak dulu Bali lebih kental budayanya. Budaya itupun menutupi ritual-ritual keagamaan yang dimilikinya. Bahkan Bali termasuk kota ajaib, dibilang ajaib karena mampu bertahan sempurna saat destinasi para *tourism* datang tanpa filterasi. Budaya mereka tetap *langgeng* dan tak lekang oleh waktu. Tentu, salah satu prestasi ini disebabkan oleh pendidikan berbasis budaya yang diterapkan.¹⁵

Selain guru dan murid serta model pembelajaran alam di Bali, untuk memasukkan

15 Di Bali, terdapat "sekolah Banjar" yaitu sekolah yang memfokuskan pada tradisi dan nilai-nilai lokal sebagai basis pemahaman dan pembelajaran. Sekolah Banjar dikemas dalam model asrama informal sebagai tempat pembelajaran. Bukan hanya anak didik yang belajar, namun masyarakat umum boleh belajar. Disana mereka belajar praktek hidup toleran, sepemahaman, saling membantu yang diistilahkan dengan *para paro, saharepaananya, salunglung sabayantaka*. Di sekolah ini juga dilengkapi dengan belajar nilai, ilmu, teknologi dan berbagai keterampilan budaya dari klasik sampai alat modern. Lihat dalam Topatimasan, 2005.

isi kebudayaan dalam manajemen pendidikan terlihat juga di Yogyakarta. Diakui bahwa Yogyakarta merupakan kota budaya sekaligus kota pendidikan. Di kota ini, antara pendidikan dan budaya berbaur kental. Pembelajaran di lembaga pendidikan juga tidak luput dari bahasa daerah, seni rupa dan kearifan lokal. Budaya benar-benar menjadi ruh pendidikan di lingkungan pendidikan ataupun di masyarakat. Budaya berhasil dimaknai oleh anak didik dalam kegiatan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Tilaar (2005), dalam penelitiannya di Yogyakarta mendapati bahwa manajemen pendidikan berbais budaya dilakukan dengan menjadikan budaya sebagai kurikulum wajib, termasuk juga metode pembelajarannya dilakukan di luar kelas dan langsung berhadapan, bersentuhan atau mempraktikkan kebudayaan. Karena wawasan budaya erat kaitannya dengan identitas bangsa.¹⁶

16 Sekolah-sekolah di Yogyakarta mendesain pembelajarannya dengan system *Paguron*, yaitu suatu tempat mempraktekkan budaya bersama gurunya dalam suatu lingkungan perguruan. Jika dibawa pada konteks kekinian, kira-kira system *paguron* disebut dengan para pecinta alam.

Menurut Tilaar, sejak dimemasuki rahap perencanaan, hamper semua lembaga di Yogyakarta dari tingkatan bawah sampai perguruan tinggi tetap mengedepankan aspek nilai-nilai budaya lokal

Konteks pola manajemen pendidikan berbasis budaya di Yogyakarta merupakan proses belajar yang integral dan menyeluruh dari beragam fenomena kebudayaan yang telah berubah maupun yang masih bertahan. Mata pelajaran yang disuguhkan dalam kurikulum diajarkan kepada anak didik untuk berpikir kritis ilmiah, sosialis, budayawan dan cinta tanah air. Bahkan keberadaan teknologi dan ilmu pengetahuan diarahkan sebagai mediator kebudayaan.¹⁷

sebagai isi, metode dan lingkungan pembelajaran utama. Namun terdapat kekurangan, setelah belajar budaya anak didik belum bisa merespon dan menyadari persoalan-persoalan social budaya yang berlangsung di masyarakat.

Dalam hal ini, menurut Tilaar, kurang memperhatikan aspek ketika dari integrasi manajemen pendidikan dengan budaya, yaitu aspek *problem solving of culture* dimana anak didik diajak berpikir untuk memecahkan masalah kebudayaan akibat datangnya tantangan budaya dari luar. Lebih jelas lihat Tilaar, 2005

- 17 Potret perumusan manajemen pendidikan berbasis budaya dilakukan dengan mengacu pada tiga kerangka dasar yang dilaksanakan oleh SD di Sleman. 1) budaya sebagai konten pendidikan, dalam hal ini lembaga menyelenggarakan tentang kebudayaan baik pada intra kulikuler ataupun ekstra kulikuler seperti melatih *sungging wayang, kerawitan, membatik, gobak sodor* dan kebudayaan lainnya; 2) menjadikan budaya sebagai metode utama dalam melaksanakan pembelajaran. Pada bagian ini, lembaga melakukan pengenalan (bagi tingkatan pertama). Pengetahuan (tingkatan menengah) dan pembiasaan dan pembudayaan (bagi tingkatan

Dari pembahasan di atas, pembelajaran pendidikan berbasis budaya dapat tertuang pada aspek makna, substansi, konteks dan evaluasi. Pada aspek makna, pembelajaran dipatri untuk mengungkap makna dibalik materi kebudayaan, mengobservasi pada aspek munculnya kebudayaan dan meniru. Secara substantitif, memahami isi dari budaya tersebut, mempraktikkan dan menjaga dari serangan budaya luar. Konteks, dapat membiasakan dan membudayakan dengan tepat. Terakhir, evaluasi, dilakukan perbaikan atas kekurangan manajemen dengan basis budaya. Dan pada akhirnya, budaya dalam manajemen pendidikan bersifat maknawi dan kontekstual. Dapat diformalkan ataupun sebatas nilai.

atas). Misalkan pembelajaran IPA tentang frekuensi bunyi dengan peraga instrument *gamelan*, pelajaran ilmu fisika dengan peta permukaan bumi dengan melihat kekayaan nusantara, dsb. 3) budaya sebagai konteks dan dijadikan pendekatan dalam proses pembelajaran, dalam hal ini, sekolah melaksanakan kegiatan berbau kebudayaan setiap pekan sekali dengan aneka kegiatan seperti pentas seni, tari-tarian ataupun lainnya.

Pada tingkatan perguruan tinggi, dosen memberikan waktu pertemuan dengan mendalami kebudayaan yang ditelorkan dalam RPS, termasuk visi dan misi lembaga. Lihat dalam Ki Sugeng Subagya, *Pendidikan Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pendidikan, Pembelajaran dan Budi Pekerti*, Jurnal Akuntansi Manajemen Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 1-9.

BAB 4

Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter

A. Signifikansi Akademik Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebenarnya kajian lama, bahkan eksistensinya ditengarai menjadi embrio lahirnya pendidikan Islam. Namun seiring perkembangan zaman, masalah karakter anak bangsa kembali menjadi kajian penting disebabkan oleh banyaknya perbuatan amoral anak didik yang menyimpang. Padahal, pendidikan karakter adalah inti dari segala pembelajaran, muara terakhir sekaligus awal mula adanya pendidikan. Karakter merupakan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, membincang pendidikan karakter atau membuat formulasi manajemen pendidikan karakter tetap menjadi kajian segar dari setiap dekade.

Kompleksitas pembahasan pendidikan karakter, bahkan dimulai dari istilah-istilah yang berkembang. Arifin (2010) menelusuri ke beberapa kajian tentang istilah pendidikan karakter, sangat beragam. Seperti pendidikan watak, akhlak, *soft skills*, moral, budi pekerti dan lain sebagainya. Namun semua istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu sebagai *goodness behavior* atau disebut pendidikan berbasis akhlak (karakter, moral, etika).¹

Ki Hajar Dewantara (1977), mengatakan bahwa sebelum adanya pendidikan formal maupun non formal, telah ada pembelajaran karakter melalui kesenian-kesenian budaya sehari-hari. Sehingga menurut beliau, karakter (terlepas dari makna pendidikan saat ini) adalah nilai kebaikan yang terpartri dalam hati dan dilaksanakan oleh sikap serta disertai dengan

1 Pendidikan karakter sangat tidak asing bagi lembaga pendidikan Islam, karena selain masuk dalam tujuan utama, juga memiliki keterkaitan dengan sumber ajaran Islam, yaitu hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa tujuan agama Islam diturunkan ke bumi semata untuk memperbaiki akhlak. Meskipun demikian, tujuan pendidikan Islam yang paling utama adalah perbaikan karakter manusia, baru kemudian setelahnya ilmu pengetahuan (*ilmu*) dan keterampilan (*harkah*). Lihat Arifin, *Membangun Karakter Bangsa Melalui Kepemimpinan Moral-Spiritual: Strategi Atasi Kasus Demoralisasi dan Korupsi di Indonesia*, Prosiding Nasional Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan, UM, 2010, hlm. 38.

dorongan keikhlasan yang tinggi baik berdampak pada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan.² Pengertian ini dikembangkan oleh Zamroni (2010) dengan mengaitkan pada sisi pendidikan, sehingga, pendidikan karakter erat kaitannya dengan pengembangan nilai kebaikan peserta didik, kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup dan memahami sesuatu yang baik dan jelek.³ Sehingga benar yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, kalau pembelajaran karakter berlasung secara terus menerus.⁴

2 Ki Hajar Dewantoro, *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977, hlm. 12.

3 Zamroni, *Strategi dan Model Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, Yogyakarta: PHK UNY, 2010, hlm. 40.

4 Pendidikan karakter memerlukan substansi atau isi yang kan menjadi materi atau muatan kurikulum pokok dalam membangun keribadian, sikap, dan tindakan seseorang baik dalam dirinya maupun ketika berhadapan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa. Seseorang akan berperilaku tertentu manakala terdapat nilai yang menjadi acuan bagi tingkah lakunya (*mode for action*), sehingga tindakan terarah berdasarkan nilai-nilai dan bukan sekadar kebetulan atau berdasarkan instink semata.

Nilai-nilai sebagai sesuatu yang berharga dan norma-norma sebagai patokan berperilaku dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang akan diserap melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara terus menerus. Disinilah pentingnya pendidikan sebagai pranata kebudayaan untuk

Pengertian ini menyiratkan betapa penting pembelajaran karakter kepada generasi muda. Saking pentingnya, keberadaan pendidikan sendiri ditujukan untuk membina moral atau karakter. Tanpa karakter, maka juga menjadi kegagalan dalam pendidikan. Karena bagaimanapun, karakter menjadi tolak ukur tingginya keilmuan seseorang. Semakin tinggi keilmuannya, maka semakin dalam karakternya. Hal ini dibenarkan oleh psikolog pendidikan Elfindri (2011), mengatakan bahwa kesuksesan dalam pendidikan disebabkan oleh peran ilmu dan karakter, peran ilmu pengetahuan hanya

menanamkan dan membiasakan nilai-nilai dalam kehidupan manusia menuju kehidupan yang berbudi utama atau berkeadaban selaku makhluk Tuhan yang mulia.

Pendidikan berfungsi mengenalkan, memahami dan menjadikan nilai-nilai karakter sehingga melekat dalam kehidupan peserta didik atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Melalui keteladanan nilai-nilai karakter bahkan akan lebih mudah untuk dijadikan model perilaku (role model) dalam bersikap dan bertindak.

Karenanya diperlukan substansi atau isi yang terkandung dalam nilai-nilai yang harus ditanamkan dan dibiasakan melalui proses pendidikan itu. Termasuk substansi nilai-nilai dalam pendidikan karakter, khususnya pendidikan karakter yang berbasis pada agama dan kebudayaan yang selalu mengajarkan hal-hal yang utama dan mulia dalam kehidupan umat manusia. Lihat Euis Puspitasari, *Pendekatan Pendidikan Karakter*, Jurnal Edueksos, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 56.

berkisar 18%, sisanya 82% adalah karakter atau keterampilan emosional *soft skills*.⁵

Terkait dengan pola manajemen pendidikan, Madya (2011), mengemukakan bahwa dalam penerapan nilai karakter di lembaga pendidikan, perlu dirancang secara komprehensif yang mencakup aspek budaya, lingkungan keluarga dan lingkungan belajar.⁶ Dalam hal ini,

5 Bahkan dalam ukuran dunia kerja (industry perusahaan) terdapat indicator unggulan yang berpotensi diterima yaitu terdapat kompetensi lulusan dengan predikat "*high competence*" yaitu lulusan yang memiliki kemampuan dalam aspek teknis dan sikap yang baik. Industry menyatakan bahwa kemampuan lulusan dengan waktu belajar yang singkat maupun lambat, tidak dipedulikan. Yang paling penting adalah lulusan tersebut memiliki komitmen atas perjanjian yang telah dibuatnya. Maka tipe lulusan yang seperti ini harus memiliki karakter yang kuat baik selama belajar, maupun telah lulus. Lihat penjelasan lebih lengkap dalam tulisan Imron Arifin, *Manajemen Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, dalam buku Imron Arifin dan Wahyudi, *Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan Profesionalisme Guru: Kajian Teori dan Riset*, Malang: UM Press, 2018, hlm. 4.

6 Pengelolaan pendidikan karakter dapat dibagi menjadi dua strategi, yaitu internal dan eksternal. Strategi internal dapat ditempuh melalui empat pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk *school culture*, kegiatan *habituation*, kegiatan ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.

Sedangkan strategi eksternal dapat ditempuh melalui kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya

diperlukan peran aktif yang melibatkan pemangku kepentingan internal seperti pimpinan, tenaga pengajar dan anak didik.⁷ Dengan pemaparan Madya, maka jelas bahwa aspek budaya dan lingkungan merupakan bagian dari elemen karakter dalam manajemen pendidikan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam manajemen pendidikan karakter memiliki beberapa unsur, yaitu: *pertama, ing ngarso sung tulodho*, artinya bagi anak didik, pemimpin, tenaga pendidik dan seluruh elemen stakeholders pendidikan harus menampilkan sikap yang melambangkan suri tauladan baik di lingkungan pendidikan maupun di luar. Selain itu, mereka juga dituntut mengabdikan kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu dan mengamalkannya secara ilmiah. *Kedua, ing madya mangun karso*, yaitu mendorong anak

sistem yang ada di dalam lingkup institusi, tetapi pelibatan *stake holders* menjadi faktor krusial dalam menunjang keberhasilan pendidikan karakter. Baca Yeni Wulandari & Muhammad Kristiawan, *Strategi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua*, JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 299.

7 Pendapat Madya dikutip oleh A.K. Masaong, *Pendidikan Karakter Berbasis Multiple Intelligence*, Yogyakarta: UNY Press, 2012, hlm. 88.

didik, pendidik dan seluruh tenaga kependidikan untuk proaktif berbaur dan memberikan motivasi kepada lingkungan sekitar untuk belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. *Ketiga, tut wuri handayani*, yaitu upaya manajemen dengan mengusung konsep memerdekaan anak didik untuk mengembangkan kreativitas, skill dan kemampuannya, maka proses manajemen dilakukan untuk mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan sendiri dengan bebas.⁸

8 Nilai-nilai falsafah tersebut, dapat diimplementasikan dalam melakukan perencanaan pendidikan karakter dengan mempertimbangkan hal-hal berikut; 1) pendidikan karakter diintegrasikan pada kegiatan kurikuler atau kegiatan intra di semua jenjang pendidikan; 2) kokurikuler dengan beragam kegiatan terprogram dan terstruktur seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan karakter, pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya; 3) ekstrakurikuler yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat dan skill anak didik. Lihat lebih jelas mengenai implementasi pendidikan karakter dalam menyusun perencanaan di Ki Hajar Dewantoro sebagaimana dikutip oleh Imron Arifin, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 8.

B. Model Integrasi Pendidikan Karakter

Culberston (1982) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan dengan menjadikan karakter sabagai tujuan harus memiliki sifat integral.

Some characteristics of the school management process of character in an school unit, which are: (1) integrate the values of the characters in the whole school management activities; (2) integrating the values of the characters in theh overall school performance activity; (3) integrating the value character value to the overall performance of personel activities; (4) integrate the values of the characters on the overall activities of educational services; and (5) integrating the values of the characters in the whole learning activities.⁹

Kutipan tersebut memberikan standar manajemen pendidikan ketika dikaitkan dengan karakter. Dimana manajemen pendidikan berbasis karakter setidaknya memiliki standar, yaitu;

⁹ Culberston, *Character Education: Teaching Values for Life*, Chicago: Science Research Asociater Inc, 1982, hlm.190.

1. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada semua aspek kegiatan manajemen. Seperti membuat perencanaan strategis selama lima tahun ke depan dengan menyusun capaian indikator karakter beserta evaluasinya;
2. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada seluruh capaian kinerja stakeholders dengan masing-masing kompetensinya. Seperti melakukan penilaian sikap, komitmen, profesionalisme dan tanggungjawab selama melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai petugas;
3. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada seluruh capaian kinerja lembaga. Seperti menjalin kerjasama dengan lembaga lain, studi lintas negara, prestasi anak didik, akreditasi lembaga dan sebagainya;
4. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada semua kegiatan layanan pendidikan. Seperti membuat fasilitas multimedia yang baik, memberikan pelayanan total kepada stakeholders dan lain-lain;
5. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada semua kegiatan pembelajaran. Seperti mengkonversi materi dasar tentang akhlak kepada semua pelajaran saat pembelajaran, membuka kegiatan belajar mengajar dengan doa.

Pendapat ini kemudian didukung oleh Hoover (2003):

*Success in the process of forming the character of an educational unit graduates will be determined not by the strength of the learning process., but will be determined by the strength of its management, which implies that the quality of graduates character has a strong dependence on the quality of school management. This is because the process of character formation should be integrated into various forms of school activities.*¹⁰

Pendapat Hoover ini dapat dibedakan menentang dari pendapat para pengamat manajemen pendidikan lainnya yang terlalu banyak memfokuskan konsep manajemen pada ranah pembelajaran saja, dengan mengabaikan aspek yang lebih penting lainnya seperti mutu dan karakter. Hoover, mengatakan bahwa proses pembentukan karakter anak didik bukan ditentukan oleh kekuatan proses pembelajaran, namun ditentukan oleh manajemen lembaga pendidikannya. Dengan kata lain, kualitas lulusan tergantung pada model manajemen

¹⁰ Gary L. Hoover, *Individualized in Education of Character*, USA: Parkland Dissertation, 2013, hlm. 29.

yang diterapkan. Hal ini disebabkan karena menurutnya pendidikan karakter seharusnya diintegrasikan ke dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah, baik melalui pengajaran, pembiasaan, maupun kultur sekolah.

Manajemen pendidikan berbasis karakter, tentu bukan sekadar teoritis. Juga memerlukan kajian implementatif sebagai bagian pelaksanaan dalam manajemen. Pola manajemen pendidikan berbasis karakter bertumpu pada sebuah proses untuk memberikan dukungan kepada anak didik untuk membentuk karakternya dengan benar serta mengabdikan tuntutan tujuan pendidikan secara menyeluruh. Dari itu, bentuk implementasi manajemen pendidikan tersebut terfokus pada lima komponen manajemen, yaitu *input*, proses, *output*, *outcome* dan tujuan.¹¹

11 Implementasi manajemen seperti ini, hakikatnya telah melalui kajian strategi penting dan telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga sekolah di Indonesia. Diantara strategi tersebut adalah; 1) strategi optimalisasi *input*, meliputi a) strategi menyatukan pikiran, b) strategi pemberdayaan sumber daya internal dan eksternal lembaga, c) strategi mengukuhkan komitmen. 2) strategi pada aspek efektivitas proses manajemen dengan menerapkan; a) strategi penciptaan tatanan kehidupan dan keiatan lembaga berbasis karakter, b) strategi integritas nilai karakter pada layanan lembaga pendidikan, c) strategi pembelajaran berbasis karakter dengan pendekatan integritas sesuai kurikulum pendidikan. 3) strategi peningkatan

Dengan mengacu pada kelima komponen tersebut, manajemen pendidikan berbasis karakter hanya bisa tercapai dengan cara; 1) melakukan tahapan efisiensi input sampai dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran proses; 2) efektivitas proses sampai menghasilkan harapan yang ingin dicapai; 3) produktivitas proses dari hasil yang telah memberikan dampak positif, bermutu dan memiliki sumber dana yang cukup; 4) terdapat relevansi antara hasil dengan dampak atau output yang dihasilkan.

Pertama, aspek efisiensi input pada proses persiapan manajemen pendidikan adalah komponen *instrumental* dan *environmental input* yang dimasukkan dalam tahap perencanaan dalam manajemen. Dimana pembuat/manaje pendidikan menetapkan intrumen, alat atau landasan dalam membuat perencanaan dengan bertumpu pada pembinaan karakter. *Kedua*, efektifitas proses. Yaitu dengan cara melakukan internalisasi nilai karakter pada setiap tahapan manajemen, memberikan penekanan (*stressing*) dengan cara membuat aturan tentang

produktivitas output dan outcome dengan menggunakan cara optimalisasi hasil. Lihat dalam Asep Saepul Hidayat, *Manajemen Sekolah Berbasis Karakter*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm.13-14.

kedisiplinan dan melakukan integrasi karakter yang berhubungan pada seluruh bentuk kegiatan pembelajaran.

Ketiga, hasil proses dari implementasi manajemen pendidikan berbasis karakter diantaranya adalah 1) menciptakan iklim, kebiasaan, aturan yang berbasis karakter, 2) menciptakan budaya pendidikan yang berorientasi pada karakter, 3) menciptakan sistem pembelajaran berbasis karakter, dan 4) membentuk peserta didik memiliki karakter yang mulia. *Keempat*, dampak yang dihasilkan dari dari proses implementasi manajemen pendidikan berbasis karakter adalah 1) terbentuknya sifat atau karakter pribadi peserta didik yang mulia, 2) terbentuknya karakter lembaga yang bermutu, 3) terbentuknya karakter daerah atau lingkungan baik internal maupun eksternal yang dihormati dan, 4) terbentuknya karakter bangsa yang bermartabat secara internasional.¹²

12 Dari proses ini akan melahirkan komponen-komponen keberhasilan sebagai indicator. Diantara indicator keberhasilan itu adalah dilihat dari beberapa hal meliputi, 1) indicator pada efisiensi input manajemen, 2) indicator efektifitas proses manajemen, 3) indicator produktivitas proses output manajemen, 4) indicator *outcome-goal*, 5) indicator realisasi dampak dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelas lihat Asep Sarpul Hidayat, *Manajemen Sekolah Berbasis Karakter*, hlm. 17.

C. Model Manajemen Pendidikan Karakter

Secara implementatif, konteks manajemen pendidikan pada pembinaan karakter anak didik, pada dasarnya, merupakan usaha “kondisionalisasi” atau pengkondisian peserta didik beserta seluruh stakeholders lembaga pendidikan agar dapat melaksanakan prinsip karakter yang luhur. Implementasi karakter yang dipraktekkan didapat dari hasil kesadaran tentang pentingnya nilai kehidupan, sosial, moral, etika, sekalipun pada mula pelaksanaannya bersifat terpaksa atau dipaksa oleh kebijakan institusi.¹³

¹³ Lebih rinci lagi, menurut Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, integrasi karakter dalam pendidikan dapat dilakukan pada kegiatan pembelajaran, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar, kegiatan kurikuler dan atau ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat, penilaian keberhasilan, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan serta tahapan pengembangan.

Dengan aturan ini, maka manajemen pendidikan berbasis karakter bukan hanya pada wilayah kognitif, tapi juga menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata setiap hari. Lihat dalam Ahmad Salim, *Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah (Sebuah Konsep dan Penerapan)*, Jurnal Tarbawi, Vol.1 No. 2, 2015, hlm. 42. atau lihat juga dalam Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, hlm. 4.

Kembali pada fungsi dan unsur manajemen, ketika dikaitkan dengan karakter, maka unsur manajemen pendidikan meliputi *planning*, *action* dan *evaluating* (evaluasi hasil). Secara tidak langsung, manajemen pendidikan berbasis karakter meliputi; 1) bagaimana pendidikan karakter direncanakan (*planning*), bagaimana pendidikan karakter dilaksanakan (*actuating*) dan bagaimana pendidikan karakter dikendalikan (*evaluation*). Secara gamblang, komponen tersebut dibahas sebagai berikut.

1. Perencanaan Pendidikan Karakter

Dalam perencanaan, merupakan tahap perumusan perangkat karakter yang dianalisis, dikristalisasi dan disusun menggunakan sumber-sumber ideologi bangsa, perundangan dan pertimbangan teoritis lainnya.¹⁴ Sebab karakter merupakan langkah awal untuk memperkenalkan anak didik pada nilai-nilai budaya, norma dan moral. Maka jika dibawa pada ranah lembaga pendidikan, setidaknya unsur-unsur perencanaan termuat pada; tujuan, sasaran kegiatan, substansi kegiatan,

14 Muchlas Samani & Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm.111.

pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terkait sebagai tenaga kependidikan, mekanisme pelaksanaan serta fasilitas pendukung.¹⁵

Dari asumsi ini, maka dalam proses perencanaan pendidikan karakter meliputi beberapa hal.

- a. Melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis kegiatan pendidikan yang dapat merealisasikan pendidikan karakter supaya dikuasai dan dapat dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pendidikan karakter anak didik direalisasikan dalam bentuk kegiatan; memadukan dengan mata pelajaran, memadukan dengan proses manajemen output dan memadukan melalui kegiatan lainnya.
- b. Mengembangkan materi pembelajaran agar dapat mencerminkan karakter, baik memberikan stimulan berbicara yang sopan, bersikap yang baik dan bergaul dengan benar.
- c. Mengembangkan rancangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah karakter (tujuan, materi, fasilitas, fasilitator, pendekatan pelaksanaan dan evaluasi)
- d. Menyiapkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan program pembentukan karakter

15 Pupuh Fathurraohman, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 193

bagi anak didik. Fasilitas tersebut dapat berupa kajian-kajian buku berkonten moral, perfilman, multimedia bernuansa moral dan lain-lain

- e. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terkait implementasi nilai-nilai pendidikan karakter, baik berupa rencana jangka pendek atau jangka panjang.

Dalam literatur lain, Ahmad Salim menambahkan unsur ke enam yaitu sosialisasi pendidikan karakter berdasar output dan dimasukkan dalam proyeksi kebutuhan sumber daya manusia untuk memenuhi standar kompetisi global.¹⁶ Secara tidak langsung, Salim sebenarnya ingin mengatakan bahwa harus ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan integrasi karakter dalam tahap perencanaan. Bisa jadi, perencanaan ini masuk dalam kategori perencanaan makro.

16 Ahmad. A. Salim & R. Zainuddin, *A Cognitive tool to Support Mathematical Communication in Fraction Word Problem Solving*, Wseas Transactions on computers, Vol. 7, No. 4, hlm. 228-236.

2. Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Pada tahap pelaksanaan, nilai-nilai karakter lebih dominan dikembangkan melalui pengamalan belajar (*learning ezperiences*) dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter anak didik. Maka dalam proses pembelajaran nilai karakter ini dapat dibentuk dari beberapa unsur penting, yaitu dari sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada setiap unsur terdapat dua jenis pengamalan belajar nilai karakter yaitu penerapan pengalaman belajar yang terstruktur dan habituasi yaitu pembiasaan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku.¹⁷

Secara umum, penerapan atau pelaksanaan pendidikan karakter dalam kerangka manajemen pendidikan, dapat ditempuh melalui empat strategi yakni *pertama*, melakukan integrasi melalui konten pendidikan karakter yang dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran. *kedua*, melakukan integrasi holistik ke dalam kegiatan sehari-hari. *Ketiga*, melakukan integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan yang direncanakan. *Keempat*, membangun kerjasama dan kounikasi dengan lembaga lain,

17 Muchlas Samani, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, hlm.112.

keluarga anak didik, lingkungan dan lembaga lain yang terkait.

a. Integrasi ke seluruh mata pelajaran

Nilai-nilai karakter baik terkait dengan sikap pribadi, keluarga, lingkungan sampai pada bangsa diintegrasikan ke dalam setiap bahasan mata pelajaran yang dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini memuat tentang indikasi kearah pengembangan karakter berupa perkiraan tindakan-tindakan yang akan dilakukan seperti membina, membentuk dan mengembangkan sifat karakter anak didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selain itu juga, pengembangan terjadi pada aspek materi standar, indikator hasil belajar dan penilaian. Kompetensi dasar bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik, materi standar berfungsi untuk memaknai dan memadukan kompetensi dasar dengan nilai karakter, indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan karakter, sedangkan penilaian berfungsi untuk mengukur pembentukan karakter pada setiap kompetensi.¹⁸

Dengan paparan ini, maka tugas pendidik adalah memastikan dalam rencana pembelajaran

18 E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm.78.

yang disusun mengandung nilai pengembangan karakter anak didik. Mereka dituntut membuat rencana pembelajaran dengan optimal dan dengan hasil yang maksimal. Rencana pembelajaran tersebut dianalisis dengan memadukan antara tujuan edukasi lembaga dengan nilai karakter anak didik.

- b. Integrasi holistik ke dalam kegiatan
- Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan di dalam lembaga, yang disusun berdasarkan rencana lembaga ataupun organisasi anak didik. Beberapa nilai karakter yang ditemui adalah menonjolkan sikap keteladanan di lingkungan pendidikan, melibatkan seluruh ekosistem lingkungan pendidikan, mengembangkan dan memberi ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi anak didik melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, memberdayakan manajemen dan tata kelola serta mempertimbangkan norma dan tradisi.¹⁹

19 Keteladanan merupakan bentuk sikap sehari-hari yang tidak dapat deprogram karena terkait dengan ruang dan waktu. Keteladanan erat kaitannya dengan sikap pendidik dan tenaga pendidik dalam memberikana contoh melalui tindakan yang baik, agar dapat ditiru dan diteladani oleh anak didik, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat luas. Misalnya, nilai kedisiplinan, kebersihan dan kerapian, kesopanan, jujur dan bekerja keras.

Sedangkan yang berkaitan dengan aspek

- c. Integrasi ke dalam kegiatan terprogram
- Yang dimaksud dengan kegiatan yang terprogram adalah protokoler yang dibuat oleh lembaga untuk mengatur anak didik agar memiliki dan menerapkan sikap nilai karakter sehari-hari. Beberapa pengintegrasian tersebut adalah, *pertama*, integrasi pada kegiatan rutin lembaga. Seperti mengadakan kegiatan terjadwal dan dilakukan secara terus-menerus, misal upacara pada hari kenegaraan, shalat dhuha berjemaah, berdoa sebelum setelah selesai pembelajaran, dan sebagainya. *kedua*, kegiatan yang sifatnya mendadak. Yaitu kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti menyapa saat berpapasan, membuang sampah pada tempatnya, berperilaku sopan kepada teman-temannya dan lain-lain.
- d. Membangun komunikasi dan kerjasama
- Kerjasama disini maksudnya adalah melakukan *check and balance* antar semua stakeholders dalam memastikan tercapainya tujuan nilai karakter. Fungsi kerjasama ini bisa jadi sebagai

pembelajaran, seperti berbahasa yang baik, rajin membaca, berpakaian rapi, memuji kebaikan, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Secara otomatis, kepribadian seorang pendidik akan menjadi teladan sekaligus diteladani oleh anak didik. Lihat dalam Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 169.

bahan perencanaan, bahan pertimbangan dan bahan evaluasi. Beberapa kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh banyak pihak, yaitu *pertama*, kerjasama dengan orang tua. Terkait dengan karakter, lembaga perlu mensosialisasikan segala bentuk kebijakan dan pembiasaan yang dilaksanakan oleh lembaga kepada orang tua dan masyarakat.²⁰ *Kedua*, kerjasama dengan lingkungan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan rasa nyaman agar terlaksana efektifitas belajar. Karena bagaimanapun, interaksi anak didik bukan hanya dengan lingkungan pendidikan saja, diluar itu, keluarga dan lingkungan sangat besar pengaruhnya.²¹

20 M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2010, hlm.53.

21 Tentu lingkungan pendidikan memerlukan iklim yang aman, tertib dan teratur, maka menjalin kerjasama dengan orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar perlu dilakukan. Sebab bagaimanapun, interaksi anak didik terjadi dengan lingkungan pendidikan, keluarga dan social. Lihat dalam Veithzal Rivai, *Education Manajemen; Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.621.

3. Evaluasi Pendidikan Karakter

Tujuan evaluasi secara umum untuk mewujudkan kinerja dan mutu yang efektif-efisien sebagai upaya mencapai visi-misi lembaga. Evaluasi ini mencakup tentang penilaian dan pengendalian sebagai fungsi ketiga dalam proses manajemen implementasi pendidikan karakter. Atau juga, proses ini berfungsi untuk menjamin kinerja yang ditetapkan agar tidak melenceng dari yang direncanakan. Penilaian dilakukan pada aspek-aspek nilai karakter yang telah dirumuskan baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat secara umum.²²

Dalam standar penilaian nasional, tahap akhir dari proses manajemen pendidikan ini terletak pada pengawasan sebagai bagian dari evaluasi. Pengawasan menjadi kunci keberhasilan dari seluruh aspek manajemen pendidikan. Karena pengawasan melihat seluruh aspek secara komprehensif, menelusuri kekurangan dan kelebihan, melihat mutu atau tidak bermutu. Pada posisi ini, pengawasan merupakan upaya mengamati secara sistematis dan terus menerus. Langkah-langkah dalam pengawasan adalah:

22 Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm.191-192.

- a. Menyepakati indikator evaluasi dihubungkan dengan nilai karakter dan tujuan;
- b. Menyusun instrumen penilaian;
- c. Melakukan inventarisir terhadap pencapaian melalui indikator;
- d. Baru melakukan analisis dan evaluasi; serta
- e. Melakukan rekomendasi atau tindak lanjut.²³

Evaluasi (penilaian, pengawasan dan pengendalian) adalah elemen yang harus dilakukan terus menerus dan berkelanjutan untuk mengetahui, memantau dan melihat perkembangan mutu karakter baik berupa skor, angka atau nilai yang dikonversi ke dalam penilaian hasil belajar. Penilaian dalam pendidikan karakter secara rinci dibahas di bawah ini.

a. Penilaian Program

Segala bentuk program pendidikan diarahkan dan diprioritaskan pada program pembelajaran karakter. Aspek-aspek yang dinilai pada program pendidikan karakter adalah a)

23 Lihat dalam lembar pedoman pelaksanaan pendidikan nasional pada Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2011, hlm.ix.

menyusun perencanaan program, b) problem dan isu-isu aktual dalam meramu manajemen pendidikan, c) memberikan kewenangan kepada orang tua, lingkungan dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan penilaian terhadap program kegiatan lembaga, d) mengintegrasikan antara program lembaga pendidikan dengan kegiatan yang hidup di masyarakat untuk mengukur peran anak didik.²⁴

b. Penilaian Proses

Penilaian proses bertujuan untuk menilai mutu dan kompetensi anak didik, baik yang tertera dalam kurikulum, standar pembelajaran maupun praktik di lapangan. Salah satu bentuk penilaian pendidikan karakter adalah menilai efektifitas pembelajaran beserta metodenya, peran dan kinerja tenaga pendidik dan relevansi kurikulum. Proses merupakan upaya untuk mencapai tujuan. Maka proses dalam evaluasi dimaksudkan untuk menilai prosesnya, bukan hasilnya.

Dalam melakukan penilaian proses, peran obyek (anak didik atau pelaku kebijakan) lebih dominan. Artinya, anak didik memiliki peran

²⁴ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 194.

untuk menganalisis apakah pembelajaran di dalam kelas dan metode yang diterapkan oleh pendidik, telah efektif atau tidak. Sementara komite, atau pembuat keputusan, bisa membentuk tim yang melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar untuk menilai proses pendidikan karakter.

c. Penilaian hasil

Penilaian hasil yang dimaksud adalah mengukur perubahan karakter yang telah terbentuk oleh anak didik. Karakter yang terbentuk ini dibagi atas dua hal, yaitu kekuatan atau karakter yang telah berhasil dimiliki oleh anak didik dan kelemahannya, kenapa anak didik tidak kadang memiliki kemampuan karakter.

Secara rinci, penilaian hasil lebih bertumpu pada aspek sikap, karakter diri, kompetensi, diferensial dan semantik. Ini adalah indikator standar yang umumnya dilakukan di lembaga pendidikan.²⁵ Setiap penilaian hasil pendidikan karakter dibentuk dalam skala prioritas, kecil dan besar.

²⁵ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 200.

D. Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter

Bagian ini dipaparkan mengenai penerapan pendidikan karakter dengan menjadikan budaya sebagai pendekatannya. Teori yang telah dipaparkan sebelumnya, menjadi bahan analisis pada tataran praktik di lapangan. Tentu sebagai teori, terkadang menemukan kendala baik berupa pengurangan, penambahan, relevansi maupun penyesuaian pada titik tertentu. Pemaparan mengenai kajian implementasi memungkinkan terjadinya pemahaman yang utuh. Beberapa suguhan implementasi ini diambil dari penelitian di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan di awal, manajemen pendidikan berbasis karakter terdiri dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan babak awal untuk merancang segala kegiatan selama beberapa tahun ke depan. Sifat perencanaan tidak ada yang final, pada pelaksanaannya terkadang menyimpang dari yang rencanakan. Terkadang pula, memerlukan perbaikan pada waktu yang cepat, maka disinilah letak keahlian dan profesionalitas dibutuhkan.

1. Perencanaan Tahap Implementasi

Secara umum, perencanaan sangat menentukan terhadap tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, isi program dan lain sebagainya. Dalam tahap perencanaan, Novan Ardi Wiyani dalam bukunya menerangkan, setidaknya tahap perencanaan pendidikan karakter meliputi;

- Melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis kegiatan yang dapat merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai dan dapat dilaksanakan oleh peserta didik pada kehidupan sehari-hari
- Mengembangkan materi pembelajaran untuk semua jenis kegiatan
- Mengembangkan rancangan pelaksanaan setiap kegiatan meliputi; tujuan, materi, fasilitas, jadwal, fasilitator dan evaluasi
- Menyiapkan fasilitas pendukung terhadap program pembentukan karakter
- Menyusun rencana pembelajaran.²⁶

²⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 81.

Berdasar pada teori ini, SMP Muhammadiyah 2 Malang menerapkan suatu pendekatan perencanaan pendidikan karakter dengan menggunakan basis *persuasion management*. Suatu pendekatan untuk merangkai manajemen pendidikan menjadi lebih tertata dan mudah untuk dilaksanakan. Pendekatan ini menekankan aspek pelibatan semua stakeholders baik melalui aspirasi, *sharing*, serap pendapat maupun pendekatan. Sehingga, dilakukan beberapa kebijakan yang sangat penting yaitu sosialisasi kebijakan, membentuk tim, penyiapan tenaga pendidik dan review dokumen. Langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan karakter dilakukan sebagai berikut.

a. Model Penentuan Nilai Karakter

Penentuan nilai pendidikan karakter, tentu merupakan hal yang subyektif. Bisa jadi, antar lembaga pendidikan memiliki berbeda makna dan perspektif. Perbedaan ini tergantung pada situasi sosial, letak geografis dan gaya kepemimpinan. Sekalipun diatur pada skala pusat, namun aturan tersebut memiliki jangkauan umum.²⁷ Pada proses selanjutnya

27 Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 20 Tahun 2018

adalah membentuk tim khusus pelaksana pendidikan karakter. Di Muhammadiyah 2 Malang, tim tersebut dibentuk untuk melakukan tugas administratif, perencanaan, pelaksanaan namun tidak pada dataran evaluasi.²⁸

Tim pelaksana pembuat perencanaan pendidikan karakter bertugas untuk melakukan identifikasi jenis kegiatan agar pendidikan karakter dapat dilaksanakan dan dikuasai pada kehidupan sehari-hari baik berkaitan dengan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Hasil identifikasi ini, baru kemudian nilai-nilai karakter yang selaras dan dapat dikembangkan dengan sistem budaya dan -tentu- searah dengan arahan standar nasional tentang tujuan

tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Aturan ini memuat jelas tentang gerakan pendidikan di bawah naungan satuan pendidikan khusus yang diarahkan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah raga dan olah pikir dengan melibatkan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Terobosan ini kemudian lebih akrab disebut dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Lihat lebih jelas dalam Ayu Purry Purnama, Irawan Suntoro dan Helmi Yanzi, *Implementasi Program PPK dalam Membentuk Sikap Sosial Peserta Didik di SMAN 14*, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 5, No.2, 2018, hlm.1-14.

28 Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000, hlm. 49.

perumusan pendidikan karakter yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas dan gotong royong.

Setelah kerja tim selesai dengan mengantongi identifikasi dan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan kebutuhan internal dan satu atap dengan pondasi standar nasional, maka hasil tersebut sekaligus dijadikan program atau kegiatan lembaga selama jangka waktu tertentu.

b. Manajemen SDM

Tahap berikutnya sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah 2 Malang dalam melakukan manajemen pendidikan karakter adalah dengan mengalihkan fokus pada tingkat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Istilah tenaga pendidik adalah kata lain dari pengajar, guru, dosen dan lain-lain, sedangkan tenaga kependidikan adalah bagian administrasi, peningkatan kegiatan internal, kesiswaan/kemahasiswaan dan lain sebagainya. Tahapan ini penting dilakukan, mengingat pendidik besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak didik dalam mengembangkan karakternya secara utuh.²⁹

²⁹ Pendidik merupakan *golden process and character building* dalam pendidikan. Sebagaimana diuraikan oleh Ahmad Yani Dasuki sebagaimana dikutip oleh Syaiful Anwar bahwa lingkungan yang berkembang

Melihat peran dan eksistensi pendidik yang begitu kuat dalam mendidik karakter, maka di Muhammadiyah 2 Malang melakukan aneka pelatihan baik berupa workshop, pelatihan intensif, seminar, kompetensi dan lain-lain. Tugas utama pendidik dalam membina karakter adalah membuat kondisi lingkungan belajar menjadi berkarakter, menyenangkan dan memberikan ruang gerak yang luas kepada anak didik untuk membentuk karakter sesuai bawaannya.³⁰

secara dinamis, adalah proses berkelanjutan yang memiliki tantangan dan hambatan dalam mencerminkan karakter bangsa. Dengan demikian, karakter social dan bangsa, bergantung pada pembentukan nilai pendidikan karakter di dunia pendidikan. Sementara di dunia pendidikan itu sendiri, pendidiklah yang menjadi pengarah karakter. Lihat dalam Syaiful Anwar, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa*, Jurnal al-Tadzkiyyah, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 167.

- 30 Produk dari segala bentuk pelatihan kompetensi atau profesionalitas pendidik dilakukan melalui perangkat pembelajaran yang dibuat oleh semua pendidik mata pelajaran yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religious, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Selain itu, pelatihan tersebut diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Karena mereka memiliki hubungan yang saling mempengaruhi terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, ketersediaan, fasilitas dan kebijakan non sektoral. Lihat dalam Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 66.

c. **Review pembelajaran dan tenaga pengajar**

Setelah melalui kegiatan pengembangan kompetensi pendidik dan kependidikan dilakukanlah kajian-kajian program untuk penguatan pendidikan karakter. Pendidik menyiapkan konsep pembelajaran seperti rencana pembelajaran dan target yang ingin dicapai. Kemudian, tenaga kependidikan dan tim pengembangan karakter melakukan review terhadap rencana pembelajaran, program-program dan kegiatan jangka pendek maupun panjang.

Di SMP Muhammadiyah Malang, segala kegiatan dan kebijakan dikategorikan kembali ke dalam kegiatan yang lebih spesifik. Kegiatan yang kurang akan ditambahkan, sedangkan yang sudah memenuhi standart pelaksanaan, dipertahankan untuk dilihat hasil yang dicapai. Karena bagaimanapun, keefektifan perencanaan harus menghasilkan program yang berpusat kepada anak didik, mencakup program pembelajaran, pengajaran, kegiatan, keuangan, pengembangan potensi, laboratorium dan kepastakaan.³¹

31 Antara review dengan evaluasi berbeda jauh. Kalau review dilakukan sebelum segala perencanaan disahkan, sedangkan evaluasi dilakukan setelah semua rencana dilaksanakan. Fungsi review adalah

d. Sosialisasi Akhir

Tahap akhir perencanaan manajemen pendidikan karakter adalah sosialisasi. Bahan yang disosialisasikan dapat berupa kebijakan, *re-branding* maupun rencana-rencana alternatif lainnya. Sosialisasi melibatkan banyak pihak agar pendidikan karakter dapat diterapkan dengan optimal. Seperti anak didik, pendidik dan kependidikan, seluruh stakeholders, wali anak didik, lingkungan jika ada kaitannya dengan lembaga, masyarakat dan semua pihak yang memiliki keterkaitan. Karena sosialisasi merupakan langkah penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan karakter.³²

2. Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Karakter

Seperti halnya dalam kerangka teori yang dipaparkan diatas, terdapat banyak model pelaksanaan dalam manajemen pendidikan

untuk mengambil kebijakan sebelum diputuskan, sedangkan evaluasi berfungsi memperbaiki kekurangan dan kelemahan. Keduanya memiliki tujuan untuk mencapai efektifitas dalam melakukan manajemen pendidikan. Lihat dalam Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000, hlm.48.

32 Lihat dalam Mulyasa, *Pendidikan Karakter*, hlm. 18,

dengan pendekatan karakter. Begitupun di SMP Muhammadiyah 2 Malang, cara yang ditempuh untuk melaksanakannya terdiri dari empat model; *pertama*, melakukan integrasi konten pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran. *kedua*, integrasi pendidikan karakter ke semua kegiatan. *Ketiga*, integrasi pendidikan karakter ke dalam program. *Keempat*, membangun komunikasi dan kerjasama dengan semua elemen.³³ Mari kita bahas satu persatu, sebagaimana diterapkan oleh SMP Muhammadiyah 2 Malang.

a. Integrasi isi (*integrate content*).

Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran diindikasikan pada rencana pembelajaran (dalam tingkat sekolah, rencana pembelajaran berbentuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pada tingkatan perguruan tinggi, disebut dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester) yang didalamnya -setidaknya- memuat tentang manajemen kelas, model, metode dan pembelajaran tematis. Pengintegrasian ini merupakan pemahaman karakter pada skop

33 Novan Ardi Wiyani, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm.78.

kelas atau pembelajaran kelas. Setiap mata pelajaran mengandung nilai-nilai karakter.

Pengintegrasian ini berasumsi bahwa seluruh pelajaran memiliki tujuan untuk menguatkan karakter, misi dan misi yang jelas terfokus pada karakter dan semua elemen terutama pendidik mampu menguasai dan mempraktekan sikap yang melambangkan nilai-nilai karakter. Sebagaimana disampaikan oleh Mulyasa, bahwa untuk mengintegrasikan pendidikan ke dalam semua pelajaran harus didukung oleh kemampuan pendidik dalam menerapkannya. Karena pendidik yang memiliki otoritas dan berhadapan langsung dengan anak didik.³⁴

b. Integrasi kegiatan (*integrate activities*)

Setiap lembaga pendidikan tentu memiliki kegiatan baik terprogram ataupun tidak. Kegiatan terprogram seperti beragam kegiatan

34 Beberapa elemen yang harus ada di dalamnya adalah pendidik sebagai elemen kunci yang berperan melakukan transfer keilmuan, budaya dan moral. Selain tenaga kependidikan sebagai elemen pendukung berperan sebagai pihak yang membenarkan atau meyakinkan anak didik tentang pendidikan karakter yang didapatkannya. Terakhir adalah wali dari anak didik beserta lingkungannya sebagai elemen pengaruh, yang berperan untuk mempengaruhi pemahaman dan pengamalan karakter anak didik. Lebih jelas lihat dalam Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 59.

yang diinisiasi oleh anak didik, pelatihan oleh tim manajemen lembaga, shalat dhuha berjemaah, kegiatan *tahlil* dan membaca ayat suci al-Quran dan sebagainya. Sedangkan kegiatan yang tidak terprogram, semisal kegiatan yang tidak terencana sebelumnya, seperti kegiatan yang dibuat karena situasi tertentu. Maka pada ranah ini, pendidikan karakter harus dimasukkan pada dua bentuk kegiatan ini.³⁵

Penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan memperhatikan hal-hal berikut; di dalam keseharian pembelajaran, mempraktekan sikap keteladanan di lingkungan pendidikan, melibatkan seluruh ekosistem yang baik, memberikan ruang yang luas pada pengembangan potensi dan bakat anak didik, memberdayakan tata kelola administrasi dan menjalankan norma serta tradisi. Seperti di SMP Muhammadiyah 2 Malang, integrasi dalam kegiatan sehari-hari dikategorikan ke dalam kegiatan tidak terprogram yang merupakan pembiasaan tidak terjadwal dalam kegiatan khusus. Bentuk kegiatannya terpolos melalui keteladanan dan pembiasaan.³⁶

35 Doni Koesoema Albertusl, *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*, Yogyakarta: Kanisius, 2015, hlm. 67.

36 Keteladanan yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 2 Malang terdiri pada dua bentuk; keteladanan

Selain pendidik atau tenaga pegajar, keteladanan yang menarik adalah sikap keteladanan yang timbul dari anak didik lainnya. Biasanya, anak didik yang diteladani, adalah yang berprestasi dan mendapatkan pujian, serta hadiah karena kemampuan dan karyanya. Karena memang, salah satu model pendidikan karakter yang efektif yaitu melalui pujian dan hadiah yang baik dan diberikan dalam penguatan karakter yang positif.³⁷

Setelah keteladanan, model pembelajaran pendidikan karakter yang kedua adalah habituasi atau pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu pendekatan yang sengaja dilakukan secara

dari pendidik dan kerabat dekat atau teman satu angkatan. Keteladanan pendidik sesuai dengan tori yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan figur yang dapat melahirkan perilaku dan sikap bagi anak didik sebagai suri teladan. Peran pendidik dalam hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan. Lihat dalam Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 169.

- 37 Peran anak didik lain memang tampak sepele dalam membina pendidikan karakter, namun pengaruhnya sangat menentukan bagi baik-buruknya anak didik. Dalam penelitiannya Mulyasa, teman sebaya pengaruhnya bahkan bisa jadi melebihi pengaruhnya tenaga kependidikan dan pendidik. Karena teman anak didik lain, memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan terjadinya transfer karakter. Peserta didik lain dapat termotivasi positif atas nilai-nilai yang diajarkan. Lihat dalam Mulyasa, Muchlas Samani dan Hariyanto, *Pendidikan Karakter*, hlm. 146.

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tidak disangka kalau yang dikerjakan adalah hal yang biasa.³⁸ Bentuk pembiasaan tersebut diklasifikasi dalam dua bentuk yaitu kebiasaan yang terprogram dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan tidak terprogram dalam kegiatan sehari-hari.³⁹

38 Tidak semua kegiatan yang memiliki tujuan pembentukan karakter dikatakan suatu kebiasaan. Karena kegiatan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dilakukan oleh banyak orang, tidak dikatakan kebiasaan. Maka untuk menjadikan sikap karakter anak agar menjadi biasa, harus diulang-ulang oleh semua elemen. Lihat dalam Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 166.

39 Secara implementatif, di SMP Muhammadiyah 2 Malang telah menerapkan dua model pembiasaan tersebut. Pada pembiasaan terprogram, diimplementasikan melalui aktivitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran dalam hal ini, banyak diperankan oleh pendidik sebagai pengarah atau fasilitator untuk membiasakan peserta didik dengan mandiri, kreatif, kritis dan bertanggungjawab, seperti kebiasaan membaca doa sebelum memulai dan menutup pembelajaran, mengajarkan komitmen dan ketepatan waktu dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan pembiasaan secara terprogram diterapkan melalui kegiatan rutin dan refleksi. Kegiatan rutin seperti upacara, jadwal piket, pengembangan diri dan shalat berjamaah. Bentuk kegiatan refleksi dapat diwujudkan dalam dalam 15 budaya sekolah yang inovatif seperti berjabat tangan, budaya santun, senyum, budaya spiritual, budaya bersih, budaya kerjakeras, budaya jujur, budaya tepat waktu dan lain sebagainya. lihat Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm.169,

Tentu, pembiasaan tersebut harus didukung oleh model pertama yaitu keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan terimplementasikan dalam tingkatan paralel, bukan hierarkhis. Jadi tidak ada yang didahulukan ataupun dinomorduakan, akan tetapi harus sama-sama diterapkan. Kebiasaan yang diciptakan dalam ruang pembelajaran ataupun lingkungan pendidikan, akan hampa bila pada aspek keteladanan berdiri pada ruang sebaliknya.

c **Integrasi program** (*integrate the programs*)

Pada aspek ini kegiatan di lembaga pendidikan dikategorikan sebagai kegiatan yang rutin yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara terus menerus dan konsisten. Biasanya, bentuknya bermacam-macam, ada yang masuk agenda lembaga ada pula yang disusun oleh inisiatif peserta didik seperti kegiatan ekstrakurikuler, layanan dan konseling. Salah satu contoh yang masih segar belakangan yang merupakan perumpamaan dari kegiatan rutin yaitu pelaksanaan pendidikan di luar jam kegiatan belajar mengajar, yakni program *full day school* ataupun kegiatan lain.⁴⁰

40 Implementasi di SMP Muhammadiyah 2 Malang, yaitu memberikan waktu setelah jam sekolah dengan

d. **Komunikasi dan kerjasama** (*communication and cooperation*)

Komunikasi merupakan instrumen untuk meraih tujuan dan membuat segala perencanaan menjadi lancar. Termasuk diantara komunikasi adalah sosialisasi. Sedangkan muara dari diadakannya komunikasi adalah kerjasama dengan beberapa elemen yang dianggap dapat membantu terlaksananya pendidikan karakter. Diantaranya yaitu:

1) Komite Pendidikan

Di lembaga pendidikan, terutama yang tingkatan SLTP dan SLTA, komite memiliki peran terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter. Komite memberi dukungan dalam bentuk usulan, tenaga dan finansial. Hal demikian sesuai dengan peran komite pada lembaga pendidikan sebagai *supporting agency*.⁴¹

beragam simulasi, pelatihan, seni tari, kegiatan keagamaan dan lain-lain guna menumbuhkan keinginan untuk mempraktikkan pemahaman pendidikan karakter yang diperoleh baik dari model keteladanan maupun habituasi. Lihat dalam Muchlas Samani dan Hariyanto, *Pendidikan Karakter*, hlm. 146.

41 *Supporting Agency* merupakan istilah umum yang dipopulerkan oleh John Lock terkait dengan peran pemimpin dalam pendidikan. Arti dari istilah ini adalah bentuk dukungan yang kuat terhadap terlaksananya manajemen pendidikan dari semua aspek. Sebagai pemberi pendapat, diminta pendapat

Dan pemberi pertimbangan (*advisor agency*) yang difungsikan saat penyusunan dokumen kurikulum.

2) Kegiatan *parenting*

Kegiatan *parenting* sebenarnya lebih akrab disebut dengan kegiatan lembaga pendidikan yang didukung dan kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Kegiatan ini bertujuan agar antara pihak lembaga dengan orang tua menemukan titik tujuan yang sama untuk membentuk karakter anak didik ke arah yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri, kerjasama antara lembaga dengan orang tua akan membantu pelaksanaan pendidikan karakter. Sebaliknya, difensiasi keduanya dapat menghambat tujuan dari pendidikan karakter.

3) Masyarakat dan lingkungan sosial

Di SMP Muhammadiyah 2 Malang, menjadikan masyarakat sekitar yang terjangkau sebagai mitra sekaligus sebagian menjadi obyek kegiatan. Seperti bakti sosial, kerja bakti, kunjungan panti asuhan dan APSI. APSI adalah pelibatan kegiatan lembaga dengan

menjadikan masyarakat dan orang tua sebagai *tandem*. Biasanya, hal ini dibungkus dengan bentuk perlombaan.

Dengan demikian, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam memupuk dan mengembangkan pendidikan karakter merupakan model *suplement* yaitu melalui hubungan garis kemitraan yang saling membantu. Lembaga pendidikan menjalin hubungan dengan keluarga, organisasi, lingkungan sekitar, dan kelompok lain yang berpengaruh terhadap kesuksesan anak-anak dalam memahami dan mengembanakan pendidikan karakter.

3 Evaluasi Pendidikan Karakter

Pada hakikatnya, evaluasi secara teknis adalah menampung data penting terkait penyelenggaraan pendidikan antara pemimpin lembaga, tenaga pengajar, kependidikan, petugas serta mitra lainnya. Data-data dan informasi yang ditampung pada gilirannya dipakai untuk kepentingan identifikasi pencapaian tujuan, penyimpangan dan kelemahan agar dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan ke depan.⁴²

42 Selain itu, identifikasi sebenarnya bukan hanya pada wilayah kerjasama, melainkan semua sector mulai dari perencanaan apakah terlaksana atau

Maka dari itu, sistem evaluasi pada pendidikan karakter mencakup beberapa hal; penilaian proram, penilaian proses dan penilaian hasil dari manajemen pendidikan dengan pendekatan karakter. Berikut dijelaskan bagian-bagian tersebut.

a. Evaluasi Program

Evaluasi ini dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 2 Malang dengan cara menilai tingkat efektifitas program yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Program yang terlaksana, dievaluasi sejauh mana ketepatan dengan tujuan yang diharapkan, apakah melenceng jauh, atau tercapai. Sementara bagi program yang tidak terlaksana, dievaluasi mengenai faktor dan penyebab dilakukan penilaian.

tidak, pelaksanaan apakah dapat dilaksanakan dengan tepat atau kurang, kemudian apakah tujuan dari setiap rencana dan pelakasnaan dapat terwujud atau tidak. Begitupun dengan kinerja sumber daya seperti anak didik, pendidik dan semua stakeholders termasuk fasilitas. Itu semu masuk pada ranah evaluasi. Dalam Syaiful Sagala *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2000, hlm. 60.

Secara umum, laporan pelaksanaan program memuat tentang laporan rencana tindak lanjut program, dukungan dan hambatan, serta pembiayaan. Seperti yang diinstruksikan pemerintah, bahwa evaluasi program dilakukan dengan sistem evaluasi internal berupa angket, kuisioner, lembar survey ataupun yang serupa sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Proses

Penilaian proses bertujuan untuk menilai kualitas proses pendidikan karakter yaitu pembentukan kompetensi peserta didik dan tujuan-tujuan pembelajaran. Implementasi evaluasi proses yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan umumnya berupa penilaian kelas. Pada proses ini, peran tenaga pendidik merangkap sebagai pihak yang melakukan evaluasi. Penilaian kelas dilakukan secara terus menerus oleh tenaga pendidik dengan mengacu pada indikator pencapaian nilai budaya dan karakter.

Model evaluasi proses yang diterapkan di SMP 2 Muhammadiyah Malang adalah *anecdotal record* yaitu suatu model evaluasi proses dimana tenaga pendidik membuat catatan setiap kali mengisi pembelajaran di kelas,

perkembangan sikap dan perilaku, komitmen dan tanggungjawab serta nilai-nilai karakter lainnya. Tenaga pendidik memberikan tugas tertentu yang memuat tentang problem atau masalah yang diambil dari suatu fenomena dan diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya.⁴³

Menurut Mulyasa, evaluasi proses lebih efektif dan efisien dengan melibatkan peran orang tua dan anggota masyarakat atau sosial, selain juga tenaga pendidik dan kependidikan. Peran mereka dibutuhkan dalam semua tugas baik program maupun kegiatan, pengolahan data, pembuatan keputusan dan penggunaan hasil evaluasi proses pendidikan karakter. Namun di beberapa lembaga pendidikan, termasuk diantaranya SMP 2 Muhammadiyah Malang, dalam melakukan evaluasi proses tidak melibatkan orang tua dan anggota masyarakat. Evaluasi proses hanya dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang dinilai dari keseharian aktivitas kelas melalui angket maupun observasi penilaian sesuai dalam rencana pembelajaran (RPP).

43 Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, hlm. 207.

c. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil pada pendidikan karakter berbeda dengan evaluasi penilaian hasil belajar pada umumnya. Evaluasi hasil dalam manajemen pendidikan karakter bertumpu pada *notes*, yaitu tenaga pengajar tidak hanya diharuskan untuk memahami karakter anak didik beserta bakat dan kompetensinya, melainkan mereka juga harus mengetahui perubahan dan kemajuan sikap dan karakter anak didik. Disinilah yang menjadi pembeda dari evaluasi hasil lainnya.

Sebagaimana diterapkan oleh SMP 2 Muhammadiyah Malang ketika melakukan evaluasi hasil, yaitu dengan melakukan *notes* penilaian sikap dan perilaku anak didik dari semua tenaga pendidik dari proses pembelajaran. Hasil *notes* tersebut dibahas pada rapat evaluasi akhir semester. Dari situlah kelihatan beberapa kekurangan, kelemahan karakter, baik pada sikap maupun ucapan anak didik. Selain mengumpulkan *notes* tersebut, pada proses selanjutnya akan dibuat kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan kekurangan karakter.

BAB 5

Manajemen Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pada tahun 2005, Indonesia telah membuat terobosan baru dengan menjadikan kearifan lokal sebagai *value character based* atau basis nilai karakter dalam pendidikan nasional. Terobosan ini merupakan langkah nyata untuk melestarikan kearifan lokal melalui peran pendidikan. Manifestasi kearifan lokal dalam pendidikan diwujudkan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu dengan cara memberikan wewenang kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi di masing-masing daerah, termasuk juga mengembangkan sisi kearifan lokal.

Terobosan ini membawa dampak serius pada pengembangan kurikulum di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, mau tidak mau, semuanya harus menyesuaikan kurikulum dan seluruh kebijakan pada keberagaman potensi



lokal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana pada pasal 17 menyebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya setempat atau sosial budaya peserta didik.

Merespon terobosan signifikan ini, Jamal Ma'mur (2012) mengatakan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal diartikan sebagai komponen seluruh pendidikan dari semua aspek; kurikulum, metode, sarana dan prasarana dan lain sebagainya, dimanfaatkan untuk mengembangkan keunggulan lokal baik pada aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi, ekologi maupun bahasa, dimana semua komponen ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik.¹

1 Pengertian ini disadur dari beberapa pengertian pendidikan berbasis kearifan lokal baik dijelaskan dalam KTSP maupun pendapat tokoh pendidikan. Dalam KTSP sendiri, pendidikan berbasis kearifan lokal adalah metode pembelajaran dalam pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan sisi potensi dan kekayaan lokal setempat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kearifan lokal dimakna dengan kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku dan carapandang masyarakat yang kondusif dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal, sehingga dapat dijadikan kekuatan dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut para ahli, termasuk Ki Hajar

Pengertian ini merubah tatanan pendidikan dari yang semula mengesampingkan aspek potensi daerah (condong pada pengembangan potensi nasional) menjadi praktik pembelajaran yang bersifat kedaerahan. Anak didik diberikan fasilitas untuk mempelajari budaya lokal di daerah masing-masing. Penerapan ini sesuai dengan pendapat Made Pidarta (2007), mengatakan bahwa keberadaan pendidikan – salah satunya- bertujuan untuk menjadikan manusia atau anak didik berbudaya (memahami budaya daerah atau nasional). Secara tidak langsung, pembudayaan dalam pendidikan ini bukan hanya pada sisi kegiatan, proses pembelajaran ataupun tranfer dalam kelas dengan menyampaikan budaya saja, tapi juga menggunakan budaya tersebut agar anak didik menemukan makna, kreativitas, nilai sosial dan moral dan mendalam. Semua pendidik harus mengambil resiko dalam menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, dengan tetap menyisir sisi-sisi kearifan lokal.

Dewantara mengatakan yang dimaksud pendidikan kearifan lokal adalah muatan karakter pendidikan diselaraskan dengan keberadaan daerah atau lokal. Jamal Ma'rf, *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*, Yogyakarta: DIVA Press, 2012, hlm. 30.

Pada aspek pembelajaran, metode yang digunakan tentu harus sesuai dengan daerah tempat tinggal anak didik tinggal. Maka konsekuensinya adalah pembelajaran harus diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah anak didik. Hal ini bertujuan untuk menambah rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya dan membekali sikap mereka agar sejajar dengan nilai aturan yang berlaku di sekitarnya.²

Namun realitanya, menurut Naela Khusna (2018), materi pembelajaran yang disajikan selama ini cenderung menampilkan kearifan nasional (bukan lokal sesuai dengan daerah anak didik), sementara kearifan lokal daerah sendiri belum dikenalkan kepada anak didik. Padahal berdasar pada tujuan yang ditangkap oleh KTSP, pembelajaran kearifan lokal berdasar pada daerahnya masing-masing agar dapat dikembangkan, baru setelah menguasai, belajar kearifan lokal daerah lain.³

2 Nadlir, *Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.2, No.2 2014, hlm. 323

3 Apalagi pada kurikulum 2013, memang mengilustrasikan bahwa kearifan lokal harus diajarkan di semua tingkatan satuan pendidikan, namun secara implementasinya ada beberapa fakta; 1) hanya beberapa kearifan lokal yang diajarkan

Realita ini membawa pada problem klimaks, di mana peletakan diksi kearifan lokal tidak tepat pada tempatnya. Meskipun telah dibuat regulasi sedemikian rupa, namun pada dataran praktis masih meleset dari harapan. Maka dari itu, perlu dikaji pembahasan mengenai eksistensi kearifan lokal dalam pendidikan. Kajian ini akan dibahas tuntas mulai dari tinjauan teori, karakteristik sampai dengan signifikansi dan implikasinya dengan pendidikan.

A. Kearifan Lokal dalam Pendidikan

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kekayaan budaya lokal terbentuk dari prinsip hidup dan tradisi. Kajian kearifan lokal terkait erat dengan budaya dan kebudayaan sebagai hasil cipta manusia. Karena merupakan prinsip kebudayaan dan cipta karsa

yang termasuk pada ranah pengakuan nasional; 2) kearifan lokal diajarkan secara parsial kepada anak didik; 3) pembelajaran kearifan lokal tidak diajarkan secara menyeluruh sampai pada tahap praktik; 4) selain tidak menyeluruh, juga tidak dapat memberikan pengembangan apa-apa kepada anak didik, hanya sebatas pemahaman saja. lihat lebih jelas dalam penelitiannya, Naela Khusna, *Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar: Sebuah Kerangka Konseptual*, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol.1, No. 1 2018, hlm.49.

manusia, maka kearifan lokal tidak dapat dianggap *remeh*. Melainkan harus dilestarikan, dihormati dan dijaga oleh setiap generasi.

Jujun S. Suriasumantri (2003) memaknai kearifan lokal sebagai kata lain dari nilai budaya. Nilai budaya merupakan wujud dasar dari kebudayaan yang berasal dari gambaran nyata kegiatan manusia.⁴ Dengan pemahaman ini, dapat diambil pengertian bahwa kearifan lokal merupakan kegiatan sadar manusia yang tercermin dari nilai budaya sebagai konsensus. Sebaliknya, bila kegiatan manusia tidak mencerminkan nilai budaya atau bukan kegiatan manusia, maka hal demikian bukan makna kearifan lokal.

Hal serupa disampaikan oleh Wagiran (2013), konsep kearifan lokal memiliki prinsip bahwa diciptakan dari proses pengalaman panjang sebagai pedoman tingkah laku seseorang, berbasis pada lingkungan masyarakat

4 Secara tidak langsung, Jujun ingin menampilkan bahwa kearifan lokal berkaitan erat dengan budaya yang dijaga, dilestarikan dan dipupuk oleh masyarakat. Namun tidak semua budaya dikatakan kearifan lokal, hanya budaya yang berasan dari pengalaman atau kebenaran dalam kehidupan manusia yang berintegrasi dengan diri dan lingkungan yang dikatakan dengan kearifan lokal. Lihat dalam Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm.262.

setempat, bersifat terbuka (artinya, bisa menerima dan menolak), fleksibel, dinamis dan relevan dengan zaman.⁵ Dari pendapat Wagiran ini, penulis berasumsi bahwa definisi kearifan lokal berkisar pada aspek nilai-nilai positif yang berkembang dalam masyarakat lokal.

Definisi ini pula melahirkan pemahaman bahwa kearifan lokal selalu bersumber dari hidup manusia, sehingga menentukan ruang lingkupnya juga sangat luas. Namun demikian, kearifan lokal berbeda dengan kearifan radisional dan kearifan masa kini. Kearifan lokal juga tidak hanya tradisi dan aset daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, namun kearifan lokal menekankan pada lokalitas, daerah, aset daerah, budaya, adat istiadat, kebiasaan dalam suatu daerah. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya bersifat

5 Berdasar pendapat ini, maka ruang lingkup kearifan menurut Wagiran yaitu 1) bersifat terbuka, yaitu suatu sifat daerah yang terbuka lebar untuk dikembangkan, ditolak maupun diintegrasikan; 2) dinamis, suatu kondisi yang dapat berkembang seiring perkembangan zaman dari generasi ke generasi; 3) fleksibel, suatu kondisi dimana keberadaannya tergantung pada situasi tertentu, kondisi setiap manusia; 4) relevan, yaitu dapat diterapkan oleh generasi yang hidup pada masanya dan tidak bertentangan dengan norma saat itu. Lihat dalam Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2, No. 1 2012, hlm. 329.

tradisional, kearifan lokal bisa juga kearifan masa kini.

Berdasar nilai filosofis, kearifan lokal dibagi atas dua kategori; *pertama*, gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak. Maksud dari kategori pertama ini, kearifan lokal dimaknai sebagai pandangan, pengetahuan, nilai serta implementasi dari sebuah komunal masyarakat baik yang tercipta dari generasi dulu, hari ini maupun esok pada aspek pengalaman dan komunikasi dengan masyarakat lain. *kedua*, kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret. Yaitu kearifan lokal yang berupa benda-benda artefak dan bermakna simbolik. Kemudian, pada kategori ini, kearifan lokal identik dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan tuhan, tanda-tanda alam, lingkungan hidup, membangun rumah, upacara perkawinan, kelahiran anak, makanan, kesehatan, bencana alam, watak dan pendidikan. Sehingga secara spesifik, menurut Wagiran, ruang lingkup kearifan lokal adalah:

1. Ritual dan tradisi masyarakat
2. Mitos, legenda dan cerita rakyat yang dikenal oleh komunitas lokal di daerahnya
3. Cara komunitas lokal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosialnya

4. Norma-norma lokal di daerahnya
5. Kitab suci yang diyakini kebenarannya
6. Pengetahuan yang bersumber dari tetua adat atau tokoh sesepuh masyarakat setempat.⁶

Dari konteks ruang lingkup dan problem kearifan lokal tersebut, kearifan lokal memiliki peran penting dalam mengembangkan aset sumber daya, budaya dan ekonomi lokal melalui pendidikan. Keberadaan pendidikan mampu mengajarkan anak didik untuk dijadikan aset generasi bangsa yang mampu mengembangkan kearifan lokal. Maka disinilah letak peran signifikan pendidikan berbasis kearifan lokal diterapkan.

Secara makna, pendidikan berbasis kearifan lokal adalah model pendidikan pada umumnya yang memfokuskan pada pengajaran anak didik untuk berada pada situasi konkret yang

6 Selain itu sebenarnya Wagiran menambahkan dua lagi yaitu 1) kondisi alam dan lingkungannya yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupi masyarakat; 2) alat dan bahan yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Naun menurut penulis hal demikian telah termasuk pada nomor ke 3 yakni cara komunitas lokal memenuhi kebutuhan ekonominya. Lihat Wagiran, *Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Propinsi DIY dan Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY Menuju Tahun 2025*, Yogyakarta: Setda Propinsi DIY, 2009, hlm. 139.

mereka hadapi se hari-hari. Diakui kalau Indonesia adalah negara multi kultural dan penuh keberagaman suku bangsa dengan aneka bahasa daerah, adat istiadat, etnis dan agama. Kekayaan ini membuat setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing yang majemuk. Adanya pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjadi media dalam mengajarkan dan mengembangkan keunggulan kearifan lokal masing-masing daerah. Salah satu kearifan lokal yang dapat dikembangkan adalah potensi atau aset daerah. Potensi daerah merupakan sumber daya tertentu yang dimiliki daerah, seperti makanan khas, wisata alam, destinasi, budaya dan sebagainya.

Kebudayaan Indonesia dapat dilihat dari segi statis dan dinamis. Pertama dari segi statis, kebudayaan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu *Isolated Culture*, *Cosmopolitan Culture*, dan *Accomodative Culture*. Kebudayaan tipe pertama, kebudayaan yang terisolasi (karena geografis, menjadi kedaerahan) paling banyak terdapat di Indonesia, karena penduduk tidak asli daerah yang berpindah ke daerah tersebut pun relatif sedikit, dan kadang menjadi isolated juga karena terkonsentrasi di daerah tertentu (pemukiman trans, misalnya). Kebudayaan

tipe kedua terdapat di berbagai kota besar di Indonesia karena penduduknya campur baur dari beragam suku-bangsa dan etnis/subetnis. Kebudayaan tipe ketiga terutama terdapat di pulau Jawa karena banyak suku bangsa dan penduduk dengan asal-usul etnis yang tinggal menetap sebagai penduduk “asli” dari hasil perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Ini tidak menutup diri dari bahwa kebudayaan daerah pun bersifat akomodatif.

Kedua, dari sisi yang dinamis, sejak proklamasi kemerdekaan yang didahului oleh Sumpah Pemuda telah terikrarkan dari sanubari seluruh bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu “satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan nasional.” Kesatubangsaan itu benar-benar mencakup seluruh orang Indonesia, dari mana pun asalnya. Sebagai perbandingan, Sumpah Pemuda Indonesia itu jauh berbeda nuansanya dengan Konstitusi Amerika Serikat.⁷

7 Di Indonesia, etnis selain etnis Indonesia relatif kecil jumlahnya, dan jika ada konsentrasi, hanya di beberapa wilayah tertentu saja. Perbedaan etnis itu pun sebenarnya lebih hanya sebagai warisan penjajahan Belanda yang secara sengaja diskriminatif untuk keperluan politisnya. Itulah sebabnya di Indonesia lebih dikenal adanya multisubetnis yang disebut sukubangsa daripada multietnis. Suku Bangsa itu pun tidak terlampau mencolok “perlakuannya” dilihat dari ras, lebih dilihat dari budaya dan bahasanya. Itupun kerap

sudah membaur karena perkawinan. Ada perbedaan ras, memang, tetapi tidak pernah ada perlakuan khusus terkait dengan ras, perlakuan lebih pada daerahnya, sehingga tetap disebut sukubangsa dari bangsa Indonesia.

Oleh karena tidak ada etnis berbeda yang besar-besar, maka di Indonesia juga tidak dikenal multikultur berbasis etnis, yang ada sebenarnya subkultur. Semuanya, kendati dalam keanekaragaman atau bhinneka, merupakan budaya Indonesia. Jadi, budaya Sunda (punya Penulis) dan budaya Jawa (punya istri Penulis), sebagai misal, semuanya budaya Indonesia. Bahkan budaya Cina dan Arab pun, yang ada di Indonesia, diakui sebagai budaya Indonesia. Qasidah atau nasyid yang asalnya dari Arab, lazim dianggap budaya kelompok Muslim Indonesia. Permainan liong dan barongsay, ketika Penulis masih kecil, ditampilkan di desa (bukan di kota), yang tidak ada warga asal Cina seorang pun, oleh "suku Sunda" dengan tanpa kikuk (rikuh—Jawa) dalam perayaan 17 Agustusan.

Yang lebih sensitif di Indonesia sebenarnya multireligi, bukan multikultur. Benturan antar pemeluk agama, bahkan antar penganut mazhab, aliran, atau sekte dalam satu agama pun bisa terjadi. Faktornya bisa beragam, sebagian kadang karena dimomoti kepentingan politik, sebagian karena faktor in group dan out group yang terlampau kental. Dalam keadaan normal, lazimnya tidak terlampau terlihat adanya diskriminasi religius, atau konflik antar religi (antar subreligi). Semua pemeluk agama di Indonesia bisa hidup berdampingan tanpa halangan. Jika ada konflik, pasti ada pemicu lain yang turut berperan. Pemeluk Islam "fundamentalis" yang suka dikatakan "ekstrimis" itu pun, sebagian perilakunya ada unsur politis di dalamnya. Oleh karena itulah maka ada "bom Cirebon," bom orang Islam terhadap orang Islam sendiri.

Konflik agama yang lazim muncul adalah karena adanya anggapan penodaan kesucian agama,

Zuhdan K. Prasetyo (2013), kearifan lokal sangat perlu diintegrasikan dengan pendidikan. Pendidikan berbasis budaya lokal merupakan upaya sadar yang terencana dengan baik dan sistematis melalui pemanfaatan potensi daerah setempat secara bijaksana untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis kepada kearifan lokal. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Peran mereka sebagai bentuk upaya membangun bangsa dan negara.

Pendidikan pendidikan berbasis kearifan lokal ini bukan asumsi atau harapan yang tidak memiliki legalitas, namun model basis pendidikan ini dilindungi oleh negara, sekaligus menjadi konsensus bersama untuk

misalnya oleh aliran-aliran kepercayaan yang mengatasnamakan agama Islam, tetapi sebenarnya jauh menyimpang dari ajaran Islam. Ini bukan soal toleransi keberagaman, ini sudah soal hukum. Keberagaman (religiusitas) di Indonesia juga pada dasarnya akomodatif, terutama terkait dengan "tradisi budayanya." Lebaran, sebagai contoh, tidak hanya "dirayakan" oleh umat Islam, umat yang lain pun ikut "merayakannya" dengan caranya sendiri-sendiri. Tahun baru Masehi dirayakan pula oleh anak-anak muda Islam. Lihat Tatang M. Amirin, *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 7-9.

diterapkan. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 50 ayat 5 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota melakukan manajemen pendidikan dasar dan menengah dan satuan pendidikan seluruhnya dengan berbasis pendidikan lokal. Begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 34 menerangkan bahwa “pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif atau komparatif daerah”.⁸

8 Beberapa peraturan lain yang juga mengatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 35 ayat 2 bahwa “pemerintah atau kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertarif internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal”.

Begitu juga dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 bahwa “pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari system sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari system alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya”.

Legislasi ini membawa pada tujuan dibuatnya model pendidikan berbasis kearifan lokal. Jamal Ma'mur Asmani (2012), menyebut beberapa tujuan dirumuskannya pendidikan berbasis kearifan lokal yaitu:

1. Supaya anak didik mengetahui, memahami, menganalisis dan kemudian mengembangkan keunggulan lokal daerah tempat mereka tinggal. Serta memahami seluruh aspek yang berhubungan dengannya.
2. Anak didik mampu mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Secara aktif mereka didik untuk dapat berpartisipasi dalam urusan pelayanan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan. Terlepas apakah keberadaan mereka dapat menghasilkan imbalan atau tidak, yang terpenting mereka dapat melestarikan budaya, tradisi dan sumber daya daerah agar mampu bersaing seara nasional dan global.
3. Terakhir, anak didik dapat mencintai tanah kelahirannya, bangga menghadapi masa depan dan perkembangan zaman dengan menonjolkan keunggulan daerahnya sendiri, dapat mengembangkan potensi lokal sehingga daerahnya dapat berkembang psa seiring dengan tuntutan era globalisasi dan informasi.⁹

9 Jamal Ma'mur Asmani, hlm. 41

Pendidikan berbasis kearifan lokal bukan sembarang langsung jadi, atau sesederhana seperti maknanya. Namun pada tataran implementasi, pendidikan berbasis kearifan lokal memiliki kiat atau prasyarat yang harus ditempuh. Menurut Jamal Ma'mur Asmani, strategi untuk menerapkan, diantaranya adalah

1. Membuat *teamwork*.

Kegiatan pendidikan berbasis kearifan lokal bukan kegiatan kecil dengan tenaga kecil, melainkan butuh upaya dan tenaga besar untuk menerapkannya dengan maksimal. Lembaga yang ingin menerapkan, memerlukan tim khusus (*teamwork*) yang telah dilatih dan memahami betul potensi dan kekayaan lokal pada semua aspeknya. Bahkan kalau bisa, harus mereka yang telah aktif melakukan pergerakan potensi lokal dengan beragam terobosan. Bisa disebut, yang telah menjadi *lakon* dalam mengembangkan potensi daerah.

2. Kerjasama antar Elemen

Kegiatan ini juga tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak internal lembaga pendidikan, melainkan butuh kerjasama semua elemen untuk melaksanakannya. Beberapa elemen seperti orang tua yang memahami karakter dan sifat anak didik, aparat dan tokoh

masyarakat yang memahami potensi lokal beserta perkembangannya, perlu untuk dilibatkan agar kajian dan uji coba dapat dilakukan.

3. Strategi pelaksanaan

Pimpinan, semua stakeholders beserta elemen eksternal perlu menyiapkan strategi yang tepat baik untuk kegiatan intra maupun ekstra. Jika diterapkan pada kegiatan intra, maka mata pelajaran wajib diikuti oleh semua anak didik. Jika diterapkan pada kegiatan ekstra, maka umumnya dibuat waktu tertentu yang fokus membina kearifan lokal.¹⁰

10 Selain ketiga hal tersebut, masih banyak strategi yang bisa diterapkan misalnya 1) menyiapkan *home company*, yaitu suatu terobosan kreatif dengan cara mendirikan *home company* atau *home industry* sebagai obyek percontohan yang dapat dikembangkan oleh anak didik. 2) mempersiapkan anak didik yang terampil, sebagai modal mengembangkan potensi lokal memang dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, model pendidikan berbasis kearifan lokal harus memperbanyak program keterampilan. 3) *open market*, yaitu anak didik diajarkan mengembangkan potensi lokal yang bernilai ekonomis untuk mensejahterahkan masyarakat. Seperti model pengelolaan asset, usaha makro/mikro, atau bahkan membuka divisi khusus untuk menanggapi masalah pemasaran dengan bekerjasama ke beberapa perusahaan. 4) mencari investor, sebab mengembangkan potensi lokal membutuhkan biaya untuk sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya, maka perlu mencari investor yang sanggup mendanai untuk mengembangkan program ini. 5)

B. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

Thomas Lickona mengemukakan tentang makna pendidikan karakter yaitu:

*Character of education is a reliable inner disposition to respond in a morally good way, character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behavior to education.*¹¹

Sementara Akhmad Muhaimin Azzet (2011), sependapat dengan pendapat di atas bahwa pendidikan karakter pada hakikatnya berperan untuk mengembangkan karakter mulia peserta didik, yang melalui tahapan pengetahuan

studi banding, yaitu dengan melakukan kunjungan ke berbagai lembaga yang telah berhasil menerapkan program pendidikan berbasis kearifan lokal. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, hlm.70.

- 11 Dengan pengertian ini, Lickona memaknai pendidikan karakter dengan beberapa tahapan yaitu bermula dari pengetahuan tentang kebijakan, kemudian menimbulkan komitmen terhadap melaksanakan kebaikan tersebut dan pada akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Maka untuk itu, tahapan-tahapan tersebut mengacu kepada pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*) dan motivasi (*motivations*) serta perilaku (*behaviours*) dan keterampilan (*skills*). Lihat dalam Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. New York: Toronto, 1991, hlm. 51.

dan pelaksanaan nilai-nilai moral dan cara mengambil keputusan baik pada hubungannya dengan manusia ataupun tuhan. Dalam pendidikan karakter, terdapat suatu proses transfer pengetahuan kepada anak didik untuk menjadi manusia berkarakter pada dimensi olah hati, raga, pikir, rasa dan karsa. Dari aspek penilaian, pendidikan karakter berperan sebagai sistem untuk menanamkan nilai karakter baik kepada semua elemen yang terlibat untuk mengetahui, sadar dan melaksanakan nilai baik tersebut.¹²

Sederhana lagi, Murphy memahami pendidikan karakter dengan sangat ringan. Menurutnya, pendidikan karakter didasarkan pada nilai etika seperti tanggungjawab, kepercayaan, keadilan, kejujuran, kepedulian dan kewarganegaraan.¹³ Begitu juga dengan

12 Lihat Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011, hlm.36.

13 Dari pengertian ini tampak bahwa pendidikan karakter mengacu pada proses penanaman nilai yang dimulai dengan pengetahuan nilai, tata cara bersikap dan bagaimana anak didik dapat mempunyai kesempatan untuk dapat melatih nilai-nilai tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian Lickona sebelumnya, maka focus pendidikan karakter sebenarnya bermuara pada segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter anak didik. Dalam pemaknaan lain, Lickona seolah

pengertian dari Kemendiknas, bahwa pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan baik kepada anak didik agar mampu bersikap dan bertindak sesuai nilai kebaikan. Selain itu, Kemendiknas tahun 2010 juga memberikan arahan agar pembangunan pendidikan karakter dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, pemerintah, anggota legislatif, media massa, dunia industri dan dunia usaha.¹⁴

ingin menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk membantu anak didik agar mereka memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika. Lihat hubungan antara pengertian tersebut dalam M.M. Murphy, *Character Education in America's Blue Ribbon Schools*, Lancaster: Technomic, 1998, hlm. 22.

- 14 Pengertian Kemendiknas ini diambil dari saripati beberapa pakar pendidikan karakter yang disahkan oleh Negara. Lih dalam Kemendiknas, *Panduan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan Kemendiknas, 2011. Selain itu, Kemendiknas juga memberikan instruksi metodologis dengan menggunakan pendekatan sistematis dan integrative. Sistematis artinya segala kegiatan pendidikan karakter ada keterkaitan dengan aspek lainnya seperti kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat agar tersistem dengan tepat. Sementara integrative, maksudnya adalah semua kalangan atau elemen mulai dari anak didik sampai social, harus saling terhubung dan melakukan penilaian. Lihat Pusat Kurikulum Depdiknas, *Bahan Pelatihan Penguatan*

Dengan demikian telah jelas bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi anak didik agar bisa mengambil keputusan tentang baik dan buruk, memelihara yang baik, mewujudkan kebaikan dan menebarnya. Oleh karena itu, tugas diadakannya pendidikan karakter sebenarnya adalah mengajarkan nilai kebaikan melalui penekanan pembelajaran yang sifatnya “pembiasaan” (*habituation*).¹⁵

Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, Jakarta: Kemendiknas, 2010.

- 15 Pembiasaan ini merupakan strategi yang juga dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 dengan mengacu pada nilai-nilai umum yang terdiri dari 18 nilai pendidikan karakter, yaitu : 1) religious, yaitu ketaatan kepada Tuhan dengan cara memahami dan melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan menjunjung sikap toleran, dan rukun; 2) Jujur, yaitu sikap antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan mencerminkan kesamaan sehingga menjadi pribadi yang dapat dipercaya; 3) toleransi, sikap menghargai agama lain, aliran lain, suku, adat, bahasa, ras, pendapat, etnis lain dengan cara hidup rukun; 4) disiplin, sikap yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan yang dibuat; 5) kerja keras, yakni sikap yang menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam menyelesaikan amanah, masalah, tugas dan lain sebagainya; 6) kreatif; 7) mandiri; 8) demokratis; 9) rasa ingin tahu; 10) nasionalisme; 11) cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 13) komunikatif; 14) cinta

Sementara kearifan lokal, menurut para ilmuwan antropologi seperti Koentjaraningrat, Spradley, Suparlan dan Taylor sepakat mengkatégorikan kearifan lokal ke dalam wadah kebudayaan yang meliputi idea, aktivitas sosial dan ertifak. Artinya, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan.¹⁶ Sementara kebudayaan itu sendiri bermakna hasil cipta dan kreatifitas manusia berdasar pada pengalaman yang dialami oleh masyarakat. Secara tidak langsung, tidak semua kebudayaan dikatakan kearifan lokal.

Hal ini kemudian dispesifikan oleh Rahyono (2009), yang mengartikan kearifan lokal dengan sebuah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok etnis berdasar pada pengalaman masyarakat.¹⁷ Secara tidak langsung, meskipun pada daerah yang satu memiliki kearifan lokal, belum tentu di daerah lain memiliki hal yang sama. Maka jelas bahwa kearifan lokal itu sifatnya temporer kedaerahan. Nilai-nilai

damai; 15) gemar membaca; 16) peduli lingkungan; 17) peduli sosial; 18) tanggung jawab. Lihat Kemendiknas, *Pedoman Pendidikan Karakter*, hlm. 18.

16 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2009, hlm. 112.

17 Lihat Rahyono, *Kearifan Budaya dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009, hlm.11.

tersebut melakat kuat pada masyarakat tertentu sekalipun diterpa oleh perubahan zaman. Sepanjang, nilai tersebut relevan dengan kondisi.

Lebih rinci, Robert J. Sternberg (2004) memaknai kearifan lokal sebagai kebijaksanaan dengan standar nilai filosofis terkait dengan nilai-nilai, etika dan perilaku yang secara tradisional ditujukan untuk mengelola sumber daya baik alam, manusia maupun budaya secara kontinu.¹⁸ Pendapat ini menggambarkan bahwa kearifan lokal memiliki empat obyek sekaligus; alam, manusia, budaya dan Tuhan. Sternberg berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah kotor dan buruk, kemudian karena mereka bersikap arif dan bijaksana, sehingga mereka dipandang sebagai manusia. Seseorang dinilai arif dan bijaksana jika dapat mengakumulasikan antara konteks sikap dengan nilai etika agar dapat berjalan seimbang.

Dari makna pendidikan karakter dan kearifan lokal yang telah dipaparkan, maka jika digabung pendidikan karakter berbasis kearifan lokal adalah pendidikan tentang moral, baik dan

18 Robert J. Sternberg, *Wisdom and Giftedness* dalam Shavinina, Larisa V, Ferrari, Michel, *Beyond Knowledge Extra Cognitive Aspects of Deveveloping High Ability*, New Jersey: Lawrence, 2004, hlm. 172.

buruk, etika dan akhlak yang termaktub pada nilai-nilai karakter untuk diketahui, dipahami dan dipraktikkan kemudian disebarkan pada orang lain dengan menggunakan nilai kearifan lokal sebagai acuannya. Obyektifitas nilai kebaikan, etika dan akhlak diukur dari standar kearifan lokal.

Sementara pendidikan berbasis kearifan lokal diartikan sebagai pembelajaran yang mengajarkan anak didik untuk selalu dekat dan berdiskusi pada situasi daerah di mana dia tinggal. Seperti halnya yang diutarakan oleh Paulo Freire, sebagaimana dikutip oleh Wagiran, bahwa dengan pendidikan yang didapatkan oleh anak didik, mereka mendapatkan ilmu saat dihadapkan pada problem dan situasi di masyarakat, mereka mampu menanggapi, menghadapi dan bahkan menyelesaikannya.¹⁹

19 Masyarakat memiliki tipe yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai ciri khas. Namun hal yang pasti, tipe dan ciri khas tersebut bersifat dinamis, berkembang dan berubah. Sehingga menuntut anak didik memiliki modal pengetahuan yang mapan untuk menghadap segala perubahan zaman di daerahnya. Lihat dalam Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol.2, No. 3, 2012, hlm. 19.

Signifikansi model pendidikan ini sangat penting untuk dijadikan begal jati diri bangsa. Membangun jati diri bangsa melalui wawasan kearifan lokal (*local genius*) pada dasarnya adalah landasan bagi terbentuknya jati diri bangsa secara nasional. Melalui pembelajaran kearifan lokal membuat daerah memiliki akar budaya.²⁰ Diakui bahwa budaya etnik lokal berfungsi sebagai acuan bagi perkembangan dinamisasi masyarakat seperti inovasi, tata struktur masyarakat, teknologi dan sebagainya. Dari sini dapat diasumsikan bahwa proses pendidikan kearifan lokal bertujuan untuk menciptakan generasi yang mampu menjadi jati diri bangsa.

Model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal berbeda dengan model pendidikan modern. pendidikan modern menyingkirkan kearifan lokal sebagai basis, prioritasnya lebih pada peningkatan kecerdasan yang diukur dari kemampuan menghafal materi dan menyelesaikan tugas-tugas. Secara akademisi model pendidikan ini, memperoleh

20 Lihat Zahriyana, Yeni Andriani dan Boyhaqqi, *Batik Aceh Salah Satu Produk Kearifan Lokal sebagai Pendidikan yang Berkarakter dan Berwawan Global*, Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan, 2010, hlm. 76.

nilai yang tinggi secara akademis, tetapi gagal memperlakukan kehidupan yang baik, bijaksana dan arif.²¹ Pendidikan modern tidak memasukan kearifan lokal pada aspek kurikulum, berbeda dengan pendidikan yang memang berbasis pada kearifan lokal.

Banyak pengamat menyimpulkan bahwa “nilai kearifan” tidak dapat ditransfer seperti nilai akademis lainnya. Namun pendidik melalui pendidikan, dapat membantu mengembangkan kearifan yang memang telah ada pada diri anak didik.²² Transformasi hanya bisa diberikan melalui interaksi langsung dan yang melakukan nilai kearifan lokal tersebut. Seperti halnya,

21 Pendidikan modern lebih tertarik mengembangkan sisi-sisi hafalan materi, nilai akademis, hitung-hitungan dan pengetahuan modern. walaupun ada sisi kearifan lokal, namun hanya menjadi hal yang tersier atau pelengkap. Sehingga wajar kalau lulusan pendidikan modern mengasai akademis di atas rata-rata. Sedangkan pada aspek kearifan dan sifat mengembangkan potensi daerah sama sekali tidak menjadi perhatian. Lihat dalam Robert J Sternberg, *Foolishness* dalam Jordan J. Robert dan Jennifer, *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm. 87.

22 Lihat Robert J. Sterberg, Jarvin, Linda, Reznitskaya, Alina, *Teaching for Wisdom Through History: Infusing Wise Thinking Skills in School Curriculum* dalam Ferrari, Mechel, Potworowski, George (ed.), *Teaching for Wisdom: Cross-Cultural Perspective on Fasting Wisdom*, Nederland: Springer, 2008, hlm. 98.

tokoh adat, dongeng, legenda dan elemen lain. Sebab pendidikan berbasis kearifan lokal mengajarkan anak didik untuk selalu dekat pada situasi kedaerahan yang sedang hidup di dalamnya.

Disadari bersama, pendidikan merupakan gerakan kultural. Maka untuk membentuk karakter anak didik harus melalui pembentukan budaya lingkungan pendidikan yang berkarakter. Dikarenakan gerakan pendidikan karakter bersangkut paut dengan kebudayaan dan kebudayaan itu sendiri hasil kerja sosial, maka pelestarian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal harus melalui dukungan masyarakat.

C. Implementasi Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pada dasarnya, pendidikan karakter adalah upaya aktif untuk mencetak watak atau kebiasaan baik kepada anak didik agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan. Penanaman karakter melalui pendidikan, merupakan usaha efektif karena anak didik berada pada usia yang mudah menyerap pengetahuan dan keteladanan dari sikap orang

lain. Masa anak didik rentan cepat terpengaruh dan tidak sulit mencerna karakter. Maka dari itu, pada masa status sebagai “anak didik” adalah waktu yang tepat untuk belajar pendidikan karakter, lebih-lebih yang bersifat kearifan lokal.

Sutarno melakukan penelitian khusus mengenai konsep penanaman karakter melalui kearifan lokal di lembaga sekolah dasar, SLTP dan SLTA. Terdapat empat macam pembelajaran dalam kaitannya dengan karakter berbasis kearifan lokal, yaitu:

1. Mempelajari bidang budaya, yaitu dengan menempatkan budaya sebagai bidang keilmuan yang termaksud dalam kurikulum pelajaran wajib. Budaya dipelajari pada *skup* materi pembelajaran khusus. Dalam hal ini, pembelajaran budaya tidak terintegrasi dengan bidang ilmu umum. Anak didik *digodok* untuk memahami budaya pada sektor khusus, sektor tersebut selain pembelajaran juga dilatih untuk melestarikan.
2. Belajar dengan budaya, yaitu budaya diwujudkan sebagai media atau instrumen dari pembelajaran. Mata pelajaran dikontekskan pada budaya. Semisal, belajar hitung menghitung (matematika) dengan menggunakan ertefak

peninggalan nenek moyang seperti cendana, *aloe* dan sebagainya.

3. Belajar melalui budaya, yaitu strategi yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan pemahaman kebudayaan atau kearifan lokal yang mereka pahami. Pengetahuan tersebut kemudian dihubungkan dengan peajaran yang tengah dipelajari.
4. Belajar berbudaya, proses ini dimana anak didik berperan sebagai pelaksana budaya atau kearifan lokal tersebut. Baik dari aspek bahasa, seni, potensi alam untuk dikelola maupun hal lainnya. Disini, anak didik mempraktekan kearifan lokal dengan cara memahami dan memaknai.²³

Dalam implementasinya, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di semua satuan pendidikan tidak terbentuk dengan mudah, diperlukan proses panjang *nan* sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tenaga pendidik sebagai garda terdepan karena berinteraksi langsung dengan anak didik, memerlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan karakter. Kementerian

23 Zamroni, *Strategi dan Model Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, Yogyakarta: PHK-1 UNY, 2010, hlm.8

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) strategi implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di satuan pendidikan meliputi langkah-langkah berikut.

a. Integrasi kearifan lokal ke dalam mata pelajaran

Setiap mata pelajaran terdapat muatan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan standar sosial masing-masing daerah anak didik tinggal secara khusus. Dengan demikian, pembelajaran nilai karakter yang mengacu pada kearifan lokal tidak hanya pada tataran kognitif saja, tapi menyisir pada wilayah internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Pengembangan karakter bangsa yang memperhatikan aspek budaya lokal terintegrasikan dalam mata pelajaran.

Semisal pada pelajaran ilmu sosial dan sejarah, terdapat nilai-nilai karakter seperti tanggungjawab memepertahankan kebudayaan daerah, rasa cinta untuk mengembangkan potensi lokal, melakukan upaya mandiri dan kreatif terhadap sumber daya lokal, mengkaji beberapa manuskrip daerah sebagai kekayaan untuk dikembangkan dan merawat lingkungan untuk dilestarikan.

Begitu juga dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan hukum misalnya, anak didik diarahkan untuk menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab dan cinta tanah air, memiliki prinsip demokratis. Kompetensi dasar difokuskan pada rasa cinta keagamaan dengan menjunjung tinggi kesopanan, toleransi dan asasi manusia sebagai landasan moral untuk mengenal daerahnya dan menyelesaikan konflik daerah. Demikian juga, diarahkan kompetensi dasar pada penjagaan lingkungan pada pelajaran ilmu pengetahuan alam.

b. Integrasi pendidikan karakter ke dalam muatan lokal

Strategi integrasi dalam muatan lokal ini disesuaikan dengan aturan Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 79 Tahun 2014, muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal dengan tujuan untuk membentuk pemahaman peserta didik tentang keunggulan, potensi dan kearifan lokal agar anak didik dapat bersikap, mengetahui dan terampil dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu 1) mencintai lingkungan, alam, sosial, spiritual dan budaya

di daerahnya, dan b) melestarikan dan menjaga keunggulan kearifan lokal yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya dalam rangka membangun potensi nasional.

c. Integrasi pendidikan karakter melalui pengembangan budaya dan pusat kegiatan belajar mengajar

Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan pembelajaran meliputi;

1. Situasional, yaitu membuat kondisi pembelajaran karakter berbasis kearifan lokal dibuat semendukung mungkin agar anak didik dapat cepat menangkap dan mempraktekkan. Misalnya kebersihan ruang kelas, kebersihan pakaian, halaman lingkungan, membuat ruang kearifan lokal yang merangsang pemahaman anak didik.
2. Rutinitas, kegiatan yang dilakukan anak didik dengan cara diatur oleh lembaga sebagai bentuk hal yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Seperti piket kelas, berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengucapkan salam ketika memasuki kelas dan berapasan dengan pendidik, dan lain sebagainya.
3. Spontanitas, merupakan kegiatan sosial yang masih berhubungan dengan lingkungan sekolah

dan menggambarkan sikap karakter berbasis kearifan lokal. Semisal, melestarikan tradisi jenguk menjenguk ketika ada teman sejawat, pendidik dan kependidikan atau tetangga yang sakit.

4. Keteladanan, pelatihan karakter yang dikhususkan pada pendidik agar dapat ditiru oleh anak didik baik di lingkungan pendidikan maupun di luar. Semisal tindakan dan keputusan baik yang diambil oleh pendidik ketika terdapat masalah di daerahnya, baik melalui tradisi *islah* dengan mengumpulkan tokoh adat atau mediasi.

d. Integrasi pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran

Salah satu model pembelajaran karakter berbasis kearifan lokal adalah menyusun strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Semisal dengan menggunakan pendekatan muatan lokal dan komunikasi sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan.²⁴

24 Terakhir adalah integrasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini merupakan media potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik bagi peserta didik. Menurut peraturan Mendikbud Nomor 62 tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh anak

Geertz (1973) dalam hasil penelitiannya tentang implementasi pendidikan karakter dihubungkan dengan kearifan lokal mengatakan bahwa:

“local wisdom is part of culture. Local wisdom is traditional culture element that deeply rooted in human life and community that related with human resources, source of culture, economic, security and laws”.²⁵

Dengan asumsi ini jelaslah bahwa untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis kearifan lokal harus menyatu dan memahami dengan budaya. Tanpa pengetahuan tentang budaya, sulit merumuskan strategi pembelajaran kearifan lokal. Segala keilmuan lain, dijadikan pendukung untuk melestarikan kearifan lokal. Seperti materi tentang antropologi, sosial dan kebudayaan, dimaksudkan untuk menambah wawasan untuk memahami kearifan lokal secara utuh.

didik di luar jam kegiatan seperti seni dan tari. Lihat Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Pedagogia, 2010, hlm. 129.

25 Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.

Pendapat ini kemudian dijabarkan oleh Brooks dan Brooks menyatakan bahwa pendekatan dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat menghasilkan pemahaman yang terpadu kepada anak didik. Satu sisi, mereka dapat memahami keilmuan, dan di sisi lain, mereka dapat mengejawantahkan pengetahuan keilmuan tersebut kepada masyarakat melalui pengembangan potensi lokal.²⁶ Karena bagaimanapun, kearifan lokal merupakan norma yang berlaku di masyarakat dan diyakini kebenarannya serta menjadi acuan untuk bertindak sehari-hari.

Secara dasar, kegiatan dalam pendidikan berupaya menjadikan anak didik menguasai materi (kompetensi) yang tertera pada kurikulum. Namun anak didik juga diajarkan bagaimana bersikap peduli, bertanggungjawab, bersosial, tolong menolong dan nilai-nilai karakter lainnya. Internalisasi nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran merupakan model pertama agar anak didik dapat belajar memaknai dan mempraktekkan nilai tersebut.

26 J.G. Brooks dan M.G. Brooks, *In Search of Understanding the Case for Constructivist Classrooms*, Alexandria: ASCD, 2000, hlm. 98.

Salah satu temuan di lapangan adalah integrasi kearifan lokal pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Integrasi pada pembelajaran IPS ini mengacu pada tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. *Pertama*, tahap perencanaan. Dalam merencanakan pelajaran IPS, maka yang menjadi tujuan utama adalah keteladanan dan pembiasaan. Dari tujuan ini dibuatlah rencana metode pembelajaran karakter dengan mengacu pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baru setelah itu, dibuatlah bagan perencanaan dengan menginternalisasi budaya masyarakat yang kondusif dan berdampak pada karakter.

Tahap *kedua*, adalah pelaksanaan. Melalui pembelajaran IPS, anak didik diharuskan mengerjakan berbagai tugas dengan dilandasi oleh karakter yang baik. Tugas tersebut dapat dilakukan melalui kondisi sosial di daerahnya masing-masing dengan menampilkan sisi potensi lokal yang ada. Selain itu, anak didik juga ditugaskan membuat *master plan* dalam rangka mengembangkan kearifan lokal yang ada. Tahap *ketiga*, evaluasi. Evaluasi dilakukan bukan hanya pada penguasaan materi atau evaluasi

nilai, melainkan evaluasi yang berhubungan dengan kemampuan anak didik memiliki rasa peka terhadap kondisi sosial, kebudayaan dan lingkungan.²⁷

27 Penerapan pendidikan berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS merupakan salah satu metode sederhana untuk sensitive pada nilai-nilai sosial, bukan hanya pengetahuan akademiknya saja. Karena bagaimanapun, anak didik nantinya akan kembali ke daerahnya dengan keilmuan yang telah dimiliki. Maka tidak ayal, apabila mereka dituntut memhami dua hal sekaligus, keilmuan dan kearifan lokal dengan mengacu pada pola nilai karakter. Lihat dalam Hapri Novriza Setya Dhewantoro, *Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Pembelajaran IPS*. dalam <http://seminar.umpo.ac.id/index.php/>.

Daftar Pustaka

- A'yun, Qurroti. *Manajemen Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Islam Kontemporer*. Jurnal Vicratina, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Albantani, Azkia Muharom & Ahmad Madkur. *Think Globally, Act Locally: The Strategy of Incorporating Local Wisdom in Foreign Language Teaching in Indonesia*. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Albertul, Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Amirin, Tatang M. *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 1, No. 1, 2012.

- Anggung, Muhammad. *Peranan Perilaku Organisasi dan Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Produktivitas Output Pendidikan*. Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Anwar, Syaiful. *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa*. Jurnal al-Tadzkiyyah, Vol. 7 Nomor 2, 2016.
- Aqib, Zainal. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
- Arifin, Imron. *Manajemen Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, dalam buku Imron Arifin dan Wahyudi, *Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan Profesionalisme Guru: Kajian Teori dan Riset*. Malang: UM Press, 2018.
- Arifin, *Membangun Karakter Bangsa Melalui Kepemimpinan Moral-Spiritual: Strategi Atasi Kasus Demoralisasi dan Korupsi di Indonesia*. Prosiding Nasional Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan, UM, 2010.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asad, Talal. *Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz*. Man, 1983.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011.
- Barlian, Ujang Cepi & Eliyanto. *Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Melalui Balance Scorecard*. Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Bellatine, Jeanne H. *The Sociology of Education a Systemic Analisis*. New Jersey: Person, 2001.
- Brooks, J.G. & M.G. Brooks. *In Search of Understanding the Case for Constructivist Classrooms*. Alexandria: ASCD, 1999.
- Burhanuddin & A. Russel. *Human Resource Management: an Experimental Approach*. Singapore: McGraw Hill, 1993.
- Burhanuddin. *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

- Bush & Coleman. *Leadership and Strategic Management in Education*. Houston: Gulf Publishing, 2000.
- Christopher. *Teacher Training School Norms and Teacher Effectiveness in Indonesia*, dalam bukunya Daniel Suryadarma (ed.), *Education in Indonesia*. Singapore: ISEAS: Institute of Southeast, 2013.
- Cialdini, R. D. *Crafting normative messages to protect the environment*. *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 12, No. 4, 2003.
- Culberston. *Character Education: Teaching Values for Life*. Chicago: Science Research Asociater Inc, 1982.
- Dewatoro, Ki Hajar. *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Duncum, Paul. *Visual Culture Art Education: Why, What and How*. *International Journal of Art and Design Education*, Vol. 21, No. 1.
- Fadhli, Muhammad. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 2017.

- Fajarini, Ulfah. *Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Fatah, Nana. *Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI 1999.
- Fathurraohman, Pupuh. *Pengembangan PendidikanKaakter*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Fayol, Henry. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Fernandes, Reno. *Relevansi Kurikulum 2013 dengan Kebutuhan Peserta Didik di Era Revolusi 4.0*. Socius: Journal of Sociology Research and Education, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

- Golberg, L.R. *The Development of Markers fo Th Big-Fice Factor Structure*. Psychological Assessment. Vol. 4, Ussus 2, 2019.
- Hadis, A. & B. Nurhayati. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Harun, Cut Zahri. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 3, No.3, 2013.
- Handy, Charles. *Understanding Organizations (4th ed.)*. London: Penguin Books, 2005.
- Hidayat, Asep Saepul. *Manajemen Sekolah Berbasis Karakter*. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol.1, No.1, 2012.
- Hidayatullah, M. Furqon. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010.
- Hmelo-Silver, Cindy E. *Analyzing collaborative knowledge construction: multiple methods for integrated understanding*. Computers & Education, Vol. 41, 2003.
- Hoover, Gary L. *Individualized in Education of Character*. USA: Parkland Dissertation, 2013.

- Hoy, C., C. B. Jardine & M. Wood. *Improving Quality in Education*. London and New York: Falmer Press, 2005.
- James, Paul, Liam Magee, Andy Scerri, & Manfred Steger. *Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability*. London: Routledge, 2015.
- Johnstone, Megan-Jane. *Bioethics: A Nursing Perspective*. Confederation of Australian Critical Care Nurses Journal, Vol. 3, 2008.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2011.
- Khoiri, Ahmad. *Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam*. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Khusna, Naela. *Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar: Sebuah Kerangka Konseptual*. Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol.1, No. 1 2018.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.

- Komariah, Engkoswara Aan. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Koontz, Harold Cyril O'Donnel. *Management*. Edition VV. Tokyo: Mc Graw-Hill, 1980.
- Lapinski, M. K. & R. N. Rimal. *An explication of social norms*, Communication Theory. Vol. 15, No. 2, 2005.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. New York: Toronto, 1991.
- Long, A. A. & D. N. Sedley. *The Hellenistic Philosophers: Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hlm. 366–367.
- Ma'ruf, Jamal. *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*. Yogyakarta: DIVA Press, 2012.
- Macionis, John J. & Linda Marie Gerber. *Sociology*. Toronto: Pearson Prentice Hall, 2011.
- Mantja, Willem. *Manajemen Pendidikan dalam Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

- Masaong, A.K. *Pendidikan Karakter Berbasis Multiple Intelligence*. Yogyakarta: UNY Press, 2012.
- Maton, Karl. *Knowledge andn Knowers: Towards a Realist sociology of education*. USA: Routledge, 2014.
- McCrar, R.R. & PT.Jr. Costa, *Validation of the Five-Factor Model of Personality Across Instrument and Observers*. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 52, No. 1, 1987.
- Miao, Rentao. Heung-Gill Kim, *Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and Employee Performance: an Chinese Empirical Study*. Journal Service Science and Management, 3,2 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyasa, E. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Munir, Abdullah. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pedagogia, 2010.
- Munir, Miftakhul. *Keberadaan Total Quality Management dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM dalam Pendidikan)*. Realita, Vol. 16, No. 1, 2018.

- Murphy, M.M. *Character Education in America's Blue Ribbon Schools*. Lancaster: Technomic, 1998.
- Muslich, Mansur. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muthohar, Sofa. *Antisipasi Degradasi Moral di Era Global*. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Nadlir. *Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.2, No.2 2014.
- Nawawi, Hadari. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006
- Nurhaidah & M. Insyah Musa. *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3, No. 3, 2015.
- Pannen, Paulina. *Konstruktivisme dalam Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas, 2012.
- Purnama, Ayu Purry, Irawan Suntoro, & Helmi Yanzi. *Implementasi Program PPK dalam Membentuk Sikap Sosial Peserta Didik di SMAN 14*. Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 5, No.2, 2018.

- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Pusat Kurikulum Depdiknas. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas, 2010.
- Puspitasari, Euis. *Pendekatan Pendidikan Karakter*. Jurnal Edueksos, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Putri, Noviani Achmad. *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Sosiologi*. International Journal of Indonesia Society and Culture Komunitas, Vol. 3, No. 2, 2011.
- Rahyono. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009.
- Ramadani, Emi. *Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Ranupandojo, Heidjarachman & Suad Husnan, *Manajemen Personalita*. Jogjakarta: BPFE UGM, 2000.

- Rivai, Veithzal. *Education Manajement; Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Riyadi, Ivan. *Manajemen Pendidikan Bermuatan Antropologi, Agama dan Sosial*. Jurnal Cendikia, Vol. 17, No.2, 2019.
- Robert J. Sterberg, Linda Jarvin, & Alina Reznitskaya. *Teaching for Wisdom Through History: Infusing Wise Thinking Skills in School Curriculum* dalam Ferrari, Mechel, Potworowski, George (ed.), *Teaching for Wisdom: Cross-Cultural Perspective on Fasting Wisdom*. Nederland: Springer, 2008.
- Robert, Jordan J. & Jennifer, *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Ruyadi, Yadi. *Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Proceeding International Conference on Teacher Education UP dan UPSI Bandung 2010.
- Sadtyadi, Hesti & Badrun Kartowagiran. *Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Guru Sekolah Dasar Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2014.

- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- Salim, Ahmad. *Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah (Sebuah Konsep dan Penerapan)*. Jurnal Tarbawi, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Salim, Ahmad & R. Zainuddin, *A Cognitive tool to Support Mathematical Communication in Fraction Word Problem Solving*. Wseas Transactions on computers, Vol. 7, No. 4, 2019.
- Sallis, E. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited, 2005.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sanisah, Siti. *Pendidikan Tinggi dan Pengangguran Terbuka: Sebuah Dilema*. Lentera Pendidikan, Vol. 13, No. 2, 2010.
- Santrock, J.W. *A Topical Approach to Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill, 2007.
- Sartibi, M. *Masalah-Masalah Pendidikan Nasional*. Jurnal FIKRAH, Vol.7, No.1, 2017.

- Satori, Djam'an. *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2004,
- Sayyi, Ach. *Modernisasi Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Perspektif Azyumardi Azra*. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Shilling, Chris. *Reconceptualizing Structure and Agency in the Sociology of Education: Structuration Theory and Schooling*. British Journal of Sociology of Education, Vol. 13, No. 1, 1992.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomid Sosial, 1986.
- Sternberg, Robert J. *Wisdom and Giftedness dalam Shavinina, Larisa V, Ferrari, Michel, Beyond Knowledge Extra Cognitive Aspects of Deveveloping High Ability*. New Jersey: Lawrence, 2004.
- Suatika, I Nengah Sukadi & Ratna Artha Windari. *Memberdayakan Guru-Guru SMP Dan SMA PGRI Seririt Untuk Melaksanakan Model Pembelajaran Berbasis Kearifan*

- Lokal Sebagai Yadnya Dalam Rangka Pendidikan Karakter Bangsa. Widya Laksana*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Subagya, Ki Sugeng. *Pendidikan Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pendidikan, Pembelajaran dan Budi Pekerti*. *Jurnal Akuntansi Manajemen Pendidikan*, Vol.5 No.2, 2017.
- Sudarsana, I Ketut. *Pemikiran Tokoh Pendidikan dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia)*. *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 44-53.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sudjana, Djudju. *Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Bandung: Falah Production, 2004.
- Sularso, Pryo & Yuli Maria. *Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Ekstrakurikuler Karawitan Di Smp Negeri 1 Jiwan Tahun 2016*. *Citizenship: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2017.

- Sulfemi, Wahyu Bagja. *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Supardi U.S., *Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasinya*. Jurnal Formatif, Vol.2, No.2, 2018.
- Supardi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Adicita Karya Nusantara, 1999.
- Suranto. *Evaluasi Program Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Yang Relevan Dengan Etika Komunikasi Di Sekolah*. Widya Komunika, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Suryana, S. *Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspekti Pembangunan Pendidikan*. Jurnal EDUKASI, Vol.2 No.1, 2017.
- Sutisna, Oteng. *Adminstrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Suyanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.

- Suyitno. *The Development of Education on the Character and Culture of The Nation Based on The Local Wisdom*. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Tangen, Stefan. *A Theoretical Foundation for Productivity Measurement and Improvement of Automatic Assembly Systems*. Licentiate Thesis, Stockholm: Royal Institute of Technology, 2002.
- — — — —. *Understanding the Concept of Productivity*. Proceedings of the 7th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS2002), Taipei, 2002.
- Tanu, I Ketut. *Pembelajaran Berbasis Budaya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah*. Jurnal Penjaminan Mutu, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Umami, Rijal. *Pengaruh Kompetensi Pedagogic dan Motivasi Kerja Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Ujian Nasional di SMA Negeri se Kota Mojokerto*. Jurnal Inspirasi Pendidikan, Vol.3, No. 3, 2014.
- Utomo, Sugeng. *Manajemen dan Kemepimpinan Kepala Sekolah yang Efektif*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 8, No. 4, 2010.

- Velkley, Richard L. *Being after Rousseau: Philosophy and Culture in Question*. Chicago: University of Chicago Press, 2002, hlm. 11–30.
- Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2, No. 1 2012.
- – – – –. *Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Propinsi DIY dan Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY Menuju Tahun 2025*. Yogyakarta: Setda Propinsi DIY, 2009.
- Wahyuddin, Wawan. *The Effect of Knowledge Management on School Performanc among Teachers in Indonesia*. International Journal of Innovation, Vol. 11, No. 8, 2020.
- Wiyani. *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2002.
- Wulandari, Yeni & Muhammad Kristiawan. *Strategi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua*. JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Yusuf, Moh. Hidayat H. *Pengembangan Budaya Organisasi dalam Lembaga Pendidikan*. Jurnal Tarbawi, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Zahriyana, Yeni Andriani & Boyhaqqi, *Batik Aceh Salah Satu Produk Kearifan Lokal sebagai Pendidikan yang Berkarakter dan Berwawan Global*. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan, 2010.
- Zamroni. *Strategi dan Model Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan dan Pembelajaran*. Yogyakarta: PHK-1 UNY, 2010.

Indeks

A

akreditasi 12, 113, 217
al-Quran 77, 141
amoral 3, 81, 105
Aristoteles 91
arus kebudayaan 95
Asad 87, 193

B

Budaya universal 75

C

controlling 63, 64

E

efisiensi 8, 9, 10, 43, 45,
47, 54, 100, 116,
117
eksis 19
Ekstrakurikuler 27, 28,
205
etnis 162, 163, 164,
173, 174
Evaluasi Pendidikan

36, 59, 127, 147,
202, 205

F

filosofat 49, 75, 77, 91
filter culture 79
formal 1, 12, 13, 14, 20,
72, 74, 91, 93, 106,
162
formulasi 4, 33, 48, 105
full day school 2, 144

G

Goldberg 93, 94
guru 2, 4, 5, 8, 11, 23,
29, 30, 31, 47, 58,
59, 99, 100, 101,
135

I

ilmuwan 39, 72, 174
implementatif 33, 115,
118, 143
informal 12, 13, 15, 18,

57, 67, 74, 89, 101
input 1, 40, 42, 45, 71,
90, 115, 116, 117

J

Jamal Ma'mur Asmani
167, 168, 170

K

karawitan 25, 26, 27, 28

Karel A. Steenbrink 86

kearifan lokal vi, 3, 17,
18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 27, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 86,
102, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 165,
167, 168, 169, 174,
175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186,
187, 188, 189

Ki Hajar Dewantoro
107, 111

Koontz 52, 53, 63, 64,
198

kurikulum 4, 5, 7, 14,
15, 29, 30, 31, 37,
79, 83, 87, 89, 90,
91, 98, 102, 103,
107, 115, 118, 129,
146, 153, 154, 156,
172, 178, 180, 187

kurikulum 2013 5, 29,
30, 31, 156

kurikulum khusus 81

L

Legislasi 167

lokalitas 159

M

Macionis 75, 198

Madya 110

manajemen pendidikan

23, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41,
42, 47, 50, 60, 61,
66, 71, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 87,
88, 91, 92, 93, 95,
97, 102, 103, 104,
105, 109, 110, 112,
114, 115, 116, 117,
118, 119, 122, 127,
131, 133, 135, 138,
145, 148, 166

Metamorfosis 1

meta-skill 10

metode pembelajaran 2,
39, 90, 95, 154, 188

multimedia 99, 113, 121

Mulyasa 123, 125, 127,
129, 130, 136, 138,
140, 142, 143, 146,
150, 199

Murphy 171, 172, 200

Muslich 81, 200

N

nasionalisme 2, 79, 94,
173
nilai karakter 23, 24,
29, 30, 78, 108,
109, 113, 115, 116,
122, 123, 124, 125,
127, 128, 134, 135,
140, 150, 153, 171,
176, 182, 187, 189
non formal 1, 106
Nonformal 57, 205
norm value 67

O

outcome 9, 100, 115,
116, 117
output 1, 6, 7, 14, 40,
42, 43, 45, 63, 71,
80, 90, 115, 116,
117, 120, 121

P

Pannen 93, 200
Pembiasaan 142, 144,
173
Pendidikan Karakter
23, 31, 74, 76, 79,
82, 105, 107, 108,
109, 110, 111, 112,
118, 119, 120, 122,
123, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 134,

136, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145,
146, 147, 150, 159,
174, 176, 181, 186,
189, 191, 192, 193,
195, 196, 197, 199,
201, 202, 203, 205,
207, 208, 209

pendidikan sepanjang
hayat 13

peserta didik 5, 7, 8, 11,
12, 13, 23, 25, 31,
59, 78, 79, 80, 81,
89, 90, 107, 108,
117, 118, 132, 134,
143, 144, 149, 150,
154, 166, 170, 183,
185

R

Ranupadojo 57
religiusitas 83, 165
Richard Velkley 75
Rousseau 75, 76, 208

S

soft skill 15
sosialis iv, 103
Sujana 59

T

teknologi 2, 5, 7, 21, 43,
49, 75, 87, 101, 103
teknologi dan informasi
21

tenaga pendidik 1, 2, 6,
47, 76, 110, 124, 133,
135, 149, 150, 151,
172

U

UU No. 20 tahun 2003 9,
166

V

visioner 51

Z

Zamroni 107, 181, 209
Zuhdan K. Prasetyo 165

Tentang Penulis



Mukhammad Abdullah, lahir di Kabupaten Lamongan pada tanggal 5 April 1966 bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1385 H. Saat ini, penulis tinggal di Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur. Sejak 2019 samapi 2023, Penulis diamanahi tugas untuk mengemban sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Pascasarjana IAIN Kediri. Setelah pada periode sebelumnya (2014-2018) dipercaya memegang peran penting sebagai Wakil Ketua STAIN (sekarang menjadi IAIN) Kediri.

Gelar sarjana (S1) didapatkan di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1989 sebagai Sarjana Bahasa Inggris. Menamatkan sarjana dengan nilai terbaik, Penulis melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk meraih gelar master-nya. Benar saja, pada Tahun 2001,

Penulis berhasil menyabet gelas Master Pemikiran Pendidikan Islam. Tidak sampai disitu, gelora akademis dan ingin mengabdikan pada negeri menambah semangat Penulis untuk menyelesaikan studi doktoral di bidang pendidikan. Akhirnya tepat pada tahun 2007, Penulis dianugerahi predikat Doktor oleh Universitas Negeri Malang di bidang Manajemen Pendidikan.

Sebagai dosen tetap di IAIN Kediri, pada tahun 1999 sampai 2006 ditunjuk sebagai Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Selesai menjabat, Penulis langsung diserahi amanah sebagai Ketua Jurusan Tarbiyah tahun 2006-2014. Selanjutnya secara berturut-turut, Penulis menjadi Wakil Ketua STAIN Kediri tahun 2014 sampai 2018 dan tahun 2019 sampai sekarang menjabat Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Selama menjadi dosen, sudah banyak penelitian yang dihasilkan di bidang pendidikan. Diantaranya adalah *Meningkatkan Prestasi Akademik dan Non-Akademik Madrasah Aliyah di Indonesia: Studi Kritis Komparatif* (2015), *Model Pengembangan Atmosfer Akademik Perguruan Tinggi: Studi Kritis Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia* (2016), *Implementasi dan Pengembangan Kurikulum IKKNI PTAIN di Indonesia (UIN-IAIN-STAIN)* tahun 2018, *Manajemen Pendidikan: Dinamika Pendidikan*

Agama Islam Anak-Anak TKW di Desa Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri (2019), banyak lagi karya yang terbit di prosiding dan jurnal baik akreditasi nasional, jurnal internasional bahkan jurnal internasional bereputasi, satu di antaranya; *School Culture to Serve Performance of Madrasah in Indonesia*, QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies (2019). dan yang paling mutakhir berjudul *Manajemen Pendidikan Kearifan Lokal dan Implikasinya Bagi Peserta Didik di SMP Pawyatan Daha Kota Kediri (Tinjauan Antropologi-Edukasi)* tahun 2020.

Selain amanah kependidikan, Penulis juga aktif mengabdikan ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pengajian di masjid-masjid, seperti Masjid at-Taqwa MAN 3 Kediri, Masjid al-Utsman Kediri dan Masjid al-Ma'ruf Kediri. Penulis kerap kali diundang pada kegiatan-kegiatan *Workshop Internasional*, diantaranya *Trainer of Trainer Course Design for Fiqh Education* (2002) dan *International Conference, Said Nursi on Multicultural* di Turki yang dilaksanakan oleh Istanbul Foundation tahun 2007.

